

Jurnal Hubungan Internasional Indonesia

JHII | Vol. 3 | No. 1 | Hal. 1-166 | November 2020

Kepentingan Perubahan Kebijakan Luar Negeri *Global War On Terror* Amerika Serikat dalam Menanggapi Kasus Uighur di Tiongkok
(Annisa Apriyani)
1-38

Upaya Kontra Uni Eropa Terhadap Serangan Terorisme di Uni Eropa Tahun 2015-2017
(An Nisaa Atila Thabrani)
39-54

Kebijakan *War On Drugs* Presiden Rodrigo Duterte dalam Menanggulangi *Global Drugs Trafficking* di Filipina, 2016-2018
(Anita Dwi Gita Rianto)
55-66

Peran Unicef dalam Menangani Anak-Anak Korban Perang Sipil di Suriah Tahun 2012-2018
(Aditya Indra Sakti)
67-86

Strategi Mando-Pop dalam Menghadapi Persaingan Global
(Sevy Lelibriani)
87-106

Pemetaan Faktor-Faktor Pembangun Daya Saing Pariwisata Terhadap Kedatangan Wisatawan Internasional Negara-Negara Asia Pasifik Tahun 2017 dan 2019
(Wawan Taryanto)
107-132

Kebijakan Luar Negeri Inggris dalam Bidang Ekonomi Terhadap Eropa Pasca Referendum Brexit Pada Sektor *Foreign Direct Investment*, Ketenagakerjaan, dan Ekspor Impor pada Tahun 2016-2018
(Alfidra Aska Piejaya)
133-156

Pro dan Kontra Bitcoin: Analisis Pengaruh Perkembangan Bitcoin, Performa *Fiat Money* dan Sistem Kelola Negara
(Ria Aulia Mediana)
157-166

Jurnal Hubungan Internasional Indonesia

JHII | Vol. 3 | No. 1 | Hal. 1-166 | November 2020

Kepentingan Perubahan Kebijakan Luar Negeri *Global War On Terror* Amerika Serikat dalam Menanggapi Kasus Uighur di Tiongkok
(**Annisa Apriyani**)
1-38

Upaya Kontra Uni Eropa Terhadap Serangan Terorisme di Uni Eropa Tahun 2015-2017
(**An Nisaa Atila Thabrani**)
39-54

Kebijakan *War On Drugs* Presiden Rodrigo Duterte dalam Menanggulangi *Global Drugs Trafficking* di Filipina, 2016-2018
(**Anita Dwi Gita Rianto**)
55-66

Peran Unicef dalam Menangani Anak-Anak Korban Perang Sipil di Suriah Tahun 2012-2018
(**Aditya Indra Sakti**)
67-86

Strategi Mando-Pop dalam Menghadapi Persaingan Global
(**Sevy Lelibriani**)
87-106

Pemetaan Faktor-Faktor Pembangun Daya Saing Pariwisata Terhadap Kedatangan Wisatawan Internasional Negara-Negara Asia Pasifik Tahun 2017 dan 2019
(**Wawan Taryanto**)
107-132

Kebijakan Luar Negeri Inggris dalam Bidang Ekonomi Terhadap Eropa Pasca Referendum Brexit Pada *Sektor Foreign Direct Investment*, Ketenagakerjaan, dan Ekspor Impor pada Tahun 2016-2018
(**Alfidra Aska Piejaya**)
133-156

Pro dan Kontra Bitcoin: Analisis Pengaruh Perkembangan Bitcoin, Performa *Fiat Money* dan Sistem Kelola Negara
(**Ria Aulia Mediana**)
157-166

JHII | Vol. 3 | No. 1 | Hal. 1-166 | Lampung | November 2020 | ISSN 2615-8361

Editorial Office

Lampung Center for Global Studies
Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung



Jalan Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro, No. 1, Gedong Meneng
Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung, 35145

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung

Jurnal Hubungan Internasional

INDONESIA

Diterbitkan oleh Lampung Center for Global Studies

SUSUNAN TIM PENGELOLA

Pengarah

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

Penanggungjawab

Dr. Ari Darmastuti M.A

Pemimpin Redaksi

Fahmi Tarumanegara, S.IP., M.Si., M.B.A

Sekretaris

Roby Rakhmadi, S.IP.,M.Si

Anggota Redaksi

Drs. Agus Hadiawan, M.Si

Hasbi Sidik, S.IP.,M.A

Astiwi Inayah, S.IP., M.A

Dewan Penyunting

Prof. Dr. Karomani, M.Si

Prof. Dr. Yulianto

Dr. Dedy Hermawan, S.Sos.,M.Si

Bendahara

Rahayu Lestari, S.I.Kom.,M.A

Design

Indra Jaya Wiranata, S.IP.,M.A

Petunjuk Penulisan Jurnal

1. Naskah merupakan tulisan orisinal meliputi hasil penelitian, baik penelitian lapangan maupun penelitian pustaka dan artikel refleksi mengenai studi Hubungan Internasional yang belum pernah diterbitkan atau tidak sedang dalam masa penilaian oleh organisasi atau jurnal ilmiah lain
2. Naskah ditulis dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris
3. Naskah harus disertai abstraksi yang ditulis dalam bahasa Indonesia jika naskah berbahasa Inggris dan abstraksi berbahasa Inggris jika naskah ditulis dalam bahasa Indonesia
4. Naskah diketik dengan jenis huruf ‘Times New Roma’ ukuran 12 dan spasi 1.5 serta mencatumkan nomor halaman dengan minimal 10 halaman dan maksimal 30 halaman
5. Penulisan Daftar Pustaka menggunakan sistem referensi pada American Psychological Association

KATA PENGANTAR

Bagian pertama jurnal edisi ini menghadirkan tulisan-tulisan yang mengkaji berbagai isu Keamanan Internasional. Tulisan pertama pada bagian ini ditulis oleh **Annisa Apriyani** mengenai kepentingan perubahan kebijakan luar negeri *global war on terror* Amerika Serikat dalam menanggapi kasus Uighur di Tiongkok. Artikel kedua adalah tulisan karya **An Nisaa Atila Thabrani** mengenai upaya kontra Uni Eropa terhadap serangan terorisme di Uni Eropa tahun 2015-2017. Artikel ketiga memuat karya **Anita Dwi Gita Rianto** yang memaparkan kebijakan *war on drugs* Presiden Rodrigo Duterte dalam menanggulangi *global drugs trafficking* di Filipina pada tahun 2016-2018. Bagian terakhir atau artikel keempat adalah tulisan dari **Aditya Indra Sakti** mengenai peran Unicef dalam menangani anak-anak korban perang sipil di Suriah tahun 2012-2018.

Bagian kedua jurnal ini berisi dua karya yang menelaah bidang Kajian-Kajian Budaya Global. Artikel pertama pada bagian ini adalah tulisan dari **Sevy Lelibriani** membahas mengenai strategi mando-pop dalam menghadapi persaingan global. Artikel berikutnya adalah dari **Wawan Taryanto** yang membahas pemetaan faktor-faktor pembangun daya saing pariwisata terhadap kedatangan wisatawan internasional negara-negara Asia Pasifik tahun 2017 dan 2019. Artikel ini menjembatani dua bidang kajian yaitu Kajian-Kajian Budaya Global dan Ekonomi Politik Internasional.

Bagian ketiga berisi dua tulisan yang mengangkat isu di bidang Ekonomi Politik Internasional. Artikel pertama di bagian ini ditulis oleh **Alfidra Aska Piejaya** yang mengangkat kebijakan luar negeri Inggris dalam bidang ekonomi terhadap Eropa pasca referendum Brexit pada sektor *foreign direct investment*, ketenagakerjaan, dan ekspor impor pada tahun 2016-2018. Jurnal edisi ini ditutup oleh tulisan **Ria Aulia Mediana** yang menganalisis pengaruh perkembangan bitcoin, performa *fiat money* dan sistem kelola negara dalam menentukan pro dan kontra negara terhadap keberadaan Bitcoin.

Ragamnya tulisan di edisi ini menunjukkan semakin luasnya ketertarikan berbagai penulis di kajian-kajian utama Hubungan Internasional. Kondisi ini diharapkan terus berlangsung hingga ke edisi selanjutnya, dan keragaman tersebut diharapkan hadir di penggunaan metode, pemilihan aktor dan unit analisis, serta isu yang diangkat.

Bandarlampung, 2 November 2020.

Tim Redaksi dan Penyunting
Jurnal Hubungan Internasional Indonesia

Jurnal Hubungan Internasional

INDONESIA

Diterbitkan oleh Lampung Center for Global Studies

- Kepentingan Perubahan Kebijakan Luar Negeri Global War On Terror Amerika Serikat dalam Menanggapi Kasus Uighur di Tiongkok
(Annisa Apriyani) 01 – 38
- Upaya Kontra Uni Eropa Terhadap Serangan Terorisme di Uni Eropa Tahun 2015-2017
(An Nisaa Atila Thabrani) 39 – 54
- Kebijakan War On Drugs Presiden Rodrigo Duterte dalam Menanggulangi Global Drugs Trafficking di Filipina, 2016-2018
(Anita Dwi Gita Rianto) 55 – 66
- Peran Unicef dalam Menangani Anak-Anak Korban Perang Sipil di Suriah Tahun 2012-2018
(Aditya Indra Sakti) 67 – 86
- Strategi Mando-Pop dalam Menghadapi Persaingan Global
(Sevy Lelibriani) 87 – 106
- Pemetaan Faktor-Faktor Pembangun Daya Saing Pariwisata Terhadap Kedatangan Wisatawan Internasional Negara-Negara Asia Pasifik Tahun 2017 dan 2019
(Wawan Taryanto) 107 – 132
- Kebijakan Luar Negeri Inggris dalam Bidang Ekonomi Terhadap Eropa Pasca Referendum Brexit Pada Sektor Foreign Direct Investment (FDI), Ketenagakerjaan, dan Ekspor Impor pada Tahun 2016-2018
(Alfidra Aska Piejaya) 133 – 156
- Pro dan Kontra Bitcoin: Analisis Pengaruh Perkembangan Bitcoin, Performa Fiat Money dan Sistem Kelola Negara
(Ria Aulia Mediana) 157 – 166

**Keentingan Perubahan Kebijakan Luar Negeri
Global War On Terror Amerika Serikat dalam Menanggapi
Kasus Uighur di Tiongkok**

Oleh:
Annisa Apriyani¹

¹ Hubungan Internasional, Universitas Lampung
annisa1104@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan luar negeri *Global War on Terror* Amerika Serikat (AS) dalam menanggapi kasus Hak Azazi Manusia (HAM) Tiongkok di Uighur dan menjelaskan kepentingan perubahan kebijakan luar negeri *Global War on Terror* AS dalam menanggapi kasus Uighur di Tiongkok. Penelitian ini menggunakan teori dan konsep *national interest*, *foreign policy*, dan *human rights*. Dengan metode deskriptif kualitatif dan pengumpulan sumber data terutama dari website resmi, jurnal internasional badan pemerintah dan organisasi internasional, buku, berita, serta karya ilmiah lainnya, hasil penelitian ini menunjukkan terdapat lima alasan kepentingan nasional AS yang menjadi faktor perubahan kebijakan luar negeri *Global War on Terror* AS dari masa George W Bush hingga Donald Trump dalam menanggapi kasus Uighur di Tiongkok, yaitu kepentingan ekonomi, kepentingan ideologi, kepentingan tata internasional, kepentingan pertahanan keamanan, dan kepentingan strategis. Kelima alasan tersebut merupakan upaya AS dalam mempertahankan *power* yang dimiliki negaranya melalui upaya intervensinya dalam kasus Uighur di Tiongkok.

Kata kunci : Uighur, Tiongkok, Amerika Serikat, Kepentingan Nasional, Kebijakan Luar, *Global War on Terror*.

Pendahuluan

Peristiwa *World Trade Center* (WTC) 9/11 merupakan kejadian runtuhnya menara kembar WTC di New York, AS pada tanggal 11 September 2001. Terjadinya tragedi ini dikarenakan pembajakan atas pesawat *American Airlines* kode Penerbangan 11 yang sengaja ditabrakan ke Menara Utara WTC dan *United Airlines* Penerbangan 175 ke Menara Selatan.¹ Pesawat lainnya yaitu *American Airlines*, kode penerbangan 77, dibenturkan ke Gedung Pusat Pertahanan AS yaitu

¹ *Commission.Gov*, “*The Attack Looms*”, *National Commission on Terrorist Attack Up on the United States*, 2004 <http://www.9-11commission.gov/report/index.htm> (Diakses pada tanggal 3 desember 2019 pukul 14:11)

gedung Pentagon di Virginia dan pesawat *United Airlines* kode penerbangan 93 terjatuh di lapangan wilayah Pennsylvania. AS menduga peristiwa penyerangan WTC sengaja dilakukan oleh kelompok teroris yang akhirnya dilakukannya perubahan kebijakan luar negeri AS dengan pola *premtive attack* dan *defensive intervention* dengan tujuan untuk memberikan perlawanan kepada kelompok terorisme atas kasus WTC 9/11.²

Perubahan kebijakan ini dilakukan pada masa pemerintahan Presiden AS yaitu George W. Bush.³ Merespon isu terorisme ini, kebijakan AS dari bidang pertahanan keamanan hingga kebijakan luar negeri negaranya berubah signifikan.⁴ Pemerintah AS secara langsung menyatakan *Global War on Terror* (GWOT) dan kontra-terorisme, ditandai pernyataan Presiden George W. Bush yang mengatakan *either you are with us or you are with the terrorists*.⁵ Sejak saat itu AS seringkali mengintervensi negara-negara yang terkait isu terorisme. Diawali dengan aksi militer AS terhadap rezim Taliban dan Al-Qaeda di Afghanistan yang mana ini merupakan aksi dan respon langsung yang dilakukan pemerintah AS atas peristiwa 9/11 yang menimpa negaranya. Termasuk dengan upaya intervensi AS di negara Tiongkok atas konflik etnis Uighur.

Sebelumnya AS telah menetapkan bahwa etnis Uighur Tiongkok merupakan bagian dari kelompok terorisme internasional pada saat penyerangan AS di Afghanistan tahun 2001. Dalam penyerangan ini AS berhasil menangkap orang-orang Uighur anggota *East Turkistan Islamic Movement* atau (ETIM) yang juga diduga bergabung dalam lingkaran kelompok terorisme. Sikap AS menyikapi *Global War on Terror* yang terjadi di Uighur Tiongkok menunjukkan bahwa posisi negaranya ada dibarisan pro terhadap kebijakan pemerintah Tiongkok untuk memerangi etnis Uighur dan sepakat bahwa Uighur merupakan kelompok dari jaringan teroris internasional, dengan aksi yang diberikan pada pemerintah Bush

² *Ibid.*

³ Karl P Mueeler, *Striking First Preemptive and Preventive Attack in US National Security Policy* https://theasiadialogue.com/wp-content/uploads/2017/08/RAND_MG403.pdf (Diakses pada tanggal 3 Desember 2019 10:11)

⁴ Rizal Sukma, *Kemanan Internasional Pasca 11 September: Terorisme, Hegemoni AS dan Implikasi Regional*, CSIS, Jakarta (Diakses pada 3 Desember 2019 pukul 10:20)

⁵ George W. Bush: *Foreign Affairs* <http://militercenter.org/president/biography/gwbush-foreign-affairs> (Diakses pada tanggal 3 desember 2019 pukul:14:47)

yaitu menyatakan bahwa imigran dari kalangan orang Uighur masuk ke dalam daftar *blacklist* di negaranya.⁶

Dilanjutkan pada masa pemerintahan Barack Obama di tahun 2009 hingga 2017, respon AS dalam memberlakukan kebijakan *Global War on Terror* negaranya yang cenderung melakukan upaya multilateral yang mengandalkan *smart power* yaitu melengkapi dua dimensi *hard power* suatu negara yaitu militer (*carrots*) dan tekanan ekonomi (*sticks*), dimana *soft power* menjadi cara yang menurutnya efektif.⁷ AS pada masa Barack Obama juga lebih menekankan pada perbaikan nama AS sendiri dalam memberlakukan kebijakan *Global War on Terror*. Barack Obama menyatakan AS tidak lagi berperang dengan Islam, tetapi berperang melawan terorisme. Pada tahun 2013, pemerintahan Barack Obama memberikan laporan dari *United State Commission on International Religious Freedom* atau (USCIRF) yang dirilis pada tanggal 30 April memberikan pernyataan bahwa dalam 13 tahun berturut-turut Tiongkok dinobatkan sebagai negara yang perlu diperhatikan atas kondisi masalah keagamaannya yang sangat beragam.⁸

Di era pemerintahan presiden Donald Trump, kebijakan luar negeri *Global War on Terror* yang sebelumnya dicetuskan oleh AS sendiri seolah tidak berfungsi pada kasus Uighur Tiongkok. Hal ini ditunjukkan dengan sikap yang dilakukan oleh Trump pada tanggal 10 september 2018, melalui pernyataan dari juru bicara Kementerian Luar Negeri AS yaitu Heather Nauert mengatakan bahwa presiden Donald Trump mengadakan pembahasan di Gedung Putih soal pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap tindak pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah Tiongkok kepada kelompok minoritas Muslim Uighur.⁹ Hal tersebut dilakukan Trump dengan alasan kecaman atas diskriminasi pembatasan aktivitas keagamaan oleh pemerintah Tiongkok kepada Muslim Uighur.

⁶ J. Todd Reed and Diana Raschke, "THE ETIM: *China's Islamic Militants and the Global Terrorist Threat*", *PSI Guidesto Terrorists, Insurgents, and Armed Groups*, James J. F. Forest Series Editor, 2010 (Diakses pada tanggal 3 Desember 17:12)

⁷ Nye, Joseph. *Bound to Lead: The Changing Nature of American Power* New York: Basic Books, 1990 (Diakses pada tanggal 17:19)

⁸ *US Commission on International Religious Freedom, Annual Report, 2013* [https://www.uscirf.gov/sites/default/files/resources/2013%20USCIRF%20Annual%20Report%20\(2\).pdf](https://www.uscirf.gov/sites/default/files/resources/2013%20USCIRF%20Annual%20Report%20(2).pdf) (Diakses pada tanggal 19 November 2019 pukul 18:43)

⁹ *The New York Times, U.S. Weighs Sanctions Against Chinese Officials Over Muslim Detention Camps.* <https://www.nytimes.com/2018/09/10/world/asia/us-china-sanctions-muslimcamps.html> (Diakses pada tanggal 19 november 2019 pukul 19:34)

Teori dan Konsep

Teori ataupun konsep yang penulis gunakan pada penelitian ini menggunakan perspektif realisme yang ditunjukkan dengan konsep kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional dalam pembahasan utama kasus pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah Tiongkok terhadap etnis Uighur. *Foreign Policy* atau kebijakan luar negeri harus didasari atas kepentingan nasional yang kemudian diproses untuk mencapai serta melindungi apa yang dikategorikan atau ditetapkan sebagai kepentingan nasional. Adapun 2 faktor yang menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan luar negeri dalam penelitian ini yaitu :

1. Faktor Internal: Adanya kepentingan nasional dan sosial yang berhubungan dengan bidang ekonomi dan keamanan.
2. Faktor Eksternal: Sistem Internasional, kebijakan dan tujuan negara lain, adanya permasalahan global dan regional, hukum internasional dan opini negara dunia.¹⁰

Llyod Jensen sejalan dengan hal ini melalui teorinya yaitu *The Decision Making* menyatakan bahwa, tindakan internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpulan keputusan-keputusan yang dibuat oleh unit-unit politik domestik yang diakui, dimana para pemimpin negara bisa sebagai individual maupun berkelompok bertindak sebagai aktor-aktor utama dalam proses pengambilan keputusan tersebut.¹¹ Secara umum, kebijakan luar negeri merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional. Suatu komitmen yang pada dasarnya merupakan strategi dasar untuk mencapai suatu tujuan baik dalam konteks dalam negeri dan luar negeri serta sekaligus menentukan keterlibatan suatu negara di dalam isu-isu internasional atau lingkungan sekitarnya.

Kerangka kebijakan luar negeri yang digunakan AS menekankan pada masalah lima kepentingan nasional AS pada bidang ekonomi, ideologi, tata internasional, pertahanan keamanan dan strategis karena berdampak langsung pada persepsi para pemimpin AS tentang kepentingan utama mereka. Ini termasuk

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Lloyd Jensen. 1982. *Explaining Foreign Policy*. New Jersey, PrenticeHall, Inc, Englewood Cliffs, hlm 7.(Diakses pada tanggal 20 November 2019 pukul 15:33)

perhitungan strategis AS dalam misinya di wilayah Uighur Tiongkok soal pertambangan minyak. Selain itu kebangkitan paham komunisme yang sedang digencarkan oleh pemerintah Tiongkok, dan bangkitnya kembali Rusia yang dahulu sebagai Uni Soviet sebagai lawan ideologis abadi AS pasca perang dingin di dunia percaturan Internasional. Hal ini menjadikan para pengambil kebijakan AS memiliki ketakutan terhadap dampak-dampak yang dapat ditimbulkan oleh kebangkitan paham komunisme. Hal yang paling ditakuti oleh elit kebijakan luar negeri AS adalah efek-efek kebangkitan pengguncangan di bidang keamanan dan ekonomi negara-negara komunisme. Maka dari itu, para pemimpin AS diminta oleh sekelompok intelektual AS untuk melakukan pembendungan yang bersifat *preemptive* atau mendahului karena kelompok AS melihat kebangkitan Tiongkok yang signifikan dari bidang keamanan dan ekonomi sebagai ancaman yang berbahaya bagi AS. Untuk mencapai 5 kepentingan nasional AS tersebut, kebijakan luar negeri AS berfokus pada masalah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok terhadap etnis Uighur.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menetapkan *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948, menyatakan bahwa HAM merupakan hak-hak yang dimiliki seseorang karena keberadaannya sebagai manusia. Dengan kata lain, HAM secara umum dapat diartikan sebagai hak-hak yang melekat pada diri segenap manusia sehingga mereka diakui keberadaannya tanpa membedakan gender, ras, warna kulit, bahasa, agama, politik, kewarganegaraan, kekayaan, dan kelahiran. Manusia juga dianggap sebagai individu yang menyanggah status sebagai subjek hukum internasional disamping negara. Deklarasi ini juga sangat menekankan pada hak-hak sipil dan politik, seperti kebebasan berbicara, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan hak untuk beragama.¹² Dalam *Covenant on Civil and Political Rights* dan *Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (1966) yang merupakan hasil kompromi antara ideologi barat yaitu liberalisme yang menitik beratkan pada hak-hak politik dengan ideologi Timur yaitu komunisme yang menitik beratkan pada hak-hak ekonomi.¹³

¹² United Nations, *Universal Declaration of Human Rights*, <https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/> (Diakses pada tanggal 29 Juni 2020 pukul 19:30)

¹³ United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ceschr.aspx> (Diakses pada tanggal 29 Juni 2020 pukul 19:33)

Dalam hal ini adanya upaya penyalarsan antara hak individu yaitu hak sipil dan politik dengan hak kolektif yaitu hak ekonomi dan sosial seperti hak untuk kehidupan yang layak dan mendapatkan pendidikan. Adanya perbedaan hak sipil dan hak politik dengan hak ekonomi dan sosial yang masih menimbulkan persepsi yang berbeda-beda mengenai apa yang merupakan pelanggaran HAM. Negara-negara barat berpendapat bahwa pelanggaran HAM hanya menyangkut pelanggaran hak sipil dan hak politik saja, khususnya yang berkaitan dengan hak dan kebebasan individu.¹⁴ Dalam konsep *Human Rights* adanya istilah *humanitarian intervention*, menurut J.L. Holzgrefe: “*The treat or use of force by a state (or group of states) aimed at preventing or ending widespread and grave violations of the fundamental human rights of individuals other than its own citizens, without the permission of the state within whose territory force applied*”.¹⁵ Selain penggunaan intervensi kemanusiaan melalui cara aksi militer atau menggunakan cara pasukan keamanan, saat ini terdapat pula intervensi kemanusiaan yang lebih halus yaitu dengan menggunakan isu pelanggaran HAM dan bantuan ekonomi, sehingga seolah-olah mempunyai kewenangan untuk melakukan intervensi kemanusiaan.¹⁶

Penganut teori liberal memahami prinsip keadulatan, *non-intervensi*, dan tidak menggunakan kekerasan terhadap negara lain. Namun, mereka berpendapat bahwa tujuan utama dari negara adalah untuk menjamin keamanan masyarakat. Apabila terdapat suatu negara yang seharusnya melindungi warganya malah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi warganya, maka hal itu sudah cukup alasan pembenaran bagi negara lain untuk melakukan *humanitarian intervention*. Dalam hal ini AS sebagai negara yang menganut paham liberalisme dan demokrasi tentu akan menyuarakan *power* negaranya dalam menegakkan dan membela HAM serta menentang pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok atas kasus Uighur selain tujuannya dalam upaya 5 kepentingan nasional yang ingin dicapai negaranya.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ J.L. Holzgrefe dan Robert O. Keohan, *Humanitarian Intervention: Ethical, Legal, and Political Dilemmas*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003 hlm 278. (Diakses pada tanggal 27 Juni 2020 pukul 14:25)

¹⁶ *Ibid.*

Kepentingan nasional menurut Hubungan Internasional yang dinyatakan oleh Hans J. Morgenthau merupakan konsep turunan dari anggapannya mengenai sifat dasar masyarakat internasional dan penyamarataan tentang dorongan nasional. Kepentingan nasional suatu negara juga adalah sebuah tatanan internasional yang menjadi faktor pendorong negara tersebut untuk menjalankan kebijakan luar negeri dan peran sertanya dalam hubungan internasional.¹⁷ Kepentingan nasional negara ini juga merupakan bentuk perjuangan negara untuk memperjuangkan dan mencapai kekuatan atau kekuasaan (*power*).¹⁸ Dalam hubungan internasional, *power* dapat dijadikan suatu kontrol kekuasaan terhadap negara lain.¹⁹ *Power* memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan eksistensi sebuah negara dalam menjalankan suatu hubungan internasional. Suatu negara akan mencapai kepentingan nasionalnya apabila memiliki *power* yang kuat. Orang-orang yang memiliki *power* bisa dengan senang hati menghegemoni atau memerintah berbagai hal sesuai dengan keinginan mereka.

Kepentingan Nasional atau *National Interest* juga memiliki dimensi yang berbeda. Dimensi-dimensi tersebut adalah kepentingan pertahanan, kepentingan ekonomi, kepentingan tata internasional, kepentingan ideologi dan strategis.²⁰ Jutta Weldes juga berpendapat bahwa kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh suatu negara melalui langkah-langkah yang strategis dan menjadi alasan suatu negara menjalankan kepentingan nasionalnya dengan mengadopsi cara ini agar tepat sasaran yaitu melalui cara menghubungkan tujuan dengan cara penggunaan sumber daya yang tersedia untuk mendapatkan tujuan apapun. Sumber daya atau sarana yang dimaksud tidak hanya merujuk pada kekuatan nyata yang dapat digunakan tetapi banyak faktor, tidak hanya berlaku dalam urusan militer tetapi juga dalam hubungan internasional. Strategis dalam pengertian disini yaitu mengkoordinasikan pengembangan dan penggunaan instrumen politik, ekonomi,

¹⁷ Joseph S. Nye : *Understanding International Conflicts: An Introduction to Theory and History*, 2007, 49-50 (Diakses pada tanggal 2 November 2019 pukul 13:15)

¹⁸ Morgenthau, Hans J, 1985, *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, 6th ed, New York: Alfred A. Knopf, hlm 5. (Diakses pada tanggal 2 November 2019 pukul 13:23)

¹⁹ Schuman, Frederick L, *International Politics: The Western State System in Transition*, New York: The FreePress, 1941, hlm 261-265 (Diakses pada tanggal 2 November 2019 pukul 14:01)

²⁰ Donald E. Nuechterlein, *National Interest and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision Making*, 1976, hlm 246 <https://www.jstor.org/stable/20096778?seq=1> (Diakses pada tanggal 2 November 14:17)

militer dan kekuatan nasional dalam mencapai sebuah tujuan.²¹ Pada pembahasan kali ini terdapat lima kepentingan yang menjadi dasar AS. Kepentingan nasional ini juga menjadi dasar bagi setiap negara dalam mengambil kebijakan luar negeri negaranya. Termasuk dalam pembahasan ini yang mana AS mengubah kebijakan luar negerinya dalam kasus Uighur Tiongkok.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan penulis adalah metode penelitian studi kasus atau studi pustaka dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif. Penulis menggunakan metode dan pendekatan ini karena metode dan pendekatan ini membantu dalam menjelaskan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Pasalnya, dengan menggunakan metode ini berarti hal yang dilakukan oleh sang penulis dalam proses pengumpulan data adalah dengan cara mendapatkannya melalui berbagai sumber data yaitu berupa buku, website resmi milik badan pemerintah dan organisasi internasional, artikel berita, dan jurnal karya ilmiah yang kemudian dikaitkan dengan pembahasan penelitian sang penulis dengan menggunakan teori dan konsep yang dianggap relevan untuk digunakan di dalam penelitian tersebut.

“Case studies are a strategy of inquiry in which the researchers explores in depth a program, event, activity, process, or one or more individuals. Cases are bounded by time and activity, and researchers collect detailed information using a variety of data collection procedures over a sustained period of time.”²²

Kebijakan luar negeri AS dalam menanggapi masalah HAM Uighur di Tiongkok

Upaya AS dalam menanggapi pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah Tiongkok terhadap etnis Uighur, yaitu dengan dibukanya forum yang disponsori langsung oleh AS di markas PBB pada bulan maret 2019 di Jenewa, Swiss. Acara tersebut berfokus pada tuduhan-tuduhan pelanggaran HAM terhadap Muslim Uighur oleh pemerintah Tiongkok. Hal ini disampaikan langsung oleh Duta

²¹ Weldes, Jutta, *Constructing National Interest. European Journal of International Relations*, 1996 (Diakses pada tanggal 2 November 2019 pukul 14:48)

²² Creswell, John W, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, US: SAGE Publications, 2009 (Diakses pada tanggal 2 November 2019 pukul 15:20)

Besar sementara AS untuk PBB, bernama Kelley Currie yang juga memimpini Kantor Keadilan Global pada Departemen Luar Negeri AS.²³ Selanjutnya kebijakan luar negeri yang diupayakan oleh AS adalah *Uyghur Human Rights Policy Act of 2019* yang menekan perlakuan sewenang-wenang, diskriminasi sistematis, dan pengekangan hak sipil, hak politik, termasuk kebebasan dalam berekspresi, beragama, dan bergerak yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok terhadap etnis Uighur.²⁴ Isi kebijakan tersebut adalah memberikan kewenangan kepada pemerintahan Presiden Trump untuk menjatuhkan sanksi terhadap pemerintah Tiongkok atas dugaan penindasan terhadap Muslim Uighur yang tinggal di wilayah otonom Provinsi Xinjiang. Sanksi-sanksi yang diberikan melalui ketentuan dari penerapan Undang-Undang Kebebasan Beragama Internasional Frank R. Wolf atau dikenal dengan *Frank R. Wolf's International Religious Freedom Act (IRFA)* yang mana undang-undang (UU) ini meningkatkan kemampuan AS untuk memajukan kebebasan beragama secara global melalui peningkatan diplomasi, pelatihan, kontraterorisme, dan upaya bantuan asing, dan melalui respons politik yang lebih kuat dan lebih fleksibel terhadap pelanggaran kebebasan beragama dan ekstremisme dengan kekerasan di seluruh dunia, dan untuk tujuan lainnya.²⁵

Penerapan sanksi berdasarkan *Global Magnitsky Human Rights Accountability Act* yang sehubungan dengan pejabat senior tertentu dari Tiongkok, yang merupakan UU bipartisan yang disahkan oleh Kongres AS dan disahkan oleh Presiden Obama pada Desember 2012. Sejak 2016 UU ini berlaku secara global, yang mana memberikan wewenang kepada pemerintah AS untuk menjatuhkan sanksi kepada mereka yang dianggap sebagai pelanggar hak asasi manusia, membekukan aset mereka, dan larangan kepada mereka yang terduga sebagai pelanggar HAM untuk memasuki negara AS.²⁶

²³ *Human Rights Watch, UN: Rights Body Needs to Step Upon Xinjiang Abuses*, 12 maret 2020 <https://www.hrw.org/news/2020/03/12/un-rights-body-needs-step-xinjiang-abuses> (Diakses pada tanggal 5 Maret 2020 pukul 10:14)

²⁴ *Congress.Gov, S.178 - Uyghur Human Rights Policy Act of 2019*, <https://www.congress.gov/bills/116/congress/senate/bills/178> (Diakses pada tanggal 5 Maret 2020 pukul 10:18)

²⁵ *Wolf, Frank R. "HR1685 - 105 Congress (1997-1998): Freedom From Religious Persecution Act of 1997, 8 Oktober 1997.* www.congress.gov (Diakses pada tanggal 5 Maret 2020 pukul 11:14)

²⁶ *U.S. Government Publishing Office, The Global Magnitsky Human Rights Accountability Act*, 29 april 2015 <https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-114hrg94388/html/CHRG-114hrg94388.htm> (Diakses pada tanggal 5 Maret 2020 pukul 11:30)

Selanjutnya pada tanggal 29 oktober 2019, AS kembali mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh 193 anggota Komite HAM PBB, dan didukung oleh 23 negara-negara barat diantaranya Australia, Kanada, Perancis, dan negara lainnya menyetujui serta sama-sama memberikan pernyataan sikap kontra terhadap kebijakan pemerintah Tiongkok atas etnis Uighur dengan adanya pernyataan yang disampaikan oleh Duta Besar Inggris untuk PBB bernama Karen Pierce yaitu,

"kami menyerukan kepada pemerintah Tiongkok untuk menegakkan hukum nasional dan kewajiban internasional serta komitmen untuk menghormati hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama di Xinjiang dan diseluruh wilayah di Tiongkok".²⁷

Negara-negara tersebut mendorong agar pemerintah Tiongkok segera menerapkan rekomendasi yang telah disetujui oleh para ahli independen PBB soal kondisi di Xinjiang. Sekaligus untuk tidak lagi melakukan dan segera menutup fasilitas penahanan sewenang-wenangnya terhadap warga etnis Uighur dan komunitas Muslim lainnya.

Pemerintah Tiongkok melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri negaranya bernama Hua Chunying menanggapi berbagai aksi yang dilakukan AS tersebut dengan memberikan kecaman dan mengancam akan mengambil tindakan balasan terlebih jika AS sampai menerapkan *Uyghur Human Rights Policy Act of 2019* dengan merilis daftar entitas pemerintah AS yang dianggap tidak dapat diandalkan dan juga akan memberlakukan sanksi terhadap mereka yang membahayakan kepentingan Tiongkok hingga larangan visa bagi pejabat AS maupun non pemerintahan.²⁸ Hingga saat itu pemerintah Tiongkok masih bersikukuh bahwa kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh negaranya merupakan perlawanan terorisme dan tidak melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Namun pada pertengahan bulan November 2019, tersebarnya dokumen rahasia pemerintah Tiongkok yang berisikan tindakan kekerasan terhadap etnis Uighur di Xinjiang. Dokumen yang setebal 403 halaman tersebut mengungkapkan bagaimana

²⁷ Aljazeera, China warns US criticism on Uighurs not 'helpful' for trade talks, 30 Oktober 2019 <https://www.aljazeera.com/news/2019/10/china-warns-criticism-ughurs-helpful-trade-talks-191030005757892.html> (Diakses pada tanggal 5 Maret 2020 pukul 12:46)

²⁸ The Guardian, US House approves Uighur Act calling for sanctions on China's senior officials, 4 Desember 2019 <https://www.theguardian.com/world/2019/dec/04/us-house-approves-ughur-act-calling-for-sanctions-on-chinas-politburo-xinjiang-muslim> (Diakses pada tanggal 5 Maret 2020 pukul 12:55)

perlakuan Presiden Xi Jinping pada tahun 2014 memerintahkan para pejabat bawahannya untuk membalas aksi gerilyawan etnis Uighur dengan pembalasan sekeras mungkin tanpa melihat rasa belas kasih.²⁹

Dalam dokumen yang diberi judul dengan “*The Xinjiang Papers*” tersebut, Xi Jinping mengatakan kelompok ekstrimisme Islam menyerupai virus yang bisa menular dan seperti obat yang membuat kecanduan.³⁰ Selain itu isi dokumen tersebut juga menjelaskan rincian upaya pemerintah Tiongkok mencuci otak ratusan ribu Muslim secara sistematis dalam camp-camp yang dijaga ketat itu.³¹ Tentu hal ini seharusnya dapat semakin menguatkan tekanan AS dan juga PBB terhadap Tiongkok untuk dapat masuk dan melakukan investigasi langsung ke wilayah Xinjiang. Hal ini tentu berdampak semakin bersitegangnya hubungan antara AS dan Tiongkok ditambah dengan adanya masalah perang dagang antara kedua negara tersebut, yang mana Xinjiang merupakan bagian penting dari proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) yang sejak 2013 telah dicetuskan oleh Tiongkok, yang mana tujuannya untuk memperluas jaringan ekonomi negaranya dari Asia-Pasifik, Afrika Utara dan Timur bahkan hingga Mediterania. Dapat dikatakan bahwa Xinjiang merupakan jantung dari proyek BRI yang berada di barat laut Tiongkok sebagai penghubung antar Tiongkok, Asia Tengah dan Timur Tengah.³² Maka pemerintah Tiongkok akan melakukan hal apapun demi stabilnya wilayah tersebut, termasuk dengan bersikukuh bahwa negaranya tidak melakukan pelanggaran HAM di Xinjiang meskipun dokumen rahasia Tiongkok telah tersebar. Sederhananya, jika Tiongkok sampai mengakui hal tersebut, sama saja pemerintah Tiongkok merusak reputasi negaranya sendiri dan hal tersebut dapat merusak segala bidang kerja sama maupun proyek yang dibangun negaranya.

²⁹ CNN.com, *Leaked Chinese Government Records Reveal Detailed Surveillance Reports on Uyghur Families and Beijing’s Justification or Mass Detentions* <https://edition.cnn.com/interactive/2020/02/asia/xinjiang-china-karakax-document-intl-hnk/> (Diakses pada tanggal 5 Maret 2020 pukul 13:03)

³⁰ International Consortium of Investigative Journalists, *China Cables: Who Are The Uighurs and Why Mass Detention?*. 24 November 2019 <https://www.icij.org/investigations/china-cables/china-cables-who-are-the-uighurs-and-why-mass-detention/> (Diakses pada tanggal 5 Maret 2020 pukul 13:07)

³¹ *The New York Times*, ‘Absolutely No Mercy’: Leaked Files Expose How China Organized Mass Detentions of Muslims, 16 November 2019 <https://www.nytimes.com/interactive/2019/11/16/world/asia/china-xinjiang-documents.html> (Diakses pada tanggal 5 Maret 2020 pukul 13:26)

³² *China Daily.com*, *Xinjiang rides high on Belt and Road Initiative*, 8 Agustus 2018 <http://www.chinadaily.com.cn/a/201808/08/WS5b6a649ba310add14f384a0c.html>. (Diakses pada tanggal 5 Maret 2020 pukul 13:42)

Kebijakan Luar Negeri *Global War on Terror* (GWOT) Era George W Bush

Dimasa kepemimpinan George W Bush dalam melahirkan dan menerapkan kebijakan luar negeri GWOT negaranya beliau mengubah kebijakan luar negeri tersebut dengan cara pola *premtive attack* dan *defensive intervention* yang mana pola ini dilakukan untuk mengantisipasi serangan yang berkemungkinan besar akan datang dan lebih baik mencegah terlebih awal demi tidak terulangnya tercoreng kehormatan AS di dunia internasional seperti aksi penyerangan terorisme WTC 9/11 lalu.³³ Selama mengampanyekan kebijakan luar negeri GWOT ini Bush berhasil mendapatkan perhatian dan dukungan organisasi-organisasi Internasional seperti Dewan Keamanan PBB, NATO, Uni Eropa, untuk secara aktif memberlakukan kebijakan GWOT ini.

Disusul pada tanggal 14 september 2001, *Authorization For Use of Military Force* atau (AUMF) resmi menjadi bagian dari hukum AS yang sah. Dalam AUMF ini, presiden AS dapat secara legal menggunakan segala hal yang dibutuhkan untuk melawan negara, organisasi, maupun sekelompok orang yang dicurigai merencanakan, memerintahkan, melakukan, dan mendanai serangan terorisme WTC 9/11. Selain itu, AUMF juga dilegalkan untuk mencegah serangan terorisme dalam bentuk apapun ke AS. Adanya otoritas ini menjadikan, AS segera melancarkan misinya untuk menumpas berbagai bentuk terorisme di negara-negara yang berpotensi menjadi sarang persembunyian kelompok terorisme, seperti Afganistan, Suriah dan SriLanka.³⁴ Namun hingga saat ini bisa dilihat bahwa AS masih sama rentannya dengan negara lain dalam menghadapi terorisme.³⁵ Pada era Presiden Bush dikenal menggunakan *hard power* dalam menanggapi isu terorisme. AS juga tidak hanya sekedar menyelesaikan aksi terorisme tetapi justru seolah AS mengambil keuntungan dari kebijakan GWOT ini yang mana negaranya menggunakan strategi berbasis politik, strategi kekuatan militer, dan strategi

³³ Pikiran Rakyat ,Politik Luar Negeri Amerika pada Era Bush”, 17 September, 2001, <http://www.pikiran-rakyat.com.cetak1004/170901.htm>. (Diakses pada tanggal 5 Maret 2020 pukul 15:19)

³⁴ Naufal Afif Azmi dan Arina Wafa Aulia, Analisis Kebijakan *Global War On Terror* (GWOT) di Era Donald Trump, Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Wahid Hasyim, Semarang,., Prosiding Senas POLHI ke-2 Tahun, 2019, Hlm. 284 (Diakses pada tanggal 5 Maret 2020 pukul 15:48)

³⁵ Asumsi.co, “Kegagalan *War on Terror*, 17 Tahun Setelah 9/11, 7 agustus 2019, <https://www.asumsi.co/post/kegagalan-war-terror-17-tahun-setelah-911> (Diakses pada tanggal 5 Maret 2020 pukul 15:51)

berbasis usaha untuk mengatur urusan domestik negara lain yang berujung pada AS akhirnya selalu dengan bebas untuk intervensi diberbagai negara dunia.

Kebijakan Luar Negeri GWOT Era Barack Obama

Barack Obama yang memenangkan pemilu 2008 dengan slogan kampanye “*change we can believe in*” dan menyatakan bahwa dirinya tidak setuju dengan program GWOT yang dijalankan oleh Bush. Dalam menjalankan kebijakan “*War Against Terrorism*”,³⁶ Obama mengambil kebijakan yang berbeda dari Bush. Jika Bush secara terang-terangan melekatkan tindakan terorisme dengan Islam, maka Obama memandang terorisme sebagai suatu gerakan radikal tanpa label agama. Obama tidak memandang terorisme semata-mata agama Islam, justru terorisme merupakan representasi dari kelompok-kelompok fundamentalis, radikal yang tidak hanya berbasis pada agama akan tetapi memiliki kecenderungan untuk mencapai tujuan-tujuan strategis dengan memobilisasi kekerasan, menggalang opini masyarakat, serta menggunakan ancaman untuk kepentingan politiknya.³⁷ Oleh karena itu dalam memerangi terorisme, Obama tidak hanya menggunakan *hard power* tetapi melakukan pendekatan-pendekatan *soft power*.³⁸ Dalam menanggapi ancaman-ancaman gerakan terorisme internasional, Presiden Obama mengeluarkan beberapa kebijakan keamanan, yaitu:³⁹

1. Pendekatan dengan Negara Muslim,
2. *Comprehensive Partnership*,
3. Pembentukan Koalisi Internasional,

Konsep *smart power* yang digunakan Obama dalam kebijakan luar negerinya merupakan perpaduan antara *hard power* dan *soft power*. *Smart power* merupakan “*the ability to combine soft and hard power into a winning strategy*”,

³⁶ Barack Obama, *President of the United States of America, Change We Can Believe In*, *supranote* 17, hlm 245-46 <https://www.history.com/topics/us-presidents/barack-obama> (Diakses pada tanggal 28 Juni 2020 pukul 19:50)

³⁷ CNN *Politics*, Obama: *Why I won't say Islamic terrorism*, 29 September 2016 <https://edition.cnn.com/2016/09/28/politics/obama-radical-islamic-terrorism-cnn-town-hall/index.html> (Diakses pada tanggal 28 Juni 2020 pukul 20:00)

³⁸ Sharp Paul and Geoffrey Wiseman, *American Diplomacy*, Leiden Boston, 2012 hlm 164 (Diakses pada tanggal 28 Juni 2020 pukul 20:11)

³⁹ James M. McCormick, *The Obama Presidency: A Foreign Policy of Change?*, IOWA State University, 2011 hlm 5-10. https://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1018&context=pols_pubs (Diakses pada tanggal 28 Juni 2020 pukul 20:17)

yaitu kemampuan untuk memenangkan suatu strategi melalui cara-cara yang mengutamakan dialog, serta kerja sama negara yang bersangkutan dengan tetap menyelipkan kepentingan nasional negaranya juga sebagai upaya untuk memaksimalkan kepentingan di tingkat internasional.⁴⁰

Kebijakan Luar Negeri GWOT Era Donald Trump

Sejak 20 Januari 2017 resmi dilantiknya Trump sebagai presiden AS dengan sikap anti Islamnya yang lebih keras, yang mana hal ini sesuai dengan isi kampanyenya yang akan menerapkan kebijakan politik luar negeri yang berkemungkinan menimbulkan ancaman terhadap hubungan diplomatik dengan banyak negara terutama negara-negara Muslim. Trump meresmikan perintah eksekutif negaranya yang isinya adalah larangan atas masuknya imigran pengungsi dari tujuh negara mayoritas Islam yaitu Iran, Irak, Libia, Somalia, Sudan, Yaman dan Suriah.⁴¹

Alasannya adalah negara-negara tersebut diduga memiliki jaringan dengan organisasi teroris yang beroperasi secara aktif dan dianggap sebagai tempat berlindung teroris, selain itu imigran-imigran tersebut diduga sebagai anggota *Islamic State of Iraq and Syria* atau (ISIS) yang menyusup ke AS untuk bisa mendapatkan suaka politik, alasan lainnya agar AS terbebas dari teroris Islam radikal.⁴² Kebijakan luar negeri *Global War on Terror* Trump semakin memperketat imigran-imigran termasuk dengan imigran Muslim yaitu dengan memperketat pemeriksaan atau pengontrolan terhadap para imigran yang ada di AS dengan pemberian kartu identitas khusus untuk penduduk yang beragama Muslim,⁴³ karena menurut Trump Islam merupakan agama yang berbahaya dan

⁴⁰. Joseph P. Nye, "Get Smart-Combining Hard and Soft Power," *Foreign Affairs*, July/August 2009 accessible at: www.foreignaffairs.com/articles/65163/joseph-s-nye-jr/get-smart (Diakses pada tanggal 28 Juni 2020 pukul 19:07)

⁴¹ Wicaksono Aditya, Pembatasan Imigran Muslim di Amerika Serikat, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, IAIN Surakarta, hlm 2, 2017 (Diakses pada tanggal 4 November 2019i pukul 20:17)

⁴² Naufal Afif Azmi dan Arina Wafa Aulia, Analisis Kebijakan *Global War On Terror* (GWOT) di Era Donald Trump, Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Wahid Hasyim, Semarang, Prosiding Senas POLHI ke-2 Tahun, 2019, Hlm.289. (Diakses pada tanggal 4 November 2019 pukul 20:29)

⁴³ *The New York Times*, *Trump Administration Adds Six Countries to Travel Ban*, 31 Januari 2020 <https://www.nytimes.com/2020/01/31/us/politics/trump-travel-ban.html> (Diakses pada tanggal 8 November pukul 11:53)

patut diwaspadai terlebih terkait dengan isu-isu teroris. Menurut Trump kebijakan ini sebagai upaya preventif demi melindungi stabilitas pertahanan dan keamanan AS dari imigran-imigran yang diduga memiliki jaringan dengan organisasi teroris internasional yang akan memasuki wilayah AS untuk mencari suaka atau melancarkan misi-misinya.⁴⁴

Namun pada kasus Uighur di Tiongkok kebijakan GWOT AS dimasa Trump tidak berlaku atas klaim yang diisukan pemerintah Tiongkok bahwa negaranya sedang memerangi ekstremisme teroris. Melihat perubahan AS yang kini pro terhadap etnis Uighur, dan melihat pelanggaran-pelanggaran HAM apa saja yang dilakukan pemerintah Tiongkok yang telah disuarakan oleh AS kepada dunia, menjelaskan bahwa Donald Trump lebih mengutamakan kedikdayaan negaranya serta reputasi AS dimata internasional atas pembelaan negaranya terhadap etnis Uighur atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok. Meskipun hal ini berarti AS mengabaikan kebijakan *Global War on Terror* yang sebelumnya dimasa Presiden George W Bush menyetujui bahwa warga etnis Uighur dan organisasi ETIM merupakan jaringan teroris internasional serta mendukung langkah kebijakan pemerintah Tiongkok, meskipun begitu AS dibawah pemerintahan Trump lebih memilih untuk menerapkan UU global *Frank R. Wolf's International Religious Freedom Act* (IRFA) dan UU *Global Magnitsky Human Rights Accountability Act*.

Hal ini dianggap menguntungkan dalam menanggapi isu Uighur saat ini. UU tersebut memberikan ruang yang lebih luas bagi AS untuk dapat memberikan sanksi kepada negara-negara terduga pelanggar HAM, mengawasi wilayah tempat terjadinya pelanggaran HAM dan mendapatkan informasi atas korban. Selain itu menjadi upaya bagi AS dibawah pemerintahan Donald Trump untuk dapat menggugat pemerintah Tiongkok yang mana saat ini juga menjadi lawan bagi AS dibeberapa bidang seperti ekonomi dan militer, hal tersebutlah yang menjadikan tidak berlakunya kebijakan *Global War on Terror* dimasa pemerintah Donald Trump.

⁴⁴ *Center for Migration Studies, President Trump's Executive Orders on Immigration and Refugees* <https://cmsny.org/trumps-executive-orders-immigration-refugees/> (Diakses pada tanggal 7 Maret 2020 pukul 10:15)

Faktor Yang Memengaruhi Perubahan Kebijakan Luar Negeri GWOT AS Pada Kasus Uighur di Tiongkok

Berubahnya kebijakan luar negeri *Global War on Terror* AS yang awalnya berada pada barisan pro terhadap kebijakan pemerintah Tiongkok dan kini berbalik pada posisi kontra terhadap pemerintah Tiongkok di era presiden Donald Trump yang tentu hal ini memiliki dasar. AS adalah negara yang melahirkan kebijakan luar negeri GWOT itu sendiri, tidak akan melanggar prinsip negaranya jika tidak mempertimbangkan hal yang lebih penting untung dicapai oleh negaranya. Dengan adanya pertimbangan kepentingan nasional AS yang lebih strategis dimasa ini, inilah alasan berubahnya sikap kebijakan luar negeri GWOT AS terhadap kasus Uighur di Tiongkok yang mencakup lima bidang kepentingan nasional AS.

Kepentingan Ekonomi

Adanya 3 variabel yang menjadi kepentingan ekonomi AS yaitu kebutuhan minyak dan gas AS, terdapat 53 perusahaan AS di wilayah Xinjiang, dan ketiga upaya memenangkan perang dagang antara Tiongkok. Pertama peningkatan kebutuhan minyak dan gas yang diperlukan AS, sedangkan produksi domestik minyak dan gas negaranya yang semakin menurun menjadi alasan dari tujuan AS ikut campur terhadap konflik internal di Tiongkok. Etnis Uighur berasal dari wilayah Xinjiang yang mana tempat ini merupakan salah satu wilayah yang kaya akan hasil bumi yaitu ladang minyak dan gas, wilayah ini juga merupakan wilayah yang diandalkan oleh Tiongkok terhadap peningkatan ekonomi negaranya karena kayanya hasil bumi minyak dan gas yang dimiliki Xinjiang. AS masuk pada konflik ini akibat dari meningkatnya permintaan pasar sedangkan produksi domestik AS sendiri sedang pada tahapan menurun. Tahun 2009, AS menjadi negara dengan posisi paling tinggi sebagai penkonsumsi minyak terbesar diseluruh dunia.⁴⁵

Hingga tahun 2019 AS mengkonsumsi minyak sebanyak 20,46 juta barrel setiap harinya atau sekitar 7,47 miliar barel produk minyak bumi,⁴⁶ yang mana kebanyakan didapatkan dari hasil impor, dan sisanya dari ladang minyak yang

⁴⁵ *US Energy Information Administration*, <http://www.eia.doe.gov/oiaf/aeo/gas.html>. (Diakses pada tanggal 9 Maret 2020 pukul 07:51)

⁴⁶ *US Energy Information Administration* <https://www.eia.gov/totalenergy/data/browser/index.php?tbl=T03.01#/?f=A&start=1949&end=2019&charted=15> (Diakses pada tanggal 9 Maret 2020 pukul 09:16)

dihasilkan negaranya sendiri. Tingkat konsumsi minyak AS meningkat dalam waktu 20 puluh tahun kedepan, diperkirakan sebanyak 28,3 juta barel perharinya, yang berarti konsumsinya naik 40%. Sedangkan negaranya hanya dapat memasok kebutuhan domestiknya sebanyak 30% dari keseluruhan total kebutuhan AS.⁴⁷

World Energy Outlook berpendapat, diperkirakan permintaan kebutuhan minyak dunia pada tahun 2030 akan mengalami peningkatan dari 80 juta barrel perhari (bph) menjadi 118 juta (bph).⁴⁸ Selain dari ketersediaan minyak yang menjadi fokus penting, harga minyak dunia pada tahun 2030 telah menjadi hal yang telah dipikirkan saat ini. Diperkirakan harga minyak mentah ditahun 2030 akan berada pada kisaran harga U\$ 30 (*low price*), U\$ 57 (*referance price*) dan U\$ 96 (*high price*) per barel.⁴⁹ Wilayah penghasil minyak dan gas alam tersebut salah satunya berada di wilayah Xinjiang, yang mana wilayah ini merupakan provinsi yang berada di Tiongkok dan merupakan tempat tinggal mayoritas etnis Uighur.⁵⁰ Xinjiang memiliki tiga wilayah utama dengan kekayaan sumber daya alam gas dan minyak. Ketiga wilayah tersebut yaitu Junggar Basin, Tarim dan terakhir Tuha.

1. *Junggar Basin Petroliferous*

Junggar Basin adalah ladang minyak dan gas terbesar di wilayah Xinjiang Tiongkok yang luasnya sebesar 130.900 km². Ladang minyak ini pertama kalinya ditemukan pada tanggal 29 oktober tahun 1955, pada tahun ini merupakan awal terjadinya industri minyak di Xinjiang. 38 tahun telah terjadi eksplorasi minyak dan ditemukan 196 titik pengeboran yang telah ditemukan. Berdasarkan dari pengumpulan data-pada akhir tahun 2011 menjelaskan bahwa Junggar Basin memberikan pasokan sebesar 71% dari total cadangan minyak yang ada di Xinjiang.

2. *Tarim Oilfield*

Wilayah Tarim berada di padang gurun bagian barat Xinjiang. Wilayah ini merupakan wilayah yang terkenal dengan kekayaan alamnya yaitu

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *World Energy Outlook*, 2019 <https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2019> (Diakses pada tanggal 9 Maret 2020 pukul 10:28)

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Li Yue, “*Current Status of and Trends in Oil Development in Xinjiang*”, *Center for Energy and Global Development*, 9 Nov 2006 http://www.wsichina.org/back4_07.html (Diakses pada tanggal 9 Maret 2020 pukul 10:39)

minyak dan gas, telah dibangun oleh pemerintah Tiongkok *Tarim Oil Exploration and Development Command* pada tahun 1989 dan terus mengalami perkembangan.⁵¹ Besar volume minyak di wilayah Tarim sebesar 8 miliar ton ditambah dengan gas alamnya yaitu sebesar 10 triliun meter kubik.⁵² Berkemungkinan besar masih ada potensi untuk bisa dijadikan pengembangan sumber daya gas alam di wilayah Tarim tersebut.⁵³ Di wilayah ini cadangan gasnya sebesar 284.030.000.000 meter kubik.⁵⁴ Setelah pencarian dilakukan dan berhasil menemukan 30 ladang minyak dan gas di Tarim kemudian Pemerintah Tiongkok mengklaim dimulai dari tahun 2006, ladang gas dan minyak di Tarim ini berhasil memproduksi 6 juta ton minyak mentah serta 5,67 miliar meter kubik gas alamnya.⁵⁵

3. Tuha Oilfield

Ladang minyak dibagian timur provinsi Xinjiang ini bernama Tuha *Oilfield* yang memiliki cadangan minyak hingga 157.500.000 ton, ditambah dengan cadangan gasnya sekitar sebesar 365 miliar meter kubik.⁵⁶

Dari penjelasan di atas maka terlihat bahwa Xinjiang *Oil Province* yang memiliki kekayaan alam gas dan minyak buminya terletak di wilayah Junggar Basin dan wilayah ini masuk kedalam teritori otonomi Xinjiang Utara yang mana wilayah ini merupakan wilayah asli tempat tinggal etnis Uighur. Menurut dari evaluasi sumber daya alam nasional Tiongkok, memberikan laporan bahwa total minyak dan cadangan gas di provinsi Xinjiang lebih dari 30 miliar ton dan pada setiap harinya Xinjiang menyumbang 14,4% atau 75.000 ton dari produksi minyak mentah di

⁵¹ *Petro China Company Limited, Petro China Tarim Oil field Company's Annual Crude Oil Output Exceeds 5 million Tons* <http://www.petrochina.com.cn/ptr/xwxx/201404/1b7cad2f6d8d43efb7314512c1757e4d.shtml> (Diakses pada tanggal 9 Maret 2020 pukul 11:03)

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Overview of CNPC Tarim Oil field Company* http://www.xjts.cn/xinjiang/content/2006-09/19/content_1185601.htm. (Diakses pada tanggal 9 Maret 2020 pukul 11:06)

⁵⁴ *Alexander Gas and Oil Connections, Petro China's Xinjiang gas field produces 60 bn cm of gas*, 21 oktober 2011 http://www.gasandoil.com/news/south_east_asia/995548d0daae3bd55a8b1af1cc25a9e8 (Diakses pada tanggal 9 Maret 2020 pukul 11:09)

⁵⁵ *Overview of CNPC Tarim Oilfield Company, op. cit.* (Diakses pada tanggal 9 Maret 2020 pukul 11:17)

⁵⁶ *Overview of CNPC Tarim Oilfield Company, op. cit.* (Diakses pada tanggal 9 Maret 2020 pukul 11:29)

Tiongkok.⁵⁷ Provinsi Xinjiang sendiri telah memiliki 318 perusahaan petrokimia yang termasuk kedalam perusahaan skala besar yang memiliki pendapatan brutonya sebesar RMB 271.270.000.000 yang mana nilai ini jika dipersentasekan berarti 50,8% diluar dari nilai *output* Xinjiang sendiri.⁵⁸ Keuntungan jika dihitung bersihnya sekitar RMB 57.030.000.000 yang didapatkan. Dari hasil yang telah ditemukan, provinsi Xinjiang sendiri memiliki 10 triliun meter kubik cadangan gas alamnya, jika dipersentasekan sebanyak seperempat dari total cadangan yang ada di Tiongkok. Hal ini telah membuktikan bahwa Xinjiang merupakan provinsi yang memiliki kekayaan sumber daya alam gas dan minyak yang masuk dalam kategori besar di Tiongkok. Hal inilah yang menjadikan provinsi Xinjiang sebagai provinsi pertama dari lahirnya *West-East Gas Transmission Project* yang dilahirkan oleh pemerintah Tiongkok.⁵⁹ Xinjiang merupakan provinsi penting karena memiliki kekayaan minyak dan gas alam yang melimpah. Sedangkan AS merupakan negara nomor satu sebagai konsumen migas di dunia.⁶⁰

Selain itu terdapat 53 perusahaan diberbagai bidang produksi milik AS yang berada di wilayah Xinjiang Tiongkok.⁶¹ Menurut *China File*, perusahaan-perusahaan milik AS diatas merupakan perusahaan-perusahaan *Fortune* 500 yaitu korporasi dengan pendapatan tertinggi di AS. Maka untuk mempertahankan perusahaan-perusahaan tersebut sekelompok bipartisan anggota parlemen AS mendorong Departemen Luar Negeri AS untuk memberikan sanksi terhadap pembuat kebijakan Tiongkok atas diksriminasi yang dilakukan kepada etnis Uighur dan yang bertanggung jawab di bawah Undang-Undang Magnitsky.⁶² Hal ini dilakukan AS untuk mempertahankan perusahaan-perusahaan milik negaranya agar tetap bertahan di wilayah Xinjiang dari pergusuran atau terjadinya pelebaran

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *China Mining.org, Xinjiang to become China's largest oil and gas base* <http://www.chinamining.org/News/2012-01-04/1325640213d53011.html>. (Diakses pada tanggal 9 Maret 2020 pukul 11:45)

⁵⁹ Chun Chun Ni, *China's Natural Gas Industry and Gas to Power Generation, The Institute of Energy Economics*, Japan, Juli 2007 <https://eneken.ieej.or.jp/en/data/pdf/397.pdf> (Diakses pada tanggal 9 Maret 2020 pukul 11:50)

⁶⁰ *U.S Energy Information Administration, What countries are the top producers and consumers of oil?* <https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=709&t=6> (Diakses pada tanggal 9 Maret 2020 pukul 11:52)

⁶¹ *China File.com, Here Are the Fortune 500 Companies Doing Business in Xinjiang*, 2 oktober 2018 <https://www.chinafile.com/reporting-opinion/features/here-are-fortune-500-companies-doing-business-xinjiang> (Diakses pada tanggal 28 Juni 2020 pukul 21:16)

⁶² *Ibid.*

pembangunan camp re-edukasi yang menjadi rencana pemerintah Tiongkok untuk menahan seluruh warga etnis Uighur di Xinjiang. Ketiga, yaitu terjadinya perang dagang antara AS dan Tiongkok untuk memenangkan perekonomian global. Perang dagang ini dipicu dari beberapa faktor yaitu AS yang sempat ikut mendukung gerakan warga Hongkong untuk melawan kebijakan pemerintah Tiongkok, yang mana hal ini memunculkan kemarahan pemerintah Tiongkok yang berdampak pada hubungan perdagangan antara kedua negara ini. Selanjutnya faktor keberpihakan AS terhadap etnis Uighur yang juga semakin menjadi alasan memanasnya hubungan antara kedua negara tersebut. Perang dagang dimulai sejak perusahaan-perusahaan di Xinjiang menggunakan tenaga dari pekerja paksa yang diambil dari camp re-edukasi yaitu warga dari etnis Uighur. Perusahaan-perusahaan yang memakai tenaga pekerja paksa tersebut yaitu Ikea, H&M, Volkswagen dan juga Siemens. Menanggapi hal ini AS melarang impor produk yang dibuat oleh perusahaan Xinjiang yang menggunakan tenaga kerja paksa dari etnis Uighur. Selanjutnya AS memasukkan 28 entitas Tiongkok ke *blacklist* negaranya, dan mengeluarkan pembatasan visa kepada pejabat penting Tiongkok.

Hal ini diikuti oleh dua perusahaan besar Australia yang mengumumkan bahwa negaranya mengakhiri kerja sama kemitraan dengan pemasok kapas di Xinjiang.⁶³ Merespon hal ini AS menerapkan prinsip-prinsip panduan PBB tentang Bisnis dan HAM yang menyerukan kepada pembisnis untuk mencegah dan mengurangi pelanggaran HAM yang bersifat aktual dan potensial terkait dengan praktik bisnis. Karena potensi pelanggaran HAM berat terjadi dalam melakukan bisnis di Xinjiang, banyak perusahaan asing yang mengakhiri kemitraan dengan Tiongkok. Pemerintah, organisasi dari Australia dan Uni Eropa bersama AS memberlakukan *blacklist global* tentang impor semua barang yang diproduksi atau memproduksi hasil di Xinjiang. Dengan didasari oleh Undang-undang *Magnitsky global*, AS, Kanada, Inggris, dan beberapa negara lain lebih mudah untuk menjatuhkan sanksi keuangan dan visa yang ditargetkan oleh pemerintah terhadap pejabat Tiongkok dan pemimpin perusahaan yang bertanggung jawab atas

⁶³ *The Guardian, It's time to boycott any company doing business in Xinjiang*, 26 Oktober 2019 <https://www.theguardian.com/world/2019/oct/27/its-time-to-boycott-any-company-doing-business-in-xinjiang> (Diakses pada tanggal 29 Juni 2020 pukul 10:42)

pelanggaran di Xinjiang.⁶⁴ Berbagai upaya AS dalam memerangi pemerintah Tiongkok dan membantu memerdekakan wilayah Xinjiang dan lepas dari Tiongkok lalu menjadikan Xinjiang sebagai sekutu AS dan AS akan lebih mudah untuk masuk dan mengatur atas eksploitasi minyak yang dimiliki oleh wilayah tersebut.

Kepentingan Ideologi

AS dan Tiongkok merupakan dua negara yang memiliki ideologi yang berbeda. Keduanya saling memperkuat dan melebarkan ideologi yang mereka anut, AS dengan paham liberalisme dan blok baratnya sedangkan Tiongkok dengan paham komunisme dan blok timurnya.⁶⁵ Kaum liberalis berpandangan bahwa cara untuk menghindari terjadinya perang dan mewujudkan perdamaian dunia dengan bekerja sama antar negara membentuk sebuah badan kolektif keamanan bersama.⁶⁶ Pada perkembangannya sendiri banyak pemikir yang melihat liberalisme cenderung kepada sebuah ideologi politik ekonomi dengan prinsip pentingnya sebuah kebebasan individu. Inti dari pemikiran Kant sebagai penteoris liberalisme adalah, dunia yang menghormati konstitusi, dan membangun perdamaian abadi di dunia, dan untuk mencapai perdamaian tersebut dibutuhkan demokrasi dari adanya hukum internasional dan pergerakan manusia. Kant sangat mengutamakan kebebasan individu dan mengklaim bahwa negara pada umumnya tidak memiliki otoritas melebihi yang dimiliki warga negaranya.

Selanjutnya ideologi Komunisme, Vladimir Ilyich Lenin sebagai tokoh komunisme dan pemimpin Partai Komunis Uni Soviet, merupakan orang yang paling berperan dalam merealisasikan teori-teori komunisme Karl Marx ke dalam tindakan nyata. Dia merupakan orang yang pertama kali mendirikan negara berdasarkan prinsip-prinsip komunisme, *Union of Soviet Socialist Republic*.⁶⁷ Komunisme ditandai dengan prinsip sama rata sama rasa dalam bidang ekonomi

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Center for Strategic International Studies, Are the United States and China in an Ideological Competition?*, 13 desember 2019, <https://www.csis.org/blogs/freeman-chair-blog/are-united-states-and-china-ideological-competition> (Diakses pada tanggal 9 Maret 2020 pukul 14:12)

⁶⁶ Jackson, Robert & Georg Sorensen. *Introduction to International Relations*. Oxford University Press, 1999. hlm 139-179 (Diakses pada tanggal 31 Oktober 2019 pukul 09:33)

⁶⁷ Karl Marx, “*Contribution to the Critique of Hegel’s Philosophy of Right*”, dalam David McLellan (Ed.), *Karl Marx Selected Writings*, Oxford: Oxford University Press, 2000, hlm 71-72.

dan sekularisme.⁶⁸ Namun dalam penerapan sistem politik komunisme, Lenin sebagai pendiri negara komunis pertama, lebih memaknai komunisme sebagai sebuah gerakan revolusi dan kepemimpinan negara di bawah kendali partai komunis oleh pemerintah pusat.⁶⁹ Ciri utamanya adalah sifatnya yang totalitarian, yang mana partai mengatur segala aspek kehidupan rakyatnya termasuk dalam beragama. Ditandai dengan Marx yang menggambarkan kebenciannya terhadap agama dalam ungkapannya yang terkenal, yaitu “*Religionis the opium of the masses*”.⁷⁰ Hal ini merupakan praktik tokoh-tokoh besar komunis seperti Lenin, dan Mao Zedong sebagai salah satu presiden Tiongkok dan tokoh besar komunis yang menerapkan ideologi komunisme di negaranya. Hingga saat ini diterapkan dan dialami oleh etnis Uighur di Tiongkok.

Jelas hal ini bertentangan dan berbeda dengan nilai-nilai ideologi liberalisme milik AS. Ideologi liberalisme dan komunisme sangat bertolak belakang. Ditambah lagi sejak *cold war* antara AS dan Uni Soviet berakhir pada tahun 1991 yang mana perang ini dikenal dengan perang ideologi antara kedua negara dan kini Tiongkok bersekutu dengan Rusia maka tentu merupakan lawan dan juga ancaman bagi AS, dengan melihat pertumbuhan Tiongkok diberbagai bidang yang berpotensi untuk menyaingi kedudukan AS sebagai negara yang dikenal dengan sebutan *super power*. Selain itu, sejak pemerintahan Mao Zedong pada tahun 1949 yang mengekspor revolusi komunis dan menggulingkan paham demokrasi yang berarti segala aturan di Tiongkok termasuk wilayah Xinjiang diatur oleh Partai Komunis Tiongkok.⁷¹ Hal tersebut berlangsung hingga pemerintahan Tiongkok saat ini yang dipimpin oleh Xi Jinping.

Tentu hal-hal ini memerangi nilai-nilai universal hingga pelanggaran HAM dan memudahkan rezim otoriter untuk berkembang di negara ini. Serta bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang menjadi dasar negara AS yang ditetapkan melalui Deklarasi Kemerdekaan tahun 1776, Konstitusi tahun 1787,

⁶⁸ Adam Kupper & Jessica Kuper (Eds.), *The Social Science Encyclopedia*, Vol. 1, New York: Routledge, 2004, hlm 137 (Diakses pada tanggal 14 April 2020 pukul 10:03)

⁶⁹ V.I. Lenin, *What is to be Done?*, Peking: Foreign Languages Press, 1973, hlm 122-188 (Diakses pada tanggal 14 April 2020 pukul 10:11)

⁷⁰ *Op.Cit.* Karl Marx, hlm 71-72.

⁷¹ *Encyclopaedia Britannica, Chinese Communist Party*, <https://www.britannica.com/topic/Chinese-Communist-Party> (Diakses pada tanggal 14 April 2020 pukul 13:03)

Makalah Federalis tahun 1788, *Bill of Rights* tahun (1791), dan *Gettysburg Address* karya Abraham Lincoln pada tahun 1863.⁷² Dari penjelasan kepentingan ideologi AS di atas jelas memperlihatkan posisi AS yang dikenal sebagai negara yang melahirkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM dan kebebasan demokrasi, yang secara aktif terus menerus memberikan kecaman dan komentar kepada pemerintah Tiongkok demi mempertahankan ideologi yang dianut negaranya. Perbedaan ideologi dan sistem pemerintahan diantara kedua negara AS dan Tiongkok yang sejak awal merupakan rivalitas abadi yang dikenal dengan blok barat-blok timur. Maka wajar jika hal ini menjadi salah satu alasan posisi AS kontra terhadap kebijakan pemerintah Tiongkok terhadap etnis Uighur.

Kepentingan Tata Internasional

Dalam kasus Uighur di Tiongkok ini, peran AS sebagai negara penjunjung tinggi nilai-nilai HAM dan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi tentu akan memiliki peran yang besar. Hal ini ditunjukkan dengan aktifnya AS pada sidang-sidang internasional yang membahas pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah Tiongkok atas kasus Uighur. Ditandai dengan dibukanya forum yang disponsori langsung oleh AS di markas PBB pada bulan maret 2019 di Jenewa, Swiss. Acara tersebut berfokus pada tuduhan-tuduhan pelanggaran HAM terhadap Muslim Uighur oleh pemerintah Tiongkok.⁷³

Pada sidang ini, AS mendesak dan mengomentari negara-negara yang bermayoritas Muslim, Persatuan Ulama Internasional untuk memberikan perhatian khusus akan pelanggaran dan ketidakadilan yang dirasakan Muslim di Tiongkok, dan menegaskan penolakan serta kecaman, juga memperingatkan akan adanya konsekuensi buruk, karena mengingat dan memperhatikan hubungan baik dan relasi antara Tiongkok dan dunia Islam. Kedua menyerukan kepada pemerintah Tiongkok untuk menghormati semua hak-hak agama dan sosial serta kebebasan minoritas Muslim, melalui pembebasan para tahanan paksa dari *camp-camp* massal, menjamin kebebasan beragama untuk semua dan pelaksanaan seluruh hak

⁷² *Our Document Gov*, <https://www.ourdocuments.gov/content.php?flash=true&page=vote> (Diakses pada tanggal 15 April 2020 pukul 09:11)

⁷³ *Human Rights Watch, UN: Rights Body Needs to Step Upon Xinjiang Abuses*, 12 maret 2020 <https://www.hrw.org/news/2020/03/12/un-rights-body-needs-step-xinjiang-abuses> (Diakses pada tanggal 15 April 2020 pukul 09:27)

beragama, termasuk membangun masjid dan pengajaran agama untuk individu maupun kelompok. Ketiga, menyerukan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan negara-negara Islam terutama Turki yang mana warganya diduga dibunuh di dalam camp re-edukasi, serta negara-negara di dunia untuk memberikan perhatian serius atas hal ini agar mengetahui fakta dan perkembangannya serta tidak menganggap remeh dan menindaklanjuti kepada pihak pemerintah Tiongkok.⁷⁴ Pada awalnya Turki sempat bungkam atas kasus seniman dan juga penyair bernama Abdurehim Heyit yang berkebudayaan Turki yang ditangkap pada tahun 2017 dan dihukum di penjara untuk hukuman 8 tahun kemudian diberitakan wafat di dalam penjara Tiongkok oleh media-media internasional. Hal tersebut akhirnya membuat Turki mengecam keras pemerintah Tiongkok. Turki merupakan negara penting dalam proyek besar *One Belt One Road* (OBOR), hal itu yang mendorong Turki untuk bersikap mengecam keras atas keseriusan masalah HAM berat yang menimpa Muslim Uighur di Xinjiang Tiongkok. Menanggapi hal ini banyak negara-negara barat yang ikut mengecam dan menekan pemerintah Tiongkok untuk sepenuhnya mengungkapkan situasi camp re-dukasi itu.⁷⁵

Dilanjutkan pada juli 2019, AS memimpin lebih dari 30 negara yang ikut serta dalam acara sela pertemuan tahunan para pemimpin dunia yang mana acara tersebut berfokus pada pembahasan sekaligus kritikan perihal “Kampanye Penindasan yang Mengerikan Terhadap Muslim di Xinjiang”.⁷⁶ Pada acara ini sekelompok negara dari sebagian besar Eropa dan tidak ada negara mayoritas Muslim menandatangani surat kepada kepala hak asasi manusia PBB yang mengutuk tindakan Tiongkok terhadap kasus etnis Uighur. Dukungan dari negara-negara eropa ini di dukung karena adanya pernyataan dari pakar Xinjiang yang berbasis di Jerman yang bernama Adrian Zenz menemukan bahwa pengeluaran konstruksi untuk fasilitas terkait keamanan di Xinjiang meningkat sebesar 20 miliar yuan atau sekitar US\$ 2,96 miliar pada tahun 2017. Anggaran ini dikeluarkan untuk

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Reuters, *U.S. leads condemnation of China for 'horrific' repression of Muslims, 25 September 2019* <https://www.reuters.com/article/us-usa-china-un-xinjiang/u-s-leads-condemnation-of-china-for-horrific-repression-of-muslims-idUSKBN1W92PX> (Diakses pada tanggal 15 April 2020 pukul 11:16)

memperluas dan menyebarkan camp-camp re-edukasi untuk korban-korban Uighur dan otomatis penahanan massal semakin meningkat.

Namun adanya surat balasan dari lebih 30 negara rata-rata bermayoritas Muslim, termasuk Pakistan dan Arab Saudi, yang ikut menandatangani surat yang berisikan memuji prestasi luar biasa Tiongkok dalam hak asasi manusia dan upaya "kontraterorisme" di Xinjiang.⁷⁷ Diamnya negara-negara Muslim dianggap lebih memprioritaskan ikatan ekonomi dan hubungan strategis mereka dengan Tiongkok, sehingga banyak pemimpin negara yang mengabaikan pelanggaran HAM. Upaya-upaya yang dilakukan AS di bawah kepemimpinan Donald Trump melalui slogan negaranya yaitu "*Make American Great Again*" dan "*American First*" merupakan strategis dan kunci utama dalam kebijakan luar negeri AS menanggapi isu-isu global. Diantara banyaknya kebijakan tersebut yang menjadi prioritas Donald Trump tentu adalah kepentingan nasional negaranya. Bagi Trump, AS harus mendapatkan penghormatan dengan menunjukkan dominasi total atas semua negara. Dalam upaya untuk melakukan dominasi tersebut, AS harus mengutamakan kepentingan dengan membangun kekuatan dan kemampuan negara untuk bertindak dalam politik internasional, termasuk dalam kontribusi aktifnya diberbagai isu-isu global dunia termasuk konflik Uighur ini, yang mana hal ini juga berkaitan dengan ideologi negaranya dan upayanya dalam mempertahankan lebel *super power* selama ini. Maka peran AS yang menjadi pemimpin untuk selalu menyuarakan dan membahas pelanggaran-pelanggaran HAM di konflik Uighur Tiongkok merupakan kepentingan tata internasional yang selalu menjaga eksistensi negaranya.

Kepentingan Pertahanan Keamanan

Kepentingan nasional AS pada bidang pertahanan dan keamanan ini memiliki kaitan dengan tiga kepentingan yang telah dijelaskan sebelumnya. Dari berbagai kepentingan AS dibidang-bidang tersebut tujuannya hanyalah AS tidak ingin label *super power* yang sejak dulu disematkan pada negaranya harus hilang dan digantikan oleh negara Tiongkok. Adanya hubungan kerjasama yang telah dilakukan Tiongkok dengan negara-negara tetangganya, dan letak wilayah Xinjiang

⁷⁷ *Council on Foreign Relations, China's Repression of Uighurs in Xinjiang*, 25 november 2019 <https://www.cfr.org/backgrounders/chinas-repression-uighurs-xinjiang> (Diakses pada tanggal 15 April 2020 pukul 11:19)

yang berbatasan dengan negara-negara penting, juga termasuk kawasan strategis maka hal yang tepat bagi AS untuk menjadikan kawasan tersebut menjadi pangkalan militer AS yaitu *North Atlantic Treaty Organization* atau (NATO).

Melalui perluasan pangkalan militer di Uighur Tiongkok, AS dapat mengawasi pertumbuhan kekuatan dan pengaruh Tiongkok yang semakin berjalannya waktu dinilai Tiongkok dapat menjadi lawan besar AS. Melihat hubungan AS dengan negara-negara tetangga disekitar yang berdekatan dengan wilayah Xinjiang seperti Afghanistan yang hingga saat ini masih memiliki ketegangan hubungan dengan AS. Hal ini dapat memudahkan AS untuk bisa mengirim pasokan senjata ke wilayah Afghanistan bagi pasukan keamanan AS. NATO sengaja memperluas pangkalan militernya ke negara-negara bekas Uni Soviet dan wilayah Asia Tengah karena dianggap hal ini akan lebih mempermudah tujuan AS yang mana ingin menduduki wilayah Xinjiang, karena yang kita ketahui wilayah Xinjiang merupakan wilayah yang sangat strategis karena berdekatan langsung dengan negara-negara tetangga dengan hasil kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan juga kebanyakan dari negara-negara yang berdekatan dengan Xinjiang merupakan negara-negara yang dulunya merupakan sekutu dari lawan AS yaitu Uni Soviet dan kemudian negara-negara tersebut saat ini telah bergabung dengan *Commonwealth of Independent States* atau (CIS) yang mana organisasi ini dipimpin langsung oleh Tiongkok.

Tujuan AS untuk bisa masuk dan menguasai wilayah-wilayah tersebut karena tentu kepentingan pertahanan keamanan negaranya untuk bisa lebih mudah menyuplai bahan-bahan logistik dan peralatan-peralatan perang di Afghanistan. Melalui langkah inilah AS melihat upaya penting dengan adanya jalur dan akses langsung yang mudah yang berbatasan langsung dengan negara Afghanistan. AS dapat dengan mudah mengawasi negara tersebut. Kawasan Asia Tengah di pandang AS sebagai lokasi yang sangat strategis dan bersifat memberikan keuntungan yang meluas, dikarenakan AS dapat dengan mudah melemahkan pengaruh besar yang diberikan Rusia selama ini di negara-negara bekas jajahan tersebut, serta mendominasi peran untuk mencapai segala kepentingan nasional AS yaitu ekonomi, kepentingan strategis yang telah dijelaskan diawal.

Alasan lain jika negaranya berhasil memperluas pangkalan militer NATO dan menguasai wilayah di Xinjiang adalah untuk melakukan pencegahan terjadinya peluang besar yang dilakukan antara Tiongkok dan Rusia yaitu kerja sama dalam beraliansi di bidang militer antara kedua negara ini. Karena jika dilihat adanya beberapa faktor yang memungkinkan hal ini terjadi karena pertama kedekatan geografis, kedua persamaan sejarah ideologi selain itu dengan adanya organisasi *Commonwealth of Independent States* atau (CIS) yang lebih mempererat hubungan antara negara-negara sekutunya dan ketiga kemungkinan negara-negara ini akan beraliansi untuk bisa mengalahkan dominasi yang selama ini dikuasai oleh blok barat dan melihat bahwa negara-negara barat merupakan musuh abadi negara-negaranya. Banyaknya kemungkinan dari didirikannya kerja sama kedua negara tersebut, dinilai AS merupakan upaya Tiongkok dan Rusia untuk bisa memperluas hegemoni negaranya di kawasan Asia, yang mana jika SCO berhasil menguasai wilayah-wilayah di benua Asia dengan mengandalkan perekonomian Tiongkok yang saat ini sedang berkembang pesat dengan upaya pemberian bantuan-bantuan kepada negara-negara berkembang yang kemudian negara berkembang itu otomatis akan menjadi sekutu Tiongkok. Selanjutnya dengan didirikannya organisasi Internasional SCO beranggotakan negara-negara Asia Tengah yang umumnya dari negara-negara tersebut merupakan penghasil kekayaan energi yang besar dan kerja sama energi juga termasuk upaya mempererat hubungan antara anggota di dalamnya maka hal ini merupakan ancaman besar terkait keamanan energi yang didapatkan oleh AS. Hal inilah yang menjadikan AS melihat bahwa dengan hadirnya SCO merupakan ancaman besar yang tidak bisa dianggap remeh.

Kepentingan Strategis

Pada bagian kepentingan bidang strategis ini menunjukkan bahwa AS di Xinjiang tidak hanya sebatas ekspansi dan eksploitasi minyak, gas dan sumber alam lainnya di wilayah tersebut. Tetapi juga karena adanya ketakutan AS akan hubungan geopolitik yang mungkin terjalin antara Rusia dan negara-negara Asia Tengah yang mana kebanyakan dari negara-negara tersebut bergabung dan bekerja sama dengan Tiongkok, melalui proyek jalur pipa minyak dan gas yang

menghubungkan negara-negara tersebut dengan Tiongkok yang dihubungkan oleh Xinjiang. Cara yang mungkin ditempuh AS untuk menghalangi hal tersebut adalah dengan memutus jalur pipa minyak dan gas dengan membantu Uighur untuk merdeka dari Tiongkok dan menjadikannya sekutu AS.

Melihat adanya kerja sama antara Kazakhstan dan Tiongkok inilah yang menjadi salah satu faktor tujuan kepentingan AS di bidang strategis. Hal ini diperkuat pendapat dari Badan Informasi Energi Pemerintah AS, kekayaan hasil bumi seperti energi ladang minyak yang dimiliki Kazakhstan dibagian Kashgan merupakan ladang minyak terbesar terlepas menghitung keberadaan Timur Tengah, dan juga merupakan ladang minyak dengan urutan lima terbesar yang ada diseluruh dunia.⁷⁸ Kerja sama rute pipa minyak dan gas ini telah dibangun oleh pemerintah Tiongkok sepanjang 613mil dan berproses melalui 3 fase pembangunan yaitu pertama dari kota Atasu yang berada dibagian barat Kazakhstan, kedua dilanjutkan sampai ke kota Alashankou dan ketiga hingga terbentang luas hingga ke wilayah Xinjiang, yang mana hal ini bertujuan untuk jalur tersebut dapat menjadi rute untuk dilakukannya pengeksporan minyak dari Kaspia ke negara Tiongkok.⁷⁹ Ini merupakan kerja sama *China National Petroleum Corporation* atau (CNPC) yang mana ini adalah perusahaan minyak dan gas terbesar yang dimiliki Tiongkok.⁸⁰ Kerja sama antara CNPC dan Kaztrans oil berinvestasi dengan biaya lebih dari US\$ 2 Miliar dengan pengembangan kerja sama untuk adanya pembangunan rute pipa gas dari Turkmenistan yang melewati Uzbekistan dan Kazakhstan hingga sampai dititik wilayah Tiongkok.⁸¹ Selain dari pada kerja sama Tiongkok dengan negara-negara di kawasan Asia Tengah, Tiongkok telah melakukan pembahasan dengan Rusia perihal membahas kerja sama yang akan dijalankan terkait rute pipa utama gas alam yang rencananya akan dibangun rute dari Siberia Timur yang kemudian melewati wilayah Xinjiang.⁸²

⁷⁸ *Energy Information Administration, Kazakhstan* https://www.eia.gov/international/content/analysis/countries_long/Kazakhstan/background.htm (Diakses pada tanggal 18 April 2020 pukul 14:12)

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *China National Petroleum Corporation, Xinjiang Oil Province* <https://www.cnpc.com.cn/en/operatediol/201405/2a55baf2e8a9420187880810fe91728f.shtml> (Diakses pada tanggal 18 April 2020 pukul 14:22)

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*

Hal ini dilakukan Tiongkok karena melihat hasil kekayaan alam yang dimiliki di wilayah Siberia Timur yang memiliki sekitar 135 kubik minyak dan ini akan masih terus bertambah dengan adanya cadangan gas alam yang dimilikinya. Selain itu wilayah Siberia Timur yang melintasi Rusia juga merupakan alasan penting dari terjalinnya kerja sama yang sebelumnya telah dilakukan Tiongkok dengan Rusia diberbagai bidang kepentingan. Termasuk dengan ambisi besar Tiongkok untuk merevitalisasi kembali Jalur Sutranya (*Silk Road*) melalui *Belt and Road Initiatives* (BRI) dengan membuka konektivitas multilateral diberbagai negara dan kawasan dalam hal ini melibatakan negara-negara Asia Tengah. Berbagai kerja sama yang dilakukan antara Tiongkok dengan negara-negara Asia Tengah dan juga Rusia ini merupakan hubungan kerja sama geopolitik yang tentu berpeluang besar dan menjadi ancaman serta ketakutan bagi AS, melihat latar belakang kesamaan sejarah dan ideologi antara Rusia dan Tiongkok.

Hal inilah yang dinilai AS bahwa lokasi strategis yang dimiliki oleh Tiongkok banyak memunculkan peluang besar bagi negaranya, selain itu juga melihat letak dan hubungan geopolitik antara negara-negara yang berdekatan dengan Tiongkok dan terjalinnya kerja sama antara Rusia yang mana negara yang sama-sama menganut paham ideologi dengan Tiongkok. Selanjutnya, negara-negara yang ada di kawasan Asia Tengah juga merupakan anggota dari organisasi *Commonwealth of Independent States* atau (CIS) karena keterkaitan proyek rute pipa minyak dan gas yang mana proyek ini otomatis menghubungkan negara-negara yang bersangkutan terhadap terjalinnya kerja sama tersebut melalui wilayah dan rute yang kebetulan disambungkan dari wilayah Xinjiang. Xinjiang yang berlokasi strategis yang berdekatan dengan negara-negara Asia Tengah tentu akan memudahkan AS untuk memperluas pengaruhnya di Asia Tengah melalui rute darat utama Eropa dan Asia yang mana negara-negara tersebut dipenuhi dengan cadangan minyak dan gas yang besar untuk dapat dijadikan AS sebagai penyeimbang terhadap persaingan global dengan Tiongkok dan juga Rusia.

Berdasarkan dari penjelasan yang telah dipaparkan di atas, AS memiliki lima kepentingan-kepentingan nasional negaranya dan dari kelima kepentingan tersebut yang paling menjadi alasan kuat adalah kepentingan ideologi yang mana Leninisme memberikan pemahaman kediktatoran yang dipimpin oleh satu partai

yang memiliki akses ilmiah yang menjanjikan untuk mengubah negara-negara dari yang terbelakang menjadi negara yang modern yang berada digaris depan. Hal ini dibuktikan dengan Tiongkok dibawah pemerintahan Xi Jinping yang membawa negara Tiongkok saat ini menjadi negara kuat nomor dua di bawah AS. Hal ini juga membuktikan bahwa sosialisme secara internasional memberikan Tiongkok pada tempat kepemimpinan karena telah menemukan rute alternatif dalam bersaing dengan negara barat dalam hal ini AS untuk menuju modernitas dan pembangunan negara dimata global. Pencapaian tersebut memiliki tujuan untuk menjadikan Tiongkok sebagai pemimpin global berdasarkan dari pencapaian sistem ideologinya. Sistem satu partai yang dianut oleh Tiongkok telah terbukti dari waktu ke waktu sangat dapat beradaptasi dengan perubahan zaman. Hal ini disampaikan oleh pepatah Tiongkok kuno, yaitu : “Orang-orang itu seperti air, penguasa adalah sebuah kapal diatas air itu. Air dapat membawa kapal; air dapat membalikkan kapal. Saat ini, negara-bangsa telah menggantikan kerajaan dan kerajaan. Dalam analogi ini, air tetaplh orang-orang. Akan tetapi, kapal itu tidak lagi hanya seorang kaisar dan dinastinya, tetapi sistem politik yang lebih besar dan jauh lebih canggih yang merupakan negara-bangsa modern”.⁸³

Ideologi komunis ini berhasil mengubah sifat tatanan global karena adanya *United Front Work Department* yang mana hal ini disampaikan langsung oleh Toshi Yoshihara yaitu Senior Fellow, *Center for Strategic and Budgetary Assesment* bahwa *United Front Work Department* adalah organ dari partai yang dirancang untuk menjaga dan mempertahankan kekuasaan Partai Komunis Tiongkok. Misinya adalah untuk menarik institusi non partai di dalam maupun diluar Tiongkok dan membawanya sejalan dengan partai Komunis Tiongkok.⁸⁴ Pentingnya bersatu bagi kader partai dan juga publik merupakan salah satu alasan utama mengaktifkan kembali *United Front Work Department* dari nilai-nilai Partai Komunis terhadap sistem kelas di Tiongkok. *United Front Work Department*

⁸³ *The Christian Science Monitor*, *China's political system is more flexible than US democracy*, 17 oktober 2011 <https://www.csmonitor.com/Commentary/Global-Viewpoint/2011/1017/China-s-political-system-is-more-flexible-than-US-democracy> (Diakses pada tanggal 29 Juni 2020 pukul 14:58)

⁸⁴ *Center for Strategic and International Studies*, *Are the United States and China in an Ideological Competition?*, 13 Desember 2019 <https://www.csis.org/blogs/freeman-chair-blog/are-united-states-and-china-ideological-competition> (Diakses pada tanggal 29 Juni 2020 pukul 19:17)

memberikan pelajaran tentang Uni Soviet sebagai kisah dari alasan keruntuhan ideologi komunis. Ketika Partai Komunis Uni Soviet gagal menanamkan kepatuhan terhadap doktrin ideologis, orang-orang kehilangan kepercayaan pada sistem, dan menjadi alasan keruntuhan ideologi komunis saat itu. Partai Komunis Tiongkok telah mengadopsi cara-cara ofensif untuk mencapai tujuan defensif strategisnya.⁸⁵

Maka hal ini merupakan tantangan bagi negara barat terutama AS yang mana lawan dari ideologi komunis yaitu liberalisme dalam kebangkitan ideologi komunis yang semakin berkembang tidak hanya di wilayah Asia Timur namun juga semakin berjalan menyebar keberbagai wilayah di dunia seperti Asia Tengah, dan Asia Tenggara. Maka hal inilah menurut penulis yang menjadi kepentingan nasional terpenting AS dalam menanggapi kasus Uighur di Tiongkok dan berada pada barisan pro terhadap warga etnis Uighur saat ini.

Kesimpulan

Berdasarkan dari teori konsep yang digunakan untuk dapat melihat alasan perubahan kebijakan luar negeri GWOT AS terhadap konflik Uighur di Tiongkok, maka dapat disimpulkan bahwa AS memiliki kepentingan nasional di berbagai bidang seperti ekonomi, kepentingan ideologi, kepentingan tata internasional, kepentingan pertahanan keamanan dan kepentingan strategis negaranya. Letak Xinjiang sangat strategis dan berbatasan langsung dengan delapan negara dengan kepentingan berbeda-beda yang dituju AS, namun dari lima kepentingan tersebut kepentingan ideologi yang menjadi kepentingan nasional paling penting yang menjadi dasar perubahan kebijakan luar negeri *Global War on Terror* AS terhadap kasus ini. Awalnya AS di bawah kepemimpinan presiden George W Bush berada pada barisan pro terhadap pemerintah Tiongkok yang menyatakan etnis Uighur Islam merupakan jaringan teroris internasional, pada masa kepemimpinan Barack Obama, *Turkistan Islamic Movement* atau (ETIM) tetap dianggap sebagai kelompok teroris internasional namun pada eranya berfokus pada perbaikan citra AS atas kerasnya terhadap Islam dan melepas label teroris dengan agama Islam, dan kini AS di bawah kepemimpinan Donald Trump berubah menjadi kontra terhadap pernyataan pemerintah Tiongkok.

⁸⁵ *Ibid.*

Perubahan kebijakan luar negeri *Global War on Terror* pada masa pemerintahan Trump ini merupakan upaya AS untuk dapat intervensi terhadap isu Uighur di Tiongkok dan jembatan untuk masuknya negara tersebut ke wilayah Xinjiang, yang mana kita ketahui AS merupakan negara yang melahirkan HAM dan menjunjung tinggi nilai HAM, hal ini upaya AS untuk dapat menjadi negara penengah atas konflik yang terjadi. Upaya lainnya untuk memantau dan menghalangi pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang diperkirakan saat ini menjadi pesaing besar negaranya. Upaya-upaya kebijakan luar negerinya, AS aktif melakukan forum pembahasan atas pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah Tiongkok terhadap etnis Uighur, contohnya dengan melahirkan UU HAM Uighur yaitu *Uyghur Human Rights Policy Act of 2019*, yang tujuannya agar pemerintah AS dapat mengawasi dan memberik sanksi kepada pemerintah Tiongkok atas diskriminasi yang dilakukan terhadap etnis Uighur. Upaya kebijakan luar negeri AS lainnya, dengan dibukanya forum yang disponsori langsung oleh AS di markas besar PBB di Jenewa Swiss yang mana sidang forum tersebut berfokus kepada tuduhan-tuduhan pelanggaran HAM terhadap Muslim Uighur oleh pemerintah Tiongkok. Hal ini disampaikan langsung oleh Duta Besar sementara AS untuk PBB, bernama Kelley Currie yang juga memimipin Kantor Keadilan Global pada Departemen Luar Negeri AS.⁸⁶

Perubahan-perubahan kebijakan luar negeri *Global War on Terror* AS yang berawal dari pro ke kontra inilah merupakan bukti bahwa negara akan mendahulukan kepentingan nasionalnya dan bisa melanggar kebijakan negaranya sendiri demi memenuhi keinginan untuk menjadi penguasa dan mempertahankan *power* negaranya. Terlepas dari itu semua program penahanan masal berskala besar yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok, pelecehan sistematis dan kurangnya informasi yang diberikan oleh pemerintah Tiongkok terhadap dunia internasional serta terjadinya pembatasan informasi yang bisa diperoleh oleh dunia global terkait penahanan masal di camp-reedukasi tersebut mengenai nasib para tahanan di Xinjiang merupakan kejahatan kemanusiaan yang telah dilakukan oleh pemerintah Tiongkok. Hal ini berkaitan dengan Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasioanl

⁸⁶ AS Serukan Negara Muslim Kompak Mengecam China Terkait Xinjiang, 14 maret 2019, Jenewa <https://news.detik.com/internasional/d-4467369/as-serukan-negara-muslim-kompak-mengecam-china-terkait-xinjiang>

yang mana bersinggungan dengan penjara dan perampasan atas kebebasan fisik, penyiksaan, dan penghilangan orang secara paksa merupakan pelanggaran aturan dasar hukum internasional. Selain itu penganiyaan atas dasar agama dan budaya juga termasuk kedalam kejahatan kemanusiaan yang mana merupakan perampasan hak-hak fundamental yang disengaja dan bertentangan dengan hukum internasional.⁸⁷ Maka terlepas dari intervensi yang diupayakan oleh AS, pemerintah Tiongkok tetap telah melakukan pelanggaran HAM berat.

Saran

Upaya-upaya yang dilakukan AS terhadap konflik Uighur belum juga memberikan dampak mereda dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok. Dari hasil kesimpulan diatas maka penulis memberi saran untuk aktor-aktor internasional mulai dari negara-negara terutama negara-negara Islam, organisasi internasional, dan media internasional untuk bisa kompak dalam menuntut hukuman atas hal yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok terhadap etnis Uighur dan keterbukaan informasi keadaan atas camp re-edukasi yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok terhadap korban-korban tahanan. Sehingga pelanggaran HAM yang dilakukan secara masif oleh pemerintah Tiongkok dapat terselesaikan dan berhenti. Selain itu permasalahan dunia global dapat berkurang sedikit demi sedikit. Berikutnya AS untuk waktu yang akan datang harus tegas dengan sikap kebijakan luar negeri *Global War on Terror* negaranya sendiri agar tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan baru di waktu yang akan datang akibat ketidak konsistenan sikap negaranya.

Penulis berharap agar penelitian ini dapat menjadi rujukan bahan pembelajaran terkait dengan analisis kepentingan nasional dan kebijakan luar negeri *Global War on Terror* suatu negara dalam menanggapi isu dan konflik internasional. Hal ini merupakan hal yang penting untuk diketahui untuk dapat melihat tindakan yang diambil oleh suatu negara dalam memberikan respon atas kebijakan luar negeri negaranya dan aktif dalam hubungan internasional yang terjadi.

⁸⁷ *International Criminal Court, Rome Statute of the International Criminal Court, part 2 article 7* <https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/283503/RomeStatutEng1.pdf> (Diakses pada tanggal 18 Mei 2020, pukul 13:02)

Daftar Pustaka

Buku:

- Creswell, John W. 2009. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. US: SAGE Publications.
- Donald E. Nuechterlein. 1976. *National Interest and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision Making*.
- Hans J. Morgenthau 1985. *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace, 6th ed.* New York: Alfred A. Knopf
- Holsti. K.J. 1987. *Politik Internasional: Kerangka Analisa*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- J. Todd Reed and Diana Raschke. 2010. *The ETIM: China's Islamic Militants and the Global Terrorist Threat. PSI Guides to Terrorists, Insurgents, and Armed Groups, James J. F. Forest Series Editor*.
- Joseph S. Nye. 2007. *Understanding International Conflicts: An Introduction to Theory and History*.
- Lloyd Jensen. 1982. *Explaining Foreign Policy*. New Jersey, Prentice Hall, Inc, Englewood Cliffs
- Martin Griffiths, 1999, *Fifty Key Thinkers In International Relations*, Routledge , London and New York
- Robert Jackson & Georg Sorensen. 1999 *Introduction to International Relations*. Oxford University Press
- Schuman, Frederick L. 1941. *International Politics: The Western State System in Transition* New York: The Free Press

Jurnal :

- Aditya Wicaksono. 2017. *Pembatasan Imigran Muslim di Amerika Serikat*. Surakarta: IAIN
- Chun Chun Ni, 2007, *China's Natural Gas Industry and Gas to Power Generation* The Institute of Energy Economics, Japan
- J.L. Holzgrefe dan Robert O. Keohan, *Humanitarian Intervention: Ethical, Legal, and Political Dilemmas*. Cambridge: Cambridge University Press
- James M. McCormick, 2011, *The Obama Presidency: A Foreign Policy of Change?*, IOWA State University
- Joseph P. Nye, 2009 "Get Smart-Combining Hard and Soft Power" *Foreign Affairs*

Sumber Online :

- Aljazeera.com, *China warns US criticism on Uighurs not 'helpful' for trade talks*
<https://www.aljazeera.com/news/2019/10/china-warns-criticism-uighurs-helpful-trade-talks-191030005757892.html>

- Barack Obama, *President of the United States of America, Change We Can Believe In*, *supranote* <https://www.history.com/topics/us-presidents/barack-obama>
- BCC News, Indonesia. Mengapa Trump larang warga tujuh negara masuk ke Amerika Serikat. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-38808189>
- BBC News, *What is defence alliance Nato?* <https://www.bbc.com/news/world-europe-18023383>
- Bloomberg View, *US Needs China More Than China Needs The US* <https://www.industryweek.com/the-economy/article/22025438/us-needs-china-more-than-china-needs-the-us>.
- Center for Energy and Global Development, Current Status of and Trends in Oil Development in Xinjiang* http://www.wsichina.org/back4_07.html
- Center for Strategic and International Studies, America's Failed Strategy in the Middle East: Losing Iraq and the Gulf* <https://www.csis.org/analysis/americas-failed-strategy-middle-east-losing-iraq-and-gulf>
- China Daily.com, Xinjiang rides high on Belt and Road Initiative* <http://www.chinadaily.com.cn/a/201808/08/WS5b6a649ba310add14f384a0c.html>
- China File.com, Here Are the Fortune 500 Companies Doing Business in Xinjiang* <https://www.chinafile.com/reporting-opinion/features/here-are-fortune-500-companies-doing-business-xinjiang>
- China Law Translate.com, Xinjiang Uyghur Autonomous Region Regulation on De-extremification* <https://www.chinalawtranslate.com>
- China Mike, China Province Map.* <https://www.china-mike.com/china-travel-tips/tourist-maps/china-provinces-map/>
- China Mining News, Xinjiang to become China's largest oil and gas base* <http://www.chinamining.org/News/2012-01-04/1325640213d53011.html>.
- China National Petroleum Corporation, Over view of CNPC Tarim Oilfield Company*, op. cit. <http://www.cnpc.com.cn/en/?COLLCC=53783154&>
- China National Petroleum Corporation, Annual Report, 2012* <https://www.cnpc.com.cn/en/2012en/201407/2508137dc2ea44ffa32c3b4bb2094bc1/files/c7c5d4c3247a48f098f41615415d93f5.pdf>
- China National Petroleum Corporation, Xinjiang Oil Province* http://www.cnpc.com.cn/en/aboutcnpc/ourbusinesses/explorationproduction/operatedi ol/Xinjiang_Oil_Province.htm.
- China Tourist Maps, China: Fuels, Power, Minerals and Metals.* <http://www.chinatouristmaps.com/china-maps/maps-of-resources.html>
- China Tourist Maps, China Maps of Resources.* <http://www.chinatouristmaps.com/china-maps/maps-of-resources.html>
- Combating Terrorisme Center, The "Seventh Stage" Of Terrorism in China: Yan hao Geng Ruibinand Yuan Ye Xinjiang Riot Hit Regional Anti Terror* <https://ctc.usma.edu/the-seventh-stage-of-terrorism-in-china/>

- Congress.Gov, S.178 - Uyghur Human Rights Policy Act of 2019*, <https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/178>
- Congressional Research Service, China-US Trade Issues* <https://fas.org/sgp/crs/row/RL33536.pdf>
- Congressional Research Service, China's Economic Rise: History, Trends, Challenges, and Implications for the United States* <https://fas.org/sgp/crs/row/RL33534.pdf>
- CNN News, Leaked Chinese Government Records Reveal Detailed Surveillance Reports on Uyghur Families and Beijing's Justification of Mass Detentions* <https://edition.cnn.com/interactive/2020/02/asia/xinjiang-china-karakax-document-intl-hnk/>
- Detik News, AS Serukan Negara Muslim Kompak Mengecam China Terkait Xinjiang* <https://news.detik.com/internasional/d-4467369/as-serukan-negara-muslim-kompak-mengecam-china-terkait-xinjiang>
- Encyclopaedia Britannica, Chinese Communist Party*, <https://www.britannica.com/topic/Chinese-Communist-Party>
- Frank R Wolf. "HR 1685 - 105 Congress (1997-1998): Freedom From Religious Persecution Act of 1997, 8 Oktober 1997* www.congress.gov
- Foreign Policy.com, China Is ViolatingUighurs' Human Rights. The United States Must Act.* <https://foreignpolicy.com/2018/11/28/china-is-violating-uighurs-human-rights-the-united-states-must-act/>
- Gas and Oil Connections, Petro China's Xinjiang gas field produces 60 bn cm of gas* http://www.gasandoil.com/news/south_east_asia/995548d0daae3bd55a8b1af1cc25a9e8
- Geological Characteristics and Resources Evaluation of Oil and Gas in Xinjiang, China, Urumuqi: Xinjiang Science, Technology and Health Publishing House* <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876380408600270>
- George W. Bush: Foreign Affairs* <http://militercenter.org/president/biography/gwbush-foreign-affairs>
- Human Rights Education Project, The Right to Freedom of Expression and Religion,* <http://www.humanrights.is/en/human-rights-education-project/human-rights-concepts-ideas-and-fora/substantive-human-rights/the-right-to-freedom-of-expression-and-religion>
- Human Rights First, The Global Magnitsky Act Frequently Asked Questions* <https://www.humanrightsfirst.org/sites/default/files/hrf-global-magnitsky-faq.pdf>
- Human Rights Watch, UN: Rights Body Needs to Step Upon Xinjiang Abuses* <https://www.hrw.org/news/2020/03/12/un-rights-body-needs-step-xinjiang-abuses>
- Hydrocarbons Technology, Feature Worlds Longest Oil Gas Pipelines Imports* <https://www.hydrocarbons-technology.com/features/featureworlds-longest>

-oil-gas-pipelines-imports/attachment/featureworlds-longest-oil-gas-pipelines-imports-5/

International Criminal Court, Rome Statute of the International Criminal Court, part 2 article 7 <https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/283503/RomeStatutEng1.pdf>

International Consortium of Investigative Journalists, China Cables: Who Are The Uighurs and Why Mass Detention?. <https://www.icij.org/investigations/china-cables/china-cables-who-are-the-uighurs-and-why-mass-detention/>

National Commission on Terrorist Attack Up on the United States. 2004. "The Attack Looms", 9/11 Commission Report. <http://www.9-11commission.gov/report/index.htm>

NewYork Times, US Weighs Sanctions Againsts Chinese Officials Over Muslim Detention Camps. <https://www.nytimes.com/2018/09/10/world/asia/us-china-sanctions-muslim-camps.html>

North Atlantic Treaty Organization https://www.nato.int/cps/en/natohq/declassified_139339.htm

North Atlantic Treaty Organization, NATO Secretary General and US discuss NATO's 1 Priorities https://www.nato.int/cps/en/natolive/news_70237.htm

Our Document Gov, The People's Vote Bill of Rights (1791) <https://www.ourdocuments.gov/content.php?flash=true&page=vote>

Our Document Gov, The People's Vote Constitution of the United States (1787) <https://www.ourdocuments.gov/content.php?flash=true&page=vote>

Overview of CNPC, Tarim Oil field Company http://www.xjts.cn/xinjiang/content/2006-09/19/content_1185601.htm.

Petro China Company Limited, Petro China Tarim Oil field Company's Annual Crude Oil Output Exceeds 5 million Tons <http://www.petrochina.com.cn/ptr/xwxx/201404/1b7cad2f6d8d43efb7314512c1757e4d.shtml>

Public Law 105–292 105th Congress <https://www.congress.gov/105/plaws/publ292/PLAW-105publ292.pdf>

Public Law 114 328, National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2017 <https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-114publ328/pdf/PLAW-114publ328.pdf>

The Christian Science Monitor, China's political system is more flexible than US democracy <https://www.csmonitor.com/Commentary/Global-Viewpoint/2011/1017/China-s-political-system-is-more-flexible-than-US-democracy>

The Diplomat, Trump Signs Uyghur Human Rights Act Into Law <https://thediplomat.com/2020/06/trump-signs-uyghur-human-rights-act-into-law>

The Guardian.Com, It's time to boycott any company doing business in Xinjiang <https://www.theguardian.com/world/2019/oct/27/its-time-to-boycott-any-company-doing-business-in-xinjiang>

- The Guardian.Com, US House approves Uighur Act calling for sanctionson China's senior officials* <https://www.theguardian.com/world/2019/dec/04/us-house-approves-uighur-act-calling-for-sanctions-on-chinas-politburo-xinjiang-muslim>
- The Institute of Energy Economics, China's Natural Gas Industry and Gas to Power Generation* <https://eneken.ieej.or.jp/en/data/pdf/397.pdf>
- The Malaise Grows China Perspectives The Uyghurs in Xinjiang* <https://journals.openedition.org/chinaperspectives/648>
- The Newyork Times, Trump Administration Adds Six Countries to Travel Ban* <https://www.nytimes.com/2020/01/31/us/politics/trump-travel-ban.html>
- United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights,* <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx>
- United Nations Office of the High Commissioner on Human Rights Committee on the Elimination of Racial Discrimination Reviews the Report of China* <https://www.ohcr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.spx?NewsID=23452&LangID=E>
- United Nations, Universal Declaration of Human Rights <https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/>
- US Commision on International Religious Freedom. Annual Report. 2013* [https://www.uscirf.gov/sites/default/files/resources/2013%20USCIRF%20Annual%20Report%20\(2\).pdf](https://www.uscirf.gov/sites/default/files/resources/2013%20USCIRF%20Annual%20Report%20(2).pdf)
- US Department of Homeland Security, US Customs and Border Protection* <https://www.cbp.gov/frontline/border-security>
- US Department of State's Foreign Terrorist Organizations* <http://www.state.gov/s/ct/rls/fs/08/103392.htm>
- U.S Energy Information Administration, What countries are the top producers and consumers of oil?* <https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=709&t=6>
- U.S. Government Publishing Office, The Global Magnitsky Human Rights Accountability Act* <https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-114hhrg94388/html/CHRG-114hhrg94388.htm>
- World Energy Outlook 2019* <https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2019>
- Xinjiang's oil and gas equivalent ranks first in China* <http://english.people.com.cn/90001/6448603.html>.
- Xinjiang Oil Province,* http://www.cnpc.com.cn/en/aboutcnpc/ourbusinesses/explorationproduction/operatediol/Xinjiang_Oil_Province.htm.
- Xinjiang to become China's largest oil and gas base* <http://www.chinamining.org/News/2012-01-04/1325640213d53011.html>.

Upaya Kontra Uni Eropa Terhadap Serangan Terorisme di Uni Eropa Tahun 2015-2017

Oleh:
An Nisaa Atila Thabrani¹

¹ Hubungan Internasional, Universitas Lampung
annisaaatila@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah terdapat upaya kontra-terorisme yang dilakukan Uni Eropa terhadap serangan terorisme pada tahun 2015-2017 serta melihatnya dalam kontra-terorisme defensif dan ofensif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari situs resmi Uni Eropa seperti Europa dan Europol. Metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan dengan mengacu pada konsep kontra-terorisme dan keamanan komprehensif. Penulis melihat bahwa dalam kurun waktu 2015-2017, permasalahan terorisme telah mengganggu stabilitas keamanan di Uni Eropa akibat meningkatnya intensitas serangan terorisme yang melanda kawasan tersebut. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, Uni Eropa melakukan berbagai upaya kontra-terorisme seperti mengadopsi *European Passenger Name Record*, pengetatan regulasi pemeriksaan di perbatasan eksternal, penguatan kontrol terhadap perolehan dan kepemilikan senjata api, meresmikan *European Counter-Terrorism Centre*, mendirikan *European Union Internet Referral Unit* oleh Europol, dan mengkriminalisasi pelanggaran terorisme.

Kata Kunci : Kontra-Terrorisme, Terorisme, Uni Eropa

Pendahuluan

Globalisasi adalah suatu fenomena ketika batas teritorial antar negara menjadi tidak relevan akibat revolusi yang terjadi di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Oleh sebab itu, globalisasi dijuluki sebagai permulaan dari dunia tanpa batas.¹ Karakteristik tanpa batas atau *borderless* ini menimbulkan berbagai hambatan dalam menyaring aksi kriminalitas yang berasal dari luar ke dalam suatu negara. Hal ini menyebabkan adanya peningkatan aksi kriminalitas lintas batas salah satunya termasuk terorisme.

1 Ohmae, Kenichi. 1994. *The Borderless World: Power and Strategy in the Global Marketplace*. New York City: Harper Collins. Dikutip oleh Netherlands Development Assistance Research Council. 2000. "Coping with Globalization: The Need for Research Concerning the Local Response to Globalization in Developing Countries". The Hague: Publikasi RAWOO. No. 20, hal. 14.

Terorisme juga tak luput menjadi ancaman utama yang diprioritaskan oleh negara-negara anggota Uni Eropa (UE). Penembakan Charlie Hebdo² adalah titik awal dari serentetan serangan terorisme yang terjadi hingga tahun 2017. Pasca Penembakan Charlie Hebdo, Eropa dilanda serangkaian serangan terorisme berskala besar di beberapa negara anggotanya. Tingginya intensitas serangan terorisme yang melanda UE pada tahun 2015-2017 telah menyebabkan terganggunya stabilitas keamanan di kawasan tersebut.

Dalam mengatasi permasalahan terorisme yang mengganggu stabilitas keamanan di Eropa pada tahun 2015-2017, keberadaan UE sebagai organisasi regional yang mencakupi wilayah tersebut berperan penting dalam menangani isu terorisme. Pasca Penembakan Charlie Hebdo, UE memutuskan untuk memperkuat respon melawan terorisme dan mempercepat pengimplementasian langkah-langkah kontra-terorisme yang telah disepakati bersama. Pemimpin-pemimpin UE mengadakan pertemuan pada 12 Februari 2015 dan menyepakati beberapa langkah kontra-terorisme berikut:³

1. mengadopsi *European Passenger Name Record* (PNR);
2. memanfaatkan sepenuhnya kerangka kerja Schengen, termasuk melalui pemeriksaan sistematis dan terkoordinasi terhadap masyarakat UE di seluruh perbatasan eksternal;
3. meningkatkan kerja sama dalam perang melawan perdagangan senjata api dan pendanaan terorisme; mengatasi krisis dan konflik dan lebih banyak terlibat dengan negara ketiga⁴ terkait masalah keamanan; dan
4. mendeteksi dan menghapus konten internet yang mempromosikan terorisme atau ekstremisme;
5. mempromosikan kerja sama dengan PBB serta organisasi global dan regional lain.

2 Charlie Hebdo merupakan kantor redaksi majalah satire asal Prancis yang mencetak karikatur yang dinilai sensitif dan provokatif bagi kaum muslim ekstremis. Pada 7 Januari 2015, dua saudara yang telah bersumpah setia kepada Al-Qaeda menembak mati 12 orang termasuk 6 kartunis dan jurnalis yang bekerja dengan majalah tersebut.

3 European Council. 2015. Informal meeting of the Heads of State or Government Brussels, 12 February 2015 – Statement by the members of the European Council. Diambil kembali dari <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/02/12/european-council-statement-fight-against-terrorism/>, diakses pada 10 Januari 2019.

4 Di UE, istilah ini mencakup semua negara yang bukan bagian dari UE atau European Economic Area.

Pada penelitian ini, penulis memilih periode 2015-2017 karena permasalahan terorisme telah mengganggu stabilitas keamanan UE akibat tingginya intensitas serangan terorisme yang melanda tanah Eropa pada periode tersebut. Hal tersebut bermula dari Penembakan Charlie Hebdo di awal tahun 2015 yang kemudian diikuti serangkaian serangan terorisme berskala besar lainnya hingga tahun 2017. Serangan terorisme itu termasuk Serangan Paris November 2015; Pengeboman Brussel, Serangan Nice, dan Serangan Berlin di tahun 2016; serta Pengeboman Manchester Arena dan Serangan Barcelona di tahun 2017. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti memiliki ketertarikan untuk melihat apakah terdapat upaya kontra-terorisme yang dilakukan UE terhadap serangan terorisme di UE tahun 2015-2017.

Kontra-Terrorisme

Signifikansi dari terorisme adalah langkah-langkah untuk memotong atau melemahkan terorisme yang hanya memberikan dampak buruk bagi aspek-aspek kehidupan. Langkah-langkah tersebut dipandang sebagai kontra-terorisme. Secara eksplisit, langkah-langkah terkait kontra-terorisme menyangkut upaya untuk mengekang kemampuan teroris dalam melancarkan serangan.⁵ Upaya ini terbagi menjadi dua yaitu upaya kontra-terorisme defensif yang dirancang untuk melindungi target yang berpotensi terkena dampak serangan terorisme, dan upaya kontra-terorisme ofensif yang dimaksudkan untuk mengurangi kapabilitas dari pelaku teroris. Berikut ini adalah penjabaran dari upaya defensif dan ofensif.⁶

Upaya defensif diterapkan pada beberapa tingkatan yang berbeda. Tingkatan yang paling spesifik adalah perlindungan fasilitas seperti gedung perkantoran, pangkalan militer, kedutaan besar, atau fasilitas lainnya yang bisa menjadi sasaran serangan teroris. Tingkatan berikutnya ialah perlindungan bagi keseluruhan sistem. Sejauh ini, perlindungan tingkat sistem yang telah memainkan peran besar dalam kontra-terorisme yaitu terkait penerbangan sipil. Tingkatan yang paling umum dari upaya defensif adalah perlindungan seluruh wilayah, terutama dengan mencegah teroris tetap berada di luar perbatasan teritorial.

5 Williams, Paul D. 2008. *Security Studies: An Introduction*. New York: Routledge, hal. 377-380.

6 *Ibid.*, hal. 380-384.

Upaya ofensif sendiri terdiri dari penggunaan beberapa macam alat yang bersifat komplementer. Pertama, sifat transnasional dari terorisme modern menjadikan diplomasi sebagai alat yang penting. Kedua, alat lain yang didukung oleh peran diplomasi adalah menargetkan pada pendanaan aksi terorisme dalam bentuk pembekuan atau penyitaan aset teroris. Ketiga, alat yang paling sering ditekankan adalah intelijen. Intelijen melaksanakan tiga fungsi yang berkontribusi besar terhadap kontra-terorisme. Fungsi pertama untuk melihat arti strategis dari suatu ancaman terorisme. Fungsi kedua untuk memberikan dukungan data terhadap alat lain. Fungsi ketiga untuk memberikan input penting bagi penegakan hukum dan operasi militer.

Keamanan Komprehensif

Konsep keamanan komprehensif menjelaskan keterlibatan aktor non-negara dalam menjaga keamanan internasional. Konsep ini melihat bahwa dalam menjaga keamanan bukan hanya di bidang militer saja, melainkan di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Asumsi konstruktivisme yang mendasari definisi ini berbeda dari pendekatan tradisionalisme, yakni lingkup keamanan bukan hanya sekedar masalah materialistis yang didominasi oleh keseimbangan, kemampuan, dan penggunaan kekuatan saja, melainkan juga masalah yang dikondisikan dengan mempersepsikan ancaman yang ada.⁷

Buzan mengidentifikasi lima sektor yang membentuk pemahaman komprehensif atau perluasan keamanan di antaranya sektor militer, lingkungan, ekonomi, sosial, dan politik. Sektor-sektor ini memiliki realitas politik yakni perlunya memadukan berbagai kekuatan dan menghubungkannya satu sama lain guna menciptakan keamanan internasional. Dengan begitu, untuk mengejar keamanan komprehensif, kuncinya terletak dalam pengelolaan lintas sektoral.⁸

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe kualitatif-deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya

7 *Ibid.*, hal. 227.

8 Carmen Gebhard dan Per Martin Norheim-Martinsen, *Op.cit.*, hal. 227.

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Metode ini berguna dalam membantu penulis memetakan fokus penelitian yaitu untuk melihat adakah upaya kontra-terorisme yang dilakukan UE terhadap serangan terorisme di UE dari tahun 2015 hingga 2017. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan tipe penelitian secara deskriptif yang cenderung menggunakan pendekatan induktif untuk menyelesaikan sebuah permasalahan.

Penulis menggunakan alur logika induktif yang sejalan dengan teori kontra-terorisme dan konsep keamanan komprehensif. Dalam hal ini, penulis turut menganalisis upaya-upaya tersebut ke dalam upaya yang bersifat defensif dan ofensif dengan menggunakan teori kontra-terorisme. Sementara itu, penulis menggunakan konsep keamanan komprehensif untuk melihat kompleksitas dari isu terorisme yang membutuhkan pengelolaan lintas sektoral dalam penanganannya.

Adapun data yang dicari merupakan data dari tahun 2015 sampai 2017 mengenai upaya kontra-terorisme yang dilakukan UE terhadap serangan terorisme di UE. Data yang telah dikumpulkan disiapkan dan diorganisir, kemudian mereduksinya melalui proses pengkodean dengan inisial tertentu dan akhirnya mewakili data dalam bentuk tabel, gambar, atau diskusi.⁹ Pada tahapan terakhir, penulis menarik kesimpulan yang sama berdasarkan kecenderungan yang terlihat dalam proses analisis data guna memperoleh informasi baru bagi penelitian selanjutnya mengenai upaya kontra-terorisme yang dilakukan UE terhadap serangan terorisme di UE tahun 2015-2017.

Pembahasan

Pergeseran agenda keamanan UE dalam menjadikan isu terorisme sebagai isu keamanan yang diprioritaskan pasca Serangan Paris November 2015 menuntut UE untuk melakukan berbagai upaya kontra-terorisme sebagai respon atas ancaman tersebut. Pada upaya kontra-terorisme yang dilakukan oleh UE pada tahun 2015-2017, penulis menganalisis berdasarkan konsep kontra-terorisme itu sendiri. Secara umum, signifikansi dari terorisme adalah langkah-langkah untuk memotong akar penyebab terorisme yang memberikan dampak buruk bagi aspek-aspek kehidupan

⁹ Creswell, John. W. 2007. *Qualitative Inquiry And Research Design: Choosing Among Five Traditions*. California: Sage Publications.

masyarakat. Langkah-langkah inilah yang disebut sebagai kontra-terorisme. Secara eksplisit, langkah-langkah yang paling sering dianggap sebagai kontra-terorisme menyangkut berbagai upaya untuk mengekang kemampuan teroris dalam melancarkan serangan terorisme. Berikut adalah upaya kontra-terorisme yang telah dilakukan oleh UE terhadap serangan terorisme di UE tahun 2015-2017:

1. Pendirian *EU Internet Referral Unit* (IRU) oleh Europol,
2. Peresmian *European Counter-Terrorism Centre* (ECTC),
3. Pengadopsian *European PNR*,
4. Pengetatan Regulasi Pemeriksaan di Perbatasan Eksternal,
5. Kriminalisasi Pelanggaran Terorisme,
6. Penguatan Kontrol Perolehan dan Kepemilikan Senjata Api.

Berdasarkan upaya kontra-terorisme yang dilakukan oleh UE terhadap serangan terorisme di UE tahun 2015-2017 di atas, upaya-upaya tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu upaya kontra-terorisme defensif dan ofensif. Upaya kontra-terorisme defensif adalah upaya yang dirancang untuk melindungi target yang berpotensi terkena dampak serangan terorisme. Sedangkan upaya kontra-terorisme ofensif ialah upaya yang dimaksudkan untuk mengurangi kapabilitas teroris. Terdapat masing-masing 3 upaya kontra-terorisme yang dilakukan UE terhadap serangan terorisme di UE tahun 2015-2017 yang termasuk ke dalam upaya defensif maupun ofensif.

Pengadopsian penggunaan data PNR, pengetatan regulasi pemeriksaan di perbatasan eksternal, dan penguatan kontrol perolehan dan kepemilikan senjata merupakan upaya kontra-terorisme defensif yang dilakukan oleh UE pada tahun 2015-2017. Ketiga upaya tersebut dirancang untuk melindungi target yang berpotensi terkena dampak serangan terorisme.

Dilihat dari penerapannya, pengadopsian penggunaan data PNR yang berkaitan dengan penerbangan sipil ini tergolong dalam perlindungan pada tingkat sistem. Hal ini dikarenakan dalam penerapannya perlu melibatkan keseluruhan sistem terutama dalam proses penyerahan data PNR dari sistem operasional milik maskapai penerbangan ke seluruh unit nasional milik tiap negara anggota. Selain itu, upaya ini memainkan peran terbesar dalam kontra-terorisme. Hal ini

dikarenakan sifat kerentanan dan mobilitas yang melekat pada penerbangan sipil menjadikannya sebagai target empuk bagi teroris.

Selanjutnya, pengetatan regulasi pemeriksaan di perbatasan eksternal merupakan upaya yang diterapkan pada tingkat paling umum yaitu perlindungan bagi seluruh wilayah UE. Hal ini bertujuan untuk mencegah teroris agar tidak masuk ke dalam wilayah UE dan tetap berada di luar perbatasan teritorial. Selain itu, tidak menutup kemungkinan juga terdapat masyarakat UE yang menjadi pelaku terorisme. Masyarakat UE tersebut dapat mengeksploitasi hak bebas bergerak di bawah hukum UE untuk menghindari pendeteksian akibat pemeriksaan yang minim, khususnya saat mereka kembali dari zona konflik asing. Pemeriksaan mendetail di perbatasan eksternal dapat memungkinkan petugas dalam mengidentifikasi orang-orang tersebut.

Kemudian, penguatan kontrol perolehan dan kepemilikan senjata ialah upaya defensif yang tidak termasuk ke dalam tingkatan apapun. Namun seperti yang telah disebutkan sebelumnya, upaya defensif bekerja dalam beberapa cara. Cara yang paling jelas adalah secara langsung menggagalkan percobaan serangan terorisme. Sekalipun cara ini gagal dalam menghentikan serangan percobaan, namun cara tersebut mampu menghambat teroris dalam melakukan serangan berikutnya dengan cara mempersulit perencanaan teroris tersebut. Hal ini memaksa teroris menggunakan metode yang tidak biasa digunakan.

Misalnya, pembelian dan pembuatan yang dibutuhkan untuk sebuah bom berskala besar mungkin terlihat lebih mencolok dan mudah terdeteksi oleh Europol daripada pembelian senjata api atau perangkat berskala kecil lain. Dengan begitu, UE yang memutuskan untuk memperkuat kontrol perolehan dan kepemilikan senjata api dapat semakin mempersulit usaha teroris untuk melakukan serangan terorisme. Dalam prosesnya, hal ini dapat memperbesar konsekuensi tertangkap oleh petugas.

Sementara itu, peresmian ECTC, pendirian EU IRU oleh Europol, maupun kriminalisasi pelanggaran terorisme tergolong sebagai upaya kontra-terorisme ofensif yang telah dilakukan oleh UE pada tahun 2015-2017. Ketiga upaya tersebut dimaksudkan untuk mengurangi kapabilitas teroris.

ECTC sendiri yaitu unit khusus yang didirikan teruntuk negara-negara anggota dalam melakukan aktivitas berbagi informasi intelijen dan kerja sama operasional terkait kontra-terorisme. Dengan diresmikannya ECTC artinya UE menekankan penggunaan intelijen sebagai alat penting dalam upaya ofensif yang dilakukannya.

Upaya ini secara khusus dapat memberikan masukan penting bagi negara-negara anggota UE yang memanfaatkan fasilitas ECTC. Masukan ini dapat berupa sekumpulan informasi mengenai pemantauan dan penyelidikan teroris asing, perdagangan senjata api ilegal, dan pendanaan aktivitas terorisme. Informasi tersebut dapat berguna untuk melihat arti strategis dari ancaman terorisme yang dalam prosesnya dapat membantu dalam memandu langkah-langkah kontra-terorisme yang perlu dilakukan guna memberantas ancaman tersebut.

Sementara itu, pendirian EU IRU juga turut berkontribusi untuk memaksimalkan berjalannya intelijen dalam konteks kontra-terorisme. Pada dasarnya, salah satu prinsip dasar dari respon legislatif terhadap serangan teroris adalah re-organisasi komunitas intelijensi. Re-organisasi dilakukan dengan membentuk tambahan unit pusat kontra-terorisme dan meningkatkan pengawasan pada keseluruhan komunitas tersebut.

Dalam konteks ini, ECTC ialah unit pusat tambahan yang dibentuk dalam suatu komunitas intelijensi sebagai pusat informasi khusus dalam perang melawan terorisme. Sementara itu, EU IRU didirikan sebagai suatu upaya untuk meningkatkan pengawasan pada keseluruhan komunitas itu sendiri. Hal ini terlihat dari fungsi EU IRU yaitu mengidentifikasi konten daring berbau ekstremisme dan radikalisasi guna mencegah masyarakat agar tidak terjerumus ke dalam propaganda yang dilakukan kelompok-kelompok jihad melalui media sosial.

UE juga memperkuat kerangka hukumnya terkait kriminalisasi pelanggaran terorisme. Penangkapan dan penuntutan tersangka teroris atas pelanggaran terorisme di pengadilan pidana dapat mencapai beberapa hal. Dengan menahan pelaku teroris dapat mencegahnya untuk melakukan serangan terorisme lanjutan.

Sementara itu, penuntutan pelanggaran terorisme yang dipublikasikan dengan baik dapat berkontribusi dalam memperlihatkan tekad UE yang serius untuk memerangi terorisme. Secara tidak langsung, hal ini dapat dikatakan sebagai suatu

gertakan bagi teroris lain akan besarnya risiko tertangkap dan diadili. Apabila gertakan itu tidak benar-benar dihiraukan oleh teroris lain namun teroris tersebut tetap akan terusik oleh publikasi-publikasi yang ada. Hal ini dapat membatasi gerak-geriknya yang kemudian mempengaruhi jalannya operasi yang hendak dilakukan. Selain itu, penuntutan atas pelanggaran terorisme yang sukses dapat memuaskan sentimen publik atas keinginan melihat para teroris mendapatkan hukuman.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, pasca Perang Dingin merupakan titik balik dari meluasnya agenda keamanan UE menjadi lebih kompleks. Serangan 11 September menghadapkan UE terhadap ancaman keamanan bentuk baru salah satunya adalah terorisme. Pada tahun 2015, sekitar 70% koresponden dari UE yang berpartisipasi dalam survei yang dilakukan *Pew Research Center* menyatakan keprihatinan terhadap isu terorisme melebihi isu lainnya. Keprihatinan atas isu terorisme ini semakin terasa saat gelombang terorisme melanda UE pada tahun 2015 hingga 2017. Seperti diketahui, sejumlah upaya kontra-terorisme yang diadopsi oleh UE kemudian mengalami peningkatan di tahun 2015, 2016 dan 2017.

Konsep sekuritisasi dalam keamanan komprehensif mendukung argumen di atas. Agenda keamanan UE yang meluas disebabkan oleh UE yang melakukan proses politisasi terhadap isu terorisme dengan menjadikan isu tersebut sebagai masalah keamanan bagi UE. Dengan dilakukannya sekuritisasi terhadap isu terorisme oleh UE, isu tersebut mendapatkan prioritas utama dan tingkat urgensi yang mendesak sehingga permasalahan keamanan ini dapat cepat diselesaikan.

Beberapa langkah nyata yang dilakukan oleh UE sebagai turunan dari upaya-upaya kontra-terorisme untuk mengatasi masalah terorisme di UE seperti:

1. Komisi Eropa secara aktif mendukung negara anggota dalam proses implementasi penggunaan data PNR dalam konteks kontra-terorisme dengan memberikan bantuan keuangan, mengoordinasikan pertemuan rutin, dan memfasilitasi pertukaran praktik terbaik. Pada tahun 2017 saja, tiap negara anggota menerima 70 juta euro atau setara dengan 78 juta USD dalam pendanaan UE untuk mendukung kegiatan terkait PNR.
2. Amandemen Kode Perbatasan *Schengen* menyeleraskan kewajiban bagi tiap negara anggota dalam memperketat pemeriksaan baik pada saat

masuk maupun keluar, juga pada warga negara dari negara ketiga maupun orang-orang yang memiliki hak kebebasan bergerak di bawah hukum UE.

3. Terkait penguatan kontrol perolehan dan kepemilikan senjata, lebih dari 578 senjata api dan 776 amunisi disita sebagai bagian dari operasi gabungan yang menargetkan pergerakan senjata api, bahan peledak, bahan kimia, biologi, radiologi, dan nuklir secara ilegal melalui perbatasan Ukraina dan Moldova pada April 2017.

Sementara itu, seperti yang disebutkan dalam *European Security Strategy—A Secure Europe in a Better World* terdapat perbedaan mendasar terkait bentuk ancaman keamanan sebelum dan sesudah perang dingin. Lebih lanjut sebagai berikut:

“In contrast to the massive visible threat in the Cold War, none of the new (global security) threats is purely military: nor can any be tackled by purely military means. Each requires a mixture of instruments.”

(Pasca Perang Dingin, ancaman keamanan bentuk baru tidak ada yang murni militer dan penanganannya pun tidak hanya menggunakan militer. Tiap ancaman membutuhkan penanganan yang terdiri dari campuran berbagai instrumen.)

Pernyataan di atas yaitu strategi UE yang melibatkan campuran berbagai instrumen dalam menangani suatu isu sesuai dengan asumsi dari teori keamanan komprehensif. Teori tersebut menganggap pengelolaan lintas sektor adalah kunci dari keamanan yang komprehensif. Pemahaman ini mengarahkan UE ke pendekatan *multi-faceted* yang mengakui kompleksitas masalah keamanan global pasca Perang Dingin. Dalam penanganannya, pendekatan ini mempertimbangkan setiap aspek dari suatu krisis secara koheren.

Contoh dari pendekatan *multi-faceted* dalam kontra-terorisme di UE adalah kolaborasi antar *European Counter-Terrorism Centre* dengan *European Migrant Smuggling Centre* terkait penanganan senjata api ilegal di UE. *European Counter-Terrorism Centre* bentukan Europol dibentuk untuk mendukung negara-negara anggota dalam berbagi informasi dan kerja sama operasional terkait kontra-terorisme termasuk pemantauan lalu lintas senjata api ilegal. Sementara itu, *European Migrant Smuggling Centre* yang juga bentukan Europol mencari cara

untuk mengidentifikasi dan menganalisis hubungan antara fasilitasi migrasi ilegal dengan bidang kejahatan lain termasuk perdagangan senjata api. Dari contoh tersebut dapat dilihat bahwa kedua unit bentukan Europol tersebut merupakan unit khusus yang menangani bidang kejahatan berbeda namun keduanya berkolaborasi untuk tujuan yang sama untuk mengatasi permasalahan senjata api ilegal di UE.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil dan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa UE telah melakukan upaya kontra-terorisme dalam mengatasi serangan terorisme di UE tahun 2015-2017. Upaya-upaya tersebut yaitu berikut:

1. Pendirian *European Union Internet Referral Unit* oleh Europol di tahun 2015;
2. Peresmian *European Counter-Terrorism Centre* dan pengadopsian *European Passenger Name Record* di tahun 2016; dan
3. Mengkriminalisasi pelanggaran terorisme, pengetatan regulasi pemeriksaan di perbatasan eksternal, dan penguatan kontrol perolehan dan kepemilikan senjata dalam konteks kontra-terorisme di tahun 2017.

Upaya-upaya di atas dapat digolongkan menjadi dua yaitu upaya kontra-terorisme defensif dan ofensif. Upaya kontra-terorisme defensif termasuk pengadopsian penggunaan data PNR, pengetatan regulasi pemeriksaan di perbatasan eksternal, dan penguatan kontrol perolehan dan kepemilikan senjata. Sedangkan upaya kontra-terorisme ofensif meliputi peresmian ECTC, pendirian EU IRU oleh Europol, maupun kriminalisasi pelanggaran terorisme.

Daftar Pustaka

Buku:

- Abimayu, Bambang. 2005. *Terror Bom di Indonesia*. Jakarta: Grafindo.
- Berrebi, Claude, dan Jordan Ostwald. 2001. *Earthquakes, Hurricanes, and Terrorism: Do Natural Disasters Incite*. Springer Science & Business Media.
- Bjørge, Tore. 2005. *Root Causes of Terrorism: Myths, reality and ways forward*. London: Routledge.

- Creswell, John. W. 2007. *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions*. California: SAGE Publications.
- Duquet, Nils, dan Kevin Goris. 2018. *Firearms acquisition by terrorists in Europe—Research findings and policy recommendations of Project SAFTE*. Brussel: Flemish Peace Institute.
- Hough, Peter, Shahin Malik, Andrew Moran, dan Bruce Pilbeam. 2015. *International Security Studies: Theory and Practice*. New York: Routledge.
- Martin, Gus. 2010. "Religious Terrorism." *In Essentials of Terrorism: Concepts and Controversies*. California: SAGE Publications.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Wilkinson, Paul. 2006. *Terrorism vs Democracy: The Liberal State Response*. New York: Routledge.
- Williams, Paul D. 2008. *Security Studies: An Introduction*. New York: Routledge.

Report/Working Paper:

- Bigo, Didier, dkk. 2015. *The EU Counter-Terrorism Policy Responses to the Attacks in Paris: Towards an EU Security and Liberty Agenda*. CEPS Paper in Liberty and Security in Europe. No. 81.
- Buzan, Barry. 1998. *Security: a new Framework for analysis*. Boulder. CO: Lynne Routledge. Dalam Carmen Gebhard dan Per Martin Norheim-martinsen. 2011. "Making Sense of EU Comprehensive security towards conceptual and analytical clarity". *Journal European Security*. Vol. 20, no. 2.
- Buzan, Barry dan Lene Hansen. 2009. *The evolution of international security studies*. Cambridge: Cambridge University Press, dalam Gebhard, Carmen, dan Per Martin Norheim-martinsen. "Making Sense of EU Comprehensive security towards conceptual and analytical clarity". *Journal European Security*. Vol. 20, no. 2.
- Drewer, Daniel dan Jan Ellermann. 2016. *May the (well –balanced) force be with us! The launch of the European Counter Terrorism Centre (ECTC)*. *Computer Law & Security Review: The International Journal of Technology Law and Practice*.
- European Commission's Directorate-General for Communication. 2018. *The European Union: What it is and what it does*. Publikasi UE.
- European Parliament's Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs. 2017. *The European Union's Policies on Counter-Terrorism: Relevance, Coherence and Effectiveness*. Publikasi UE.

- Jabeen, Mussarat dan Ishtiaq A. Choudhry. 2013. *Role of SAARC for Countering Terrorism in South Asia*. A Research Journal of South Asian Studies. Vol. 28, no. 2.
- Namora, Giuliani Agustha. 2016. *Peran Asean Convention On Counter Terrorism Dalam Penanganan Terorisme Di Filipina Periode 2011 – 2013*. Universitas Diponegoro: Journal of International Relations. Vol. 2, no. 4.
- Newman, Edward. 2006. *Exploring the Root Causes of Terrorism*. Studies in Conflict and Terrorism. Vol. 29, no. 8.
- Ohmae, Kenichi. 1992. *The Borderless World: Power and Strategy in the Global Marketplace*. London, dikutip oleh RAWOO Netherlands Development Assistance Research Council. 2000. "Coping with Globalization: The Need for Research Concerning the Local Response to Globalization in Developing Countries". Publikasi No. 20.
- Paunović, Nikola. 2018. *New EU Criminal Law Approach to Terrorist Offences*. EU and Comparative Law Issues and Challenges Series. Issue 2.
- Saputro, Pradono Budi. 2017. *Relevansi Perjanjian Schengen Pasca Serangan Teror ISIS di Eropa Periode 2015-2016*. Journal International & Diplomacy. Vol. 2, no. 2.
- See Seng Tan dan Hitoshi Nasu. 2017. *ASEAN And The Development Of Counter-Terrorism Law And Policy In Southeast Asia*. The University of New South Wales Law Journal. Vol. 39, no. 3.
- Sitorus, Erwin Yusup. 2017. *Kebijakan Keamanan Nasional Filipina dalam Kontra-terorisme Periode 2015-2016*. Jurnal Prodi Peperangan Asimetris. Vol. 3, no. 2.
- Tella, Oluwaseun. *Boko Haram Terrorism and Counter-Terrorism: The Soft Power Context*. Journal of Asian and African Studies.
- UNODC. 2018. *Module 1: Definitions of Organized Crime "Similarities and differences between organized crime and other forms of crime"*. EAJ University Module Series: Organized Crime.

Dokumen:

- European Commission. Februari 2011. *Proposal for a Directive on the use of Passenger Name Record data for the prevention, detection, investigation and prosecution of terrorist offences and serious crime*.
- European Council. Desember 2003. *European Security Strategy—A Secure Europe in a Better World*.
- European Parliament. Februari 2017. *Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2016/399 as regards the reinforcement of checks against relevant databases at external borders*.
- EU Counter-Terrorism Coordinator. Maret 2016. *State of play on implementation of the statement of the Members of the European Council of 12 February*

2015, the JHA Council Conclusions of 20 November 2015, and the Conclusions of the European Council of 18 December 2015.

Precidency and Counter-Terrorism Coordinator. November 2005. *The European Union Counter-Terrorism Strategy*.

United Nations. 2006. *The United Nations in the Fight Against Terrorism*. Diambil kembali dari https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2017/01/2006_01_26_cted_lecture.pdf

Press Release:

European Council. 2015. *Conclusions of the Council of the EU and of the Member States meeting within the Council on Counter-Terrorism*. Diambil kembali dari <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/11/20/jha-conclusions-counter-terrorism/>

European Council. 2016. *Council agrees negotiating position to strengthen control of firearms*. Diambil kembali dari <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/06/10/weapons-strengthen-control/>

European Council. 2017. *EU strengthens rules to prevent new forms of terrorism*. Diambil kembali dari <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/03/07/rules-to-prevent-new-forms-of-terrorism/>

European Council. 2015. *Informal meeting of the Heads of State or Government Brussels, 12 February 2015 – Statement by the members of the European Council*. Diambil kembali dari <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/02/12/european-council-statement-fight-against-terrorism/>

European Council. 2016. *Joint Statement of EU Ministers for Justice and Home Affairs and representatives of EU institutions on the terrorist attacks in Brussels on 22 March 2016*. Diambil kembali dari <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/24/statement-on-terrorist-attacks-in-brussels-on-22-march/>

European Council. 2017. *Schengen borders code: Council adopts regulation to reinforce checks at external borders*. Diambil kembali dari <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/03/07/regulation-reinforce-checks-external-borders/>

Sumber Online:

EUR-Lex. 2003. *European security strategy*. Diambil kembali dari <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ar00004>

Europa. 2019. *The EU in brief*. Diambil kembali dari https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_en#from-economic-to-political-union

Euronews. 2019. *Lull in terror attacks may not last 'until the end of 2019': UN experts*. Diambil kembali dari <https://www.euronews.com/2019/08/03/lull->

in-terror-attacks-may-not-last-until-the-end-of-2019-un-experts, diakses pada 26 Desember 2019.

- European Commission's Migration and Home Affairs. 2019. *Passenger Name Record (PNR)*. Diambil kembali dari https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/police-cooperation/information-exchange/pnr_en
- European Commission's Migration and Home Affairs. 2018. *Security Union: New Rules on EU Passenger Name Record Data*. Diambil kembali dari https://ec.europa.eu/home-affairs/news/security-union-new-rules-eu-passenger-name-record-data_en
- European Council. 2015. *Justice and Home Affairs Council, 12-13/03/2015*. Diambil kembali dari <https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/jha/2015/03/12-13/>
- European Council. 2019. *EU fight against terrorism: EU counter-terrorism strategy*, Diambil kembali dari <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/fight-against-terrorism/eu-strategy/>, diakses pada 15 Oktober 2019.
- European Parliament. 2018. *Terrorism in the EU since 2015*. Diambil kembali dari <http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/security/20180703STO07127/terrorism-in-the-eu-since-2015>
- Europol. 2019. *European Counter Terrorism Centre (ECTC)*. Diambil kembali dari <https://www.europol.europa.eu/about-europol/european-counter-terrorism-centre-ectc>
- Europol. 2015. *Europol's Internet Referral Unit to Combat Terrorist and Violent Extremist Propaganda*. Diambil kembali dari <https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/europol%E2%80%99s-internet-referral-unit-to-combat-terrorist-and-violent-extremist-propaganda>
- Europol. 2014-2018. *EU Terrorism Situation & Trend Report (TE-SAT)*. Diambil kembali dari <https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/eu-terrorism-situation-and-trend-report#fndtn-tabs-0-bottom-1>
- Simon, Frédéric. *From 9/11 to Charlie Hebdo: The EU's response to terrorism*.
- Carle, Jill. 2015. *Climate Change Seen as Top Global Threat*. Diambil kembali dari <https://www.pewresearch.org/global/2015/07/14/climate-change-seen-as-top-global-threat/>
- Berthelet, Pierre. 2017. *How the European Union is making major strides fighting terrorism*. Diambil kembali dari <https://theconversation.com/how-the-european-union-is-making-major-strides-fighting-terrorism-82866>
- Luhulima, C.P.F. 2009. *Traktat-traktat Uni Eropa dan Pengembangannya*. Diambil kembali dari <http://politik.lipi.go.id/in/kolom/eropa/50-traktat-traktat-uni-eropa-dan-pengembangannya.html>

Kebijakan *War On Drugs* Presiden Rodrigo Duterte Dalam Menanggulangi *Global Drugs Trafficking* Di Filipina, 2016-2018

Oleh:
Anita Dwi Gita Rianto¹

¹ Hubungan Internasional, Universitas Lampung
anitadwigita@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menjelaskan *global drugs trafficking* yang terjadi di Filipina pada tahun 2016-2018; dan menganalisis kebijakan *War On Drugs* Presiden Rodrigo Duterte dalam menanggulangi *global drugs trafficking* di Filipina dalam periode 2016-2018. Kerangka analitis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan luar negeri dengan variable idiosinkratik, konsep *transnasional organized crimes*, dan konsep persepsi ancaman. Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif guna mendapatkan kenyataan empiris dan realita sosial yang terjadi. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapatkan melalui biografi Presiden Rodrigo Duterte, buku, jurnal serta laporan tahunan yang mampu menjelaskan kebijakan Presiden Rodrigo Duterte dalam menanggulangi *global drugs trafficking* di Filipina. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan *War On Drugs* Presiden Rodrigo Duterte dalam menanggulangi *global drugs trafficking* didorong oleh faktor idiosinkratik yang “determinan” yakni nilai (*value*), kepribadian (*Personality of leader*), pengalaman (*experience*), dan bakat (*talent*). Selain itu, persepsi ancaman yang dimiliki Presiden Rodrigo Duterte terhadap *global drugs trafficking* dan *drugs abuse* juga menjadi acuan dalam membuat kebijakan yang bernama *war on drugs*. Tujuan dari dilahirkan kebijakan yang bersifat tegas ini adalah untuk menghentikan segala bentuk tindak penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Filipina.

Kata Kunci : Kebijakan *War On Drugs*, *Global Drugs Trafficking*, Filipina, Rodrigo Duterte.

Pendahuluan

Setelah berakhir era Perang Dingin isu-isu global yang bersifat non-tradisional lebih mendominasi dunia internasional yakni konflik yang terjadi di dalam negara bukan lagi berupa ancaman militer saja, namun terdapat ancaman non-militer atau yang dinamakan dengan *Non- Traditional Threat*. Di dalam ancaman non-tradisional bentuk ancaman berasal dari dalam negara dan didorong oleh faktor-faktor di dalam negara tersebut seperti tindak *terrorism*, penyebaran dan penjualan narkoba, perdagangan manusia, dan lain sebagainya. Salah satu

ancaman yang cukup dianggap darurat dalam *Non-Traditional Threat* adalah permasalahan narkoba, mengingat penggunaan narkoba dapat mengancam kehidupan seseorang serta mengganggu keamanan suatu negara.

Salah satu faktor yang memudahkan terjadinya peredaran narkoba karena adanya jaringan TOC atau *Transnational Organized Crime* yang merupakan kelompok kriminal terorganisir transnasional yang terkadang bekerja sama dengan perusahaan multinasional di pasar dunia, dengan mencatat keuntungan untuk perolehan laba yang lebih besar dan memiliki prioritas strategis yang sama.¹ Kejahatan ini terorganisir dengan rapih sehingga dalam melakukan tindak kejahatan jejak keberadaannya sulit untuk ditelusuri. Salah satu bentuk permasalahan dari TOC adalah *drug trafficking* dan *drug abuse*. Pada awalnya *drug trafficking* dan *drug abuse* merupakan kejahatan biasa yang tidak mendapatkan perhatian khusus dan dianggap sebagai *crime without victim*, namun permasalahan mengenai narkoba menjadi pusat perhatian sejak diadakannya konferensi internasional pertama mengenai narkotik yang diselenggarakan di Shanghai pada tahun 1909. Pertemuan ini diadakan atas dorongan Presiden Theodore Roosevelt dan organisasi para uskup Charles H. Brent, yang dihadiri oleh Inggris, Jepang, China dan Rusia.²

Filipina merupakan salah satu negara yang mengalami permasalahan keamanan yang disebabkan oleh adanya perdagangan dan penggunaan obat-obatan terlarang atau narkoba yang cukup serius. Jenis obat-obatan terlarang yang paling sering digunakan oleh berbagai kalangan pemakai narkoba di Filipina adalah jenis ganja, sabu, dan berbagai macam jenis lain serta obat bius. Jenis obat-obatan seperti ganja dan shabu masuk dalam daftar obat-obatan terlarang dipergunakan dan menjadi salah satu ancaman besar untuk pemerintah Filipina.³

Badan Penindakan Narkoba Filipina yaitu Philippine Drugs Enforcement Agency atau (PDEA) mengatakan bahwa sumber terbesar methamphetamine hidroklorida, atau yang sering dikenal sebagai shabu, berasal dari tiga organisasi besar dalam transnational drug trafficking organizations (DTOs) yakni, African

¹ Potter, G, 2006, 'Transnational Organized Crime.' In The Encyclopedia of Police Science, ed. J. Greene, New York, London: Routledge, hal 1296.

² Erome H. Jaffe M.D, 1995, *Encyclopedia of Drug And Alcohol*, Vol.I-IV, Macmillan Library Reference USA, New York, Simon and Schuster Macmillan, hal 974.

³ PDEA, 2013, "2013 Philippines Drugs Situations", dalam http://pdea.gov.ph/images/Annual_Report/2013AR/2013thephilippinedrugsituation.pdf, diakses pada tanggal 6 September 2018.

Drug Syndicate (ADS), Sindikat Narkoba Cina dan Sindikat Narkoba Sinaloa Meksiko tiga organisasi ini merupakan DTOs terkuat yang terlibat dalam pasar obat ilegal global.⁴

Sebagai negara dengan tingkat penggunaan narkotika, khususnya jenis methamphetamine, tertinggi di Asia Tenggara. Fakta ini tentunya menimbulkan ancaman yang dihadapi dan kerugian yang dipikul oleh masyarakat dan negara Filipina. Berdasarkan hal tersebut, tentu dibutuhkan penanganan berupa respon, dalam hal ini kebijakan dari institusi formal, baik negara/pemerintah ataupun pemimpin negara. Berdasarkan latar belakang tersebut Peneliti tertarik untuk membahas terkait bagaimana kebijakan *War On Drugs* Presiden Rodrigo Duterte dalam menanggulangi *global drugs trafficking* di Filipina pada tahun 2016-2018.

Sebagai pendukung dalam membangun kerangka pemikiran, peneliti menggunakan tinjauan pustaka yang didapatkan berasal dari berbagai analisis dan publikasi yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya baik berbentuk buku, jurnal, dan penelitian ilmiah khususnya dalam *global drugs trafficking* yang terjadi di Filipina. Adapun beberapa penelitian terdahulu, yaitu :

Pertama, Rahadian Sunna Bahaduri dalam penelitiannya yang berjudul “Kebijakan *War On Drugs* Filipina di Bawah Kepemimpinan Rodrigo Duterte” . Di dalam penelitiannya Rahadian membahas mengenai bagaimana gambaran umum mengenai peredaran narkoba yang terjadi di Filipina sehingga menyebabkan Peresiden terpilih pada tahun 2016 yaitu Rodrigo Duterte membuat suatu kebijakan yaitu *War On Drugs* yang bertujuan untuk menekan angka penggunaan dan peredaran narkoba yang terjadi di Filipina.

Kedua, merupakan jurnal yang berjudul “*Drug War Stories And The Philippine President*” oleh Dan Jerome S. Barrera dari Negros Oriental State University. Di dalam jurnal ini Dan menceritakan mengenai bagaimana awal mula terjadinya perang dalam narkoba dan menjelaskan Presiden Filipina yang ke-16 yaitu Rodrigo Duterte yang pertama kali mencetuskan perang terhadap narkoba.

Ketiga, merupakan jurnal yang berjudul “Pengaruh Kepemimpinan

⁴ PEDEA, 2017, “PDEA: 3 International Drug Rings Are Biggest Source Of Shabu INPH: PDEA” dalam <http://pdea.gov.ph/2-uncategorised/512-3-international-drug-rings-are-biggest-source-of-shabu-in-ph-pdea> diakses 27 november 2018.

Presiden Duterte Terhadap Hubungan Bilateral Filipina Dengan Cina” oleh Bayu Arihito. Dalam jurnalnya Bayu menjelaskan mengenai bagaimana Hubungan kerjasama Bilateral yang terjadi antara Filipina dan Cina di bawah Kepemimpinan Rodrigo Duterte yang memiliki pribadi yang keras, berani dan nasionalis hal ini mempengaruhi pengambilan keputusan luar negeri Filipina.

Keempat, penelitian berjudul “*Is the Philippine “War on Drugs” an Act of Genocide?*” oleh Dahlia Simangan. Di dalam jurnalnya Dahlia menganalisis bagaimana kebijakan “*war on drugs*” di era kepemimpinan Rodrigo Duterte. Dahlia menganalisis apakah kebijakan yang diterapkan di Filipina merupakan tindak genosida atau tidak mengingat dalam penerapannya kebijakan ini bersifat agresif dengan membunuh jutaan jiwa tanpa memikirkan HAM yang dimiliki terduga pengguna ataupun penganar narkotika di Filipina.

Kelima, Penelitian yang berkaitan dengan *Global Drugs Trafficking* berjudul “*The Spectacle of Violence in Duterte’s “War on Drugs”*” oleh Danilo Andres Reyes di dalam jurnal ini Danilo menjelaskan bahwa Filipina berada salah satu peringkat tertinggi dalam penggunaan narkotika jenis *methamphetamine* yang mengancam penggunaannya mengingat dampak yang dihasilkan dari tingkat penggunaan narkotika yang tinggi dapat menyebabkan tingkat kejahatan di negara tersebut meningkat pula. Adanya hal ini Filipina tidak hanya tinggal diam dan membuat tindakan nyata dalam memerangi peredaran dan penggunaan narkotika di negaranya.

Penelitian terdahulu yang telah dipaparkan memiliki kemiripan topik dengan penelitian ini. Selain memiliki kemiripan, terdapat berbagai perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini diantaranya adalah terletak pada fokus penelitian. Penelitian ini memiliki fokus penelitian dalam Menjelaskan *global drugs trafficking* di Filipina dan menganalisis kebijakan *War On Drugs* Presiden Rodrigo Duterte dalam menanggulangi *global drugs trafficking* di Filipina pada tahun 2016 hingga 2018. Kerangka analitik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kebijakan Luar Negeri (*Foreign Policy*) dengan variabel Idiosikratik, *Transnational Organized Crimes* (TOC), dan Konsep Persepsi Ancaman (*Threat Perception*).

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode kualitatif sendiri menekankan kepada teknik penelitian yang membantu peneliti berdasarkan kenyataan empiris dan realita sosial yang terjadi.⁵ Pada penelitian kualitatif dapat dengan mudah dipahami dan dimengerti dimana data dapat berupa pernyataan dan data yang dihasilkan berupa data deskriptif yang berkaitan dengan subjek penelitian baik berupa tertulis maupun lisan.⁶

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menjelaskan dan memaparkan serta menganalisis kebijakan *War On Drugs* Presiden Rodrigo Duterte dalam menanggulangi *global drugs trafficking* di Filipina. Peneliti akan memaparkan data-data dan menjelaskan bagaimana kejahatan *global drugs trafficking* di Filipina untuk mengungkapkan sebuah fakta.

Selanjutnya, jenis dan sumber data Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dan digunakan berupa data Sekunder. Data-data tersebut diperoleh melalui biografi yang menjelaskan mengenai Rodrigo Duterte yang merupakan Presiden Filipina terpilih pada tahun 2016 terkait Nilai (*value*), Kepribadian (*Personality of Leader*), Pengalaman (*Experience*), Bakat (*Talent*) dan berbagai sumber lainnya seperti pidato yang dilakukan Presiden Rodrigo Duterte, berita, serta berbagai video yang menceritakan Filipina dan Presiden Rodrigo Duterte yang diakses melalui YouTube, jurnal, buku, dan situs resmi seperti *Philippine Drugs Enforcement Agency* atau (PDEA) yang merupakan situs resmi Filipina yang membahas mengenai dinamika peredaran dan penggunaan narkoba yang terjadi di Filipina. Adapun sumber baca utama lainnya adalah laporan global tahunan yang diperoleh dari *United Nation Office on Drugs and Crime* (UNODC) terkait *Global Drugs Trafficking* yang terjadi khususnya di Filipina dan data lainnya yang berkaitan dengan *Global Drugs Trafficking*. Sedangkan dalam teknik pengumpulan data peneliti menggunakan teknik pengumpulan data Studi Pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini. Setelah Peneliti mengumpulkan data, Peneliti melakukan teknik analisis data, sebagai berikut: **(1) Data Reduksi**, **(2) Data**

⁵ Kirk, J. dan Miller, ML. 1986. *Reliability and Validity in Qualitative Research*. Beverly Hills: Sage Publications, Inc. Hal 8-9.

⁶ *Ibid.*

Display, dan (3) *Conclusion Drawing/ Verification*. Selain itu dalam penelitian ini uji validitas digunakan untuk menguji keabsahan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi data.

Global Drugs Trafficking di Filipina, 2016-2018

Seperti yang telah diuraikan pada latar belakang mengenai *global drugs trafficking* di Filipina, pada saat ini sumber narkotika di Filipina berasal dari tiga organisasi *drugs trafficking* terbesar di dunia yakni Sindikat Narkoba Afrika (ADS), Sindikat Narkoba Cina dan Sindikat Narkoba Sinaloa Meksiko.⁷

ADS atau *African Drug Syndicate* merupakan sindikat narkotika yang berasal dari Afrika, dalam menjalankan aksinya ADS memanfaatkan Pekerja-pekerja Luar Negeri Filipina atau (OFW) dan orang-orang yang bersedia berperan sebagai turis serta bersedia menjadi kurir obat-obatan terlarang. Dalam hal ini banyak masyarakat atau sejumlah orang tertarik menjadi bagian dari kelompok ini karena jumlah bayaran yang sangat besar.⁸

Sedangkan Gang Bambu (Bambu Triad), Triad 14K atau Triad Hongkong, dan Sun Yee On Triad merupakan DTOs atau *drugs trafficking organization* terkuat yang terlibat dalam pasar obat ilegal global yang merupakan bagian dari sindikat narkoba Cina.⁹ Menurut Aaron N. Aquino, Director General PDEA, “Triad Bambu merupakan kelompok kejahatan yang berbasis di Taiwan yang dibentuk pada tahun 1950-an. Anggota kelompok Triad ini terlibat dalam semua aktivitas ilegal di dunia seperti prostitusi, perjudian, pemerasan, perdagangan manusia, dan penyelundupan obat terlarang dalam skala dunia. Anggota triad aktif beroperasi di Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Prancis dan Australia, serta hampir setiap negara di Asia, termasuk Filipina.”¹⁰

The 14K merupakan Triad yang didirikan di Guangzhou, China pada tahun 1945 sebagai gugus tugas anti-komunis. Empat tahun kemudian triad ini pindah ke Hong Kong setelah kekalahan nasionalis. Triad Ini terlibat dalam perdagangan

⁷ *Ibid.*

⁸ PDEA, 2016, Annual report 2016 “*The Philippine Drugs Situation*”, hal 20.

⁹ PDEA, 2017, “*International Drug Rings are Biggest Source of Shabu in PH: PDEA*” dalam <http://pdea.gov.ph/2-uncategorised/512-3-international-drug-rings-are-biggest-source-of-shabu-in-ph- pdea>, diakses pada 23 januari 2019.

¹⁰ *Ibid.*

narkoba skala besar di seluruh dunia. sedangkan Sun Yee on Triad didirikan di Hongkong pada tahun 1919 dan pada saat ini, bermarkas di daratan Tiongkok dan Macau yang memiliki lebih dari 55.000 anggota di seluruh dunia. Sun Yee on Triad dikatakan sebagai organisasi triad paling terorganisir dan terkaya.¹¹

Terakhir adalah Sinaloa Drug Cartel Mexico yang merupakan organisasi perdagangan narkoba internasional yang sangat kuat dan berbasis di Mexico City. Selain ketiga Triad yang menjadikan Filipina sebagai tempat beroperasi dalam mengedarkan narkotika Sinaloa Drug Cartel yang berasal dari Mexico juga merupakan salah satu cartel yang ikut aktif dalam peredaran narkoba yang terjadi di Filipina. Rincian koneksi Sinaloa Drugs Cartel di Filipina dibuktikan dengan temuan shabu oleh PDEA dan petugas keamanan senilai 450 juta peso tepat bersamaan dengan Hari Natal pada 2013 di perternakan yang berada di Lipa City, Batangas, Filipina.¹² Selain itu DTO yang telah diuraikan diatas memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya dimana *The 14K* dan Sun Yee on Triad merupakan pemasok narkotika Sinaloa Drug Cartel Mexico.

Keterlibatan DTO dalam peredaran dan penjualan narkotika di Filipina sudah berlangsung sejak lama bahkan mereka memproduksi dan mengolah shabu yang akan diperjualbelikan di wilayah Filipina. Pada 6 dan 13 Januari 2012 lalu, tiga laboratorium shabu bawah tanah yang berada di Desa Ayala Alabang, Kota Muntinlupa berhasil dibongkar oleh petugas keamanan. Hasil dari penangkapan selama operasi adalah ditemukan shabu yang belum selesai diproduksi dan bahan kimia penting yang digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan shabu, dalam oprasi ini petugas menyita shabu senilai 53 juta peso.¹³

Kebijakan *War On Drugs* Presiden Rodrigo Duterte dalam Menanggulangi *Global Drugs Trafficking* di Filipina, 2016 -2018

Kebijakan *war on drugs* merupakan kebijakan perang terhadap narkoba secara nyata yang dilakukan dan lahir pada era kepemimpinan presiden Filipina ke-16 yang terpilih pada tahun 2016, yakni Presiden Rodrigo Roa Duterte. Dalam penelitian ini Fokus utama adalah melihat peran dan pengaruh pemimpin dalam

¹¹ *Ibid.*

¹² *Op.Cit.* PDEA, 2016.

¹³ *Op.Cit.* PDEA, 2017.

pengambilan kebijakan *war on drugs* dimana pengambilan kebijakan yang dilakukan di Filipina tidak lepas dari peran dan pengaruh pemimpin negara tersebut yakni Presiden Rodrigo Duterte. Untuk melihat peran dan pengaruh pemimpin dalam pengambilan suatu kebijakan penelitian ini akan menggunakan variabel idiosinkratik dan persepsi ancaman.

Idiosinkratik

Idiosyncratic atau idiosikratik merupakan gabungan istilah dari penggabungan kata *ideology* dan *syncratic* atau *syncratis*. Menurut Anthonio Gramsci *ideology* merupakan kerangka atau paradigma analisis untuk memahami dan menyelesaikan masalah. Sedangkan *syncratic* merupakan gabungan atau perpaduan dari berbagai macam hal baik yang ada. Idiosinkratik dapat digunakan sebagai analisa politik luar negeri suatu negara bila pengaruh yang dihasilkan oleh seorang individu dalam pembuatan kebijakan tersebut terpusat dan dominan.¹⁴

Berikut uraian terkait peran dan pengaruh Presiden Rodrigo Duterte yang “*determinant*” dalam kebijakan *war on drugs* yang dipengaruhi oleh faktor idiosinkratik sehingga membentuk pribadi Rodrigo Duterte saat ini serta persepsi ancaman yang timbul dari dirinya dan mempengaruhi proses kebijakan *War on Drugs* guna menanggulangi *Global Drugs Trafficking* yang terjadi di Filipina.

1. Nilai (*value*) – dalam nilai atau *value* Rodrigo Duterte sangat menjunjung rasa nasionalisme, rasionalitas, dan menjunjung tinggi nilai kebenaran. Dalam pembentukan kebijakan *War on Dugs* yang didukung oleh nilai nasionalisme yang dimiliki oleh Duterte yakni bertujuan untuk melindungi negara Filipina yang ia pimpin dari tindak kejahatan karena ia merasa sangat mencintai tanah airnya dan tidak ingin masyarakat Filipina menjadi bagian dari tindak penyalahgunaan narkotika yang dapat menimbulkan tindak kejahatan lainnya sehingga mengangu keamanan negara dan merugikan banyak pihak lainnya.
2. Kepribadian (*Personality of Leader*) – dalam kepribadian khususnya dalam memimpin Rodrigo Duterte terkenal memiliki kepribadian yang keras dan berani dalam mengambil keputusan dan bertindak.

¹⁴ Graham T Alinson *Loc.Cit.*

Kepribadian ini terbukti dalam kebijakan yang diterapkan olehnya. Kebijakan *War on Drugs* merupakan salah satu bukti keberanian Rodrigo Duterte dalam mengambil keputusan dimana dalam kebijakan ini Duterte menyatakan dengan tegas perang terhadap narkoba perlu dilakukan secara nyata dengan menembak mati segala tindak *illegal Drugs* dan *Illegal Used*. Berdasarkan pemaparan dan penjelasan mengenai keperibadian Presiden Rodrigo Duterte hal yang sangat mendominasi dalam pembentukan kebijakan *War on Drugs* guna menanggulangi *global drugs trafficking* adalah keperibadian yang keras dan tegas sehingga membuat kebijakan *war on drugs* bersifat tegas dalam penerapannya.

3. Pengalaman (*experience*) – Rodrigo Duterte merupakan orang yang telah lama berada dalam dunia politik dan memiliki berbagai pengalaman terutama dalam menjadi pemimpin masyarakat Filipina. Pengalaman dalam berpolitik Rodrigo Duterte bermula dari latar belakang pendidikan politik yang pernah ditempuh tepatnya di *Lyceum of the Philippines University* serta melanjutkan kuliah jurusan hukum di *San Beda College Law* dan lulus pada tahun 1970.¹⁵ Setelah menyelesaikan pendidikan politiknya Duterte mulai terjun ke dunia politik dan memiliki karir politik yang panjang yakni Duterte pernah menjadi Wali Kota Davao selama 22 tahun, Wakil Wali Kota, dan menjadi Anggota Dewan.¹⁶ Pengalaman yang banyak bersentuhan dengan kepentingan masyarakat Filipina membuat Duterte menjadi mudah dalam memahami pemikiran masyarakat dan mengetahui secara persis bagaimana kondisi yang terjadi di Filipina serta membuatnya paham bagaimana cara yang tepat dalam mengambil keputusan guna memenuhi kepentingan dan kebutuhan rakyat Filipina.
4. Bakat (*talent*) – Bakat atau *talent* yang terlihat jelas dalam pribadi Rodrigo Duterte adalah bakat manajemen politik dan kepemimpinan dalam bidang politik. Bakat yang dimiliki olehnya ini tidak semata mata

¹⁵ Biography,2016, Rodrigo Duterte Biography dalam <https://www.biography.com/people/rodrigo-duterte-102616> diakses 02 desember 2018.

¹⁶ *Ibid.*

dimiliki begitu saja, bakat ini dipengaruhi oleh lingkungan anggota keluarga Rodrigo Duterte dimana sebagian besar keluarga terjun dalam dunia politik.¹⁷ Hal tersebut membuat Duterte terbiasa melihat berbagai macam cara dalam berpolitik. Berdasarkan bakat yang dimilikinya membuat Rodrigo Duterte pandai dalam memimipin dan yakin dalam setiap memutuskan kebijakan kebijakannya.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti Rodrigo Duterte mempresepsikan penyalahgunaan narkotika seperti penggunaan, penjualan, pengedaran dan *global drugs trafficking* merupakan sebagai bagian dari ancaman. Dimana menurutnya tindak penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan tindak kejahatan lain dan merusak generasi penerus dalam bangsa sehingga perlu ada tindakan tegas untuk menghentikan tindak penyalahgunaan sekalipun hukuman yang diberikan adalah hukuman mati. Karena menurutnya tidakan ini tidak dapat ditoleransi dan harus dihentikan bagaimana pun caranya. Dalam penerapan kebijakan *War on Drugs* Presiden Rodrigi Duterte rutin melakukan operasi penangkapan kepada para pelaku penyalahgunaan narkotika dengan memerintah PDEA dan petugas kemanan terkait.

Kesimpulan

Peneliti menyimpulkan bahwa tindak *global drugs trafficking*, *drugs use*, dan *drugs abuse* merupakan landasan dasar dan merupakan persepsi ancaman bagi Presiden Rodrigo Duterte sehingga melahirkan kebijakan *War on Drugs* dalam menanggulangi permasalahan tersebut. Dalam pelaksanaan kebijakan ini faktor idiosingkratik pemimpin yakni Rodrigo Duterte mendominasi pembentukan kebijakan *War on Drugs* sehingga kebijakan yang lahir bersifat tegas, tujuan dari dilahirkan kebijakan yang bersifat tegas ini adalah untuk menghentikan segala bentuk tindak penyalahgunaan narkotika di Filipina dan berlaku untuk semua kalangan baik muda, tua, warga negara Filipina, bahkan warga negara asing.

Penelitian ini hanya berfokus kepada kebijakan *War on Drugs* Presiden

¹⁷ Now This World dalam YouTube, *Op.cit* diakses 1 april 2019.

Rodrigo Duterte dalam menanggulangi *global drugs trafficking* di Filipina pada tahun 2016-2018 dengan melihat dominasi pemimpin melalui faktor idiosinkratik yang dimiliki Presiden Rodrigo Duterte. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian lebih lanjut yang mampu menjelaskan lebih mendalam bagaimana kebijakan ini berpengaruh dengan melihat faktor-faktor lainnya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau pembuka jalan bagi peneliti yang akan datang dalam membahas lebih lanjut mengenai kebijakan yang berkaitan dengan *global drugs trafficking*. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, penulis dapat memberikan saran bahwa perlu adanya pertimbangan yang lebih matang dalam menjalankan kebijakan *War on Drugs* mengingat banyak terjadi pembunuhan yang dilakukan tanpa adanya peradilan terlebih dahulu kepada para tersangka dan pelaku penyalahgunaan narkoba.

Daftar Pustaka

Buku:

- Allison T, Graham, and Phillip Zelikow, 1999, *Essence of Decision : Explaining The Cuban Missile Crisis*. Addison-Wesley Educational Publishers Inc.
- G, Potter, 2006, “*Transnational Organized Crime.*” In *The Encyclopedia of Police Science*, ed. J. Greene, New York, London: Routledge.
- J. Kirk & Miller, M.L. 1986. *Reliability and Validity in Qualitative Research*. Beverly Hills: Sage Publications.
- Jaffe M.D, Jerome H, 1995, *Encyclopedia of Drug And Alcohol*, Vol.I-IV, Macmillan Library Reference USA, New York, Simon and Schuster Macmillan.

Laporan

PDEA, 2016, *Annual report 2016 “the Philippine drugs situation”*

Sumber (Online):

- Biography, 2016, *Rodrigo Duterte Biography* dalam <https://www.biography.com/people/rodrigo-duterte-102616>.
- Now This World dalam YouTube, 2018, *The Rise of the Philippines' Rodrigo Duterte* NowThis World dalam <https://www.youtube.com/watch?v=ZKBzdN3jUho>
- PDEA, 2013, “*2013 Philippines Drugs Situations*”, dalam <http://pdea.gov.ph/images/AnnualReport/2013AR/2013thephilippinedrugsituation.pdf>

PDEA, 2017, “3 *International Drug Rings Are Biggest Source Of Shabu in PH: PDEA*” dalam <http://pdea.gov.ph/2-uncategorised/512-3-international-drug-rings-are-biggest-source-of-shabu-in-ph-pdea>, diakses

Peran Unicef Dalam Menangani Anak-Anak Korban Perang Sipil Di Suriah Tahun 2012-2018

Aditya Indra Sakti¹

¹ Hubungan Internasional, Universitas Lampung
adityaindrasakti96@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran UNICEF dalam menangani anak-anak korban perang sipil yang terjadi di Suriah tahun 2012-2018. Perang sipil Suriah sendiri memiliki akar permasalahan pada konflik antara kelompok pendukung Pemerintahan Presiden Bashar Al-Assad dengan kelompok anti Pemerintahan Bashar al-Assad. Konflik bermula ketika rakyat Suriah menginginkan reformasi tata kelola Pemerintahan yang lebih demokratis. Konflik bertambah pelik ketika negara-negara lain ikut dalam pusara konflik, contohnya Amerika Serikat (AS) yang mendukung kelompok anti Pemerintah dan Rusia yang mendukung kelompok pro Pemerintah. Penelitian ini menggunakan teori peran, konsep organisasi internasional, dan konsep *human rights* (hak anak) yang digunakan sebagai kerangka analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi dokumentasi. Penelitian ini menemukan bahwa peran UNICEF di Suriah adalah menjadi aktor independen. UNICEF berperan sebagai inisiator, fasilitator, mediator/rekonsiliator, dan determinator dalam perang sipil di Suriah. UNICEF menjalankan program kerja lintas-sektor di antaranya perlindungan anak, pendidikan, air, sanitasi dan kebersihan, kesehatan dan nutrisi, kebijakan sosial, serta pengembangan dan partisipasi remaja. Program-program tersebut tidak berjalan lancar, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh UNICEF yakni risiko keamanan, akses ke wilayah yang sulit dijangkau dan terkepung, serta kekurangan pendanaan. Peran UNICEF dalam perang sipil di Suriah tahun 2012-2018 telah berimplikasi terhadap kehidupan jutaan anak di negara tersebut.

Pendahuluan

Suatu negara yang berdaulat tentu tidak terlepas dari terjadinya konflik. Konflik secara etimologi berasal dari bahasa latin '*configure*' yang memiliki arti dua pihak atau lebih saling menyerang, saling menyakiti, bahkan bisa saling menghabisi pihak lawannya.¹¹ Konflik merupakan hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki maupun yang merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak

¹¹ Azar E. E. 1990. "*The Management of Protracted Social Conflict: Theory and Cases*". Michigan: Dartmouth. Hal. 9.

sejalan dengan sebagaimana mestinya dan seringkali konflik diselesaikan dengan jalan kekerasan.²² Dalam pendekatan konflik bersenjata dapat diklasifikasi menjadi dua yaitu: konflik internal (*intrastate conflict*) yang terjadi dalam negara, aktor yang terlibat biasanya Pemerintah, kelompok pemberontak atau oposisi, kelompok separatis, maupun kelompok radikal; dan konflik eksternal (*interstate conflict*) yang terjadi antar negara, aktor yang terlibat sudah pasti negara maupun kelompok radikal.

Konflik internal lebih sering terjadi dalam perkembangan daripada konflik eksternal. Konflik internal dilatarbelakangi beberapa faktor yaitu politik, ekonomi, lingkungan, serta perbedaan identitas. Suatu negara berdaulat yang terjadi konflik internal di dalamnya harus dapat menyelesaikan konflik tersebut sebelum berakhir dengan perang atau kontak senjata. Pada Perang Dunia I dan II, tatanan dunia kala itu memberikan pandangan pada perang antar negara dan blok dunia dengan masing-masing kepentingannya. Perang sipil dapat dikatakan sebagai perkembangan perang yang ketiga setelah Perang Dunia I dan II. Jika suatu negara atau pemerintah tidak dapat menyelesaikan secara damai konflik internal yang melanda negaranya maka perang sipil tidak dapat dihindarkan, terlebih adanya negara lain yang mengintervensi dengan ikut terlibat dalam perang.

Pemerintah melalui angkatan bersenjatanya terkadang turun langsung melawan kelompok sipil. Konflik internal yang berakhir dengan perang yang pernah terjadi salah satunya perang sipil di Suriah antara kelompok pro Pemerintah Presiden Bashar al-Assad yang didukung Pemerintah dan angkatan bersenjatanya, Rusia, Iran, serta Hizbullah Lebanon dengan kelompok oposisi penentang Presiden Bashar al-Assad yang didukung oleh kelompok Kurdi, Amerika Serikat, Arab Saudi, maupun Turki. Sejak berkecamuknya perang sipil di Suriah pada tahun 2011 setidaknya telah mengakibatkan lebih dari 367.965 orang tewas, angka tersebut belum termasuk 192.035 lebih orang yang hilang dan diperkirakan tewas.³³ Suriah merupakan salah satu negara yang mengalami konflik internal dan meningkat menjadi perang sipil hingga saat ini. Perang sipil di Suriah berawal dari konflik

²² Miall Hugh, Oliver Ramsbotham & Tom Woodhouse. 1999. *Contemporary Conflict Resolution. Chapter 1: Introduction*. Cambridge: Polity Press. Hal. 21-22.

³³ "Why Is There A War in Syria?", diakses dari <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-35806229> pada 1 Mei 2019.

internal biasa, pemicunya yaitu fenomena Kebangkitan Dunia Arab atau *Arab Spring*. Bagaikan efek domino, hal tersebut menumbuhkan semangat juang beberapa Bangsa Arab untuk melakukan revolusi termasuk Suriah. Gelombang aksi demonstrasi di Suriah diawali dengan adanya aksi pencoretan dinding-dinding sekolah oleh sekelompok pelajar untuk memprotes Pemerintah Presiden Bashar al-Assad.

Pemerintah Suriah merespon aksi tersebut dengan penangkapan dan penyiksaan sekelompok pelajar oleh pihak kepolisian. Masyarakat Suriah yang mengetahui kabar itu lalu menyerukan aksi di Ibukota Damaskus untuk menurunkan Presiden Bashar al-Assad yang terbilang otoriter. Aksi-aksi susulan di berbagai daerah Suriah pun terjadi, semuanya meminta Presiden Bashar al-Assad turun dari jabatannya. Presiden Bashar sendiri telah berkuasa sejak tahun 2000 menggantikan presiden sebelumnya yang juga ayahnya Hafez al-Assad. Bashar al-Assad sendiri berasal dari kalangan keluarga Syiah Alawiyah yang bertolak belakang dengan mayoritas penduduk Suriah yang menganut Islam Sunni. Menurut *CIA World Fact Book*, 87% warga Suriah adalah Muslim, mayoritas adalah Muslim Sunni (74%), Muslim Syiah (13%), selanjutnya yang mengikuti aliran Alawiyah (11%), Ismaili (1%), dan Twelver Imami (1%). Umat Kristen membentuk 10% tambahan dari populasi dengan 3% sisanya merupakan kombinasi dari Druze, Yahudi, dan Atheis.⁴⁴

Menurut *Syrian Observatory for Human Rights*, sampai Desember 2018, sebanyak 367.965 orang tewas terbunuh dan 192.035 orang hilang (diduga tewas). Perang juga telah menyebabkan sekitar 1,5 juta orang cacat permanen, bahkan 86.000 orang kehilangan anggota tubuh. Setidaknya 6,2 juta warga Suriah mengungsi secara internal di dalam negeri, sementara 5,7 juta warga lain telah melarikan diri ke luar negeri.

Negara-negara tetangga seperti Lebanon, Yordania, dan Turki menampung 93% dari warga Suriah yang mengungsi ke luar negeri tersebut.⁵⁵ Melihat banyaknya warga Suriah yang menjadi korban, negara-negara melalui *International Governmental Organization* (IGO) memberikan bantuan baik dalam

⁴ “*Syrian Culture: Religion*”, diakses dari <https://culturalatlas.sbs.com.au/syrian-culture/syrian-culture-religion#syrian-culture-religion> pada 2 Mei 2019.

⁵ *Ibid.*

bentuk moril maupun materiil. *United Nations Children's Fund* (UNICEF) di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan IGO yang fokus menangani korban perang pada kalangan anak-anak.

UNICEF mulai didirikan pada tanggal 11 Desember 1946 oleh Majelis Umum PBB yang bertujuan memberikan bantuan makanan dan kesehatan darurat di negara-negara yang terkena dampak Perang Dunia II pada saat itu. Namun pada tahun 1953, tujuan UNICEF diperluas dalam menangani kebutuhan anak-anak di negara berkembang. UNICEF bekerja di 190 negara dan wilayah untuk menyelamatkan nyawa anak-anak, membela hak-hak anak, dan membantu anak-anak memenuhi potensinya dari masa kanak-kanak hingga remaja.⁶⁶ UNICEF berkomitmen untuk terus menjaga keberlangsungan hidup anak-anak di dunia dengan berperan aktif pada setiap isu-isu internasional. Dalam pendanaannya, UNICEF turut didanai oleh Pemerintah negara-negara anggota dan sukarela pihak swasta maupun perorangan.

Situasi di Republik Arab Suriah tetap menjadi salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Sekitar 13,1 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan, termasuk 6,2 juta orang yang terlantar secara internal. Anak-anak termasuk yang tidak didampingi, dipisahkan, atau hidup dengan pengasuh yang lebih tua/cacat tetap sangat rentan. Berdasarkan perkiraan 8,35 juta anak yang tinggal di Suriah, sebanyak 5,6 juta anak memerlukan bantuan kemanusiaan, dan 493.000 anak tinggal di daerah-daerah yang sulit dijangkau yang tidak dilayani oleh program lintas garis, lintas perbatasan, atau program regular. Lebih dari tiga juta anak di bawah usia lima tahun memerlukan dukungan nutrisi, termasuk hampir 20.000 anak yang menderita malnutrisi akut. Pelanggaran berat terhadap hak-hak anak dan pelanggaran hukum kemanusiaan internasional terus berlanjut, dengan anak-anak terbunuh dan terluka oleh penggunaan senjata peledak yang terus-menerus di daerah sipil atau perekrutan anak-anak oleh angkatan bersenjata maupun kelompok-kelompok pemberontak.⁷⁷ Konflik selama bertahun-tahun telah secara dramatis mengurangi akses ke layanan sosial dasar dengan 1,75 juta anak usia lima hingga 17 tahun putus sekolah dan 1,35 juta anak berisiko putus sekolah. Cakupan

⁶⁶ UNICEF: "What We Do", diakses dari <https://www.unicef.org/what-we-do> pada 2 Mei 2019.

⁷⁷ "Humanitarian Action for Children: Syrian Arab Republic", diakses dari <https://www.unicef.org/appeals/syria.html> pada 3 Mei 2019.

imunisasi rutin nasional telah menurun dari 90% pada tahun 2010 menjadi 70% pada tahun 2017, memicu beberapa wabah termasuk polio dan campak. Sekitar 14,6 juta orang memerlukan akses ke air bersih, termasuk 7,6 juta orang yang mengalami tingkat kebutuhan kemanusiaan yang akut. Pengiriman bantuan kemanusiaan tetap sangat sulit karena ketidakamanan, pembatasan pergerakan dan hambatan yang disengaja dalam perang sipil, termasuk prosedur administrasi yang memberatkan.⁸ UNICEF berkomitmen untuk terus memberikan bantuan-bantuan yang dapat menyelamatkan kelangsungan hidup orang banyak khususnya anak-anak. Sejak tahun 2012, UNICEF turut masuk ke dalam perang sipil yang terjadi di Suriah.⁹ Ketika konflik semakin menyebar ke wilayah-wilayah terpencil, UNICEF berupaya menjangkau populasi yang terdampak.

Perang sipil yang terjadi selama bertahun-tahun menyebabkan krisis kemanusiaan yang amat parah. Anak-anak yang notabeneanya sedang melakukan kegiatan-kegiatan bermain untuk membentuk sikap dan perilakunya, namun harus merasakan trauma-trauma yang mendalam menyaksikan anggota keluarganya menjadi korban perang. Kondisi fisik dan psikologis anak-anak tersebut sangat terancam, anak-anak tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Hal ini merupakan suatu krisis kemanusiaan yang serius karena melanggar hak asasi terhadap anak-anak. Krisis kemanusiaan seperti konflik bersenjata, wabah, kelaparan, bencana alam, dan keadaan darurat lainnya menyebabkan terancamnya kemanusiaan yang melampaui kapasitas seorang manusia terbihi anak-anak. Banyak anak-anak seharusnya mendapatkan hak-hak dasar seperti pendidikan, tempat tinggal yang layak, kebutuhan konsumsi sehari-hari, air bersih, dan keamanan lingkungan. UNICEF sebagai organisasi yang bertugas melindungi kemanusiaan yang berfokus pada anak-anak melakukan upaya agar hak-hak dasar anak tersebut tetap terpenuhi.

Perhatian terhadap anak-anak sebagai korban perang masih terbilang jarang. Banyaknya bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh negara-negara atau organisasi internasional hanya diberikan untuk korban-korban secara umum.

⁸ *Ibid.*

⁹ “UNICEF Perlu Dana Miliaran Dollar untuk Bantu Puluhan Juta Anak”, diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/unicef-perlu-dana-miliaran-dollar-untuk-bantu-puluhan-juta-anak/1591941.html> pada 5 Agustus 2019.

Padahal anak-anak sebagai generasi penerus bangsa sangat berharga dan masih memiliki masa depan yang panjang. Kebutuhan anak-anak dapat dinilai berbeda dari kebutuhan orang dewasa, anak-anak seharusnya mendapat perlakuan yang khusus. Konvensi Hak-Hak Anak yang ditandatangani oleh PBB pada tahun 1989 juga telah mengatur pentingnya perlindungan terhadap hak anak-anak di bawah umur 18 tahun. Berdasarkan permasalahan tersebut, dalam penelitian ini penulis hendak menjawab pertanyaan: “Bagaimana Peran UNICEF dalam Menangani Anak-Anak Korban Perang Sipil di Suriah Tahun 2012- 2018?”

Landasan Konseptual

Peran merupakan suatu perpaduan dari teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi.¹⁰ Teori peran adalah teori yang berbicara tentang posisi dan perilaku aktor yang diharapkan daripadanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada maupun memiliki kaitan dengan adanya aktor-aktor lain yang berhubungan dengan aktor tersebut. Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya. Oleh karena itu, seorang aktor berusaha untuk selalu nampak “mumpuni” dan dipersepsikan oleh aktor lainnya sebagai “tak menyimpang” dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat.¹¹

Teori peran dalam Hubungan Internasional berkembang sejak tahun 1970 dalam *Foreign Policy Analysis* (FPA) untuk memastikan pola kelas negara-negara dalam struktur bipolar Perang Dingin. Dalam teori peran terdapat *role identity* yang dimaknai sebagai suatu hal yang subjektif. *Role identity* diterapkan kepada suatu aktor dengan menempati posisi dalam struktur sosial. Peranan merupakan posisi struktural yang dibedakan oleh *role identities*. Menurut Burke dan Reitzes, aktor harus merumuskan rencana serta melakukan kegiatan tertentu dalam batas-batas perannya yang dapat memperkuat, mendukung, dan mengkonfirmasi identitas.¹²

Lisa Martin dan Beth Simmons memaparkan empat peranan yang dilakukan

¹⁰ Sarwono, S. W. 2002. “*Teori-Teori Psikologi Sosial*”. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal. 215.

¹¹ Suhardono, Edy. 1994. “*Teori Peran (Konsep, Derivasi, dan Implikasinya)*”. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hal. 3.

¹² Harnisch, Sebastian et al. 2011. “*Role Theory in International Relations: Approaches and Analysis*”. New York: Routledge. Hal. 83.

oleh organisasi internasional, antara lain:¹³

1. Menegakkan norma, nilai, dan hasil yang disukai kepada para anggotanya.
2. Menentukan standar kesesuaian, penyebaran norma-norma internasional, dan
3. Memobilisasi berbagai mekanisme sosialisasi kelompok untuk membentuk perilaku anggota.
4. Meningkatkan kerja sama dengan menciptakan titik fokus untuk membantu dalam mengkoordinasikan perilaku anggota.
5. Mempengaruhi lingkungan informasi dengan menyebarkan informasi yang kredibel dan tidak memihak.

Kegunaan teori peran terhadap penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana peran yang dijalankan oleh UNICEF dalam perang sipil di Suriah tahun 2012-2018. Melalui teori ini dapat diketahui apakah identitas UNICEF sebagai organisasi internasional yang fokus terhadap kesejahteraan anak-anak sesuai dengan peran yang dijalankan.

Organisasi Internasional

Teuku May Rudy mendefinisikan organisasi internasional sebagai pola kerja sama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap. Organisasi internasional diharapkan/diproyeksikan untuk melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang disepakati bersama baik antara Pemerintah dengan Pemerintah maupun antara sesama kelompok di luar Pemerintah pada dasar negara yang berbeda. Sedangkan, menurut Clive Archer, terdapat beberapa indikator dalam organisasi internasional yaitu keanggotaan, tujuan, dan struktur. Keanggotaan berarti sebuah organisasi internasional harus mengisi keanggotaannya dari dua atau lebih negara berdaulat, meskipun keanggotaan tidak perlu terbatas pada negara atau perwakilan negara seperti menteri Pemerintah. Tujuan berarti organisasi tersebut didirikan dengan tujuan

¹³ Carlesnaes, Walter *et al.* 2013. "*Handbook of International Relations*". London: SAGE Publications. Hal. 336-339.

mengejar kepentingan umum anggota. Organisasi akan berakhir jika tidak melakukan tugas mendukung kepentingan satu anggota lebih, tetapi tidak boleh memiliki tujuan dengan mengikuti kepentingan hanya satu anggota, terlepas dari keinginan negara lain. Sedangkan, struktur artinya organisasi yang dimaksud harus memiliki struktur formal sendiri yang bersifat terus-menerus dan dibentuk oleh kesepakatan seperti perjanjian atau dokumen konstituen. Sifat struktur formal dapat bervariasi dari organisasi ke organisasi, tetapi harus terpisah dari kendali salah satu anggota.¹⁴

Pada dasarnya konsep organisasi internasional dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu:¹⁵

1. *Inter-Governmental Organization* (IGO) atau organisasi antar Pemerintah yang beranggotakan perwakilan resmi Pemerintah dari negara-negara. Contoh: Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan *World Trade Organization* (WTO).
2. *Non-Governmental Organization* (NGO) atau organisasi non-Pemerintah yang merupakan kelompok-kelompok swasta di bidang ekonomi, kebudayaan, lingkungan hidup dan sebagainya. Contoh: *World Wildlife Fund* (WWF), *World Vision*, *Care International* dan sebagainya.

Peranan organisasi internasional menurut Clive Archer dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu sebagai instrumen, sebagai arena, dan sebagai aktor independen.¹⁶ Organisasi internasional sebagai instrumen artinya digunakan untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan politik luar negerinya. Suatu instrumen menunjukkan tujuannya apabila memperlihatkan kegunaannya dalam periode tertentu. Biasanya terjadi pada IGO di mana anggota-anggotanya merupakan negara-negara berdaulat yang dapat membatasi tindakan-tindakan sebuah organisasi internasional.

Sebagai arena berarti organisasi internasional digunakan sebagai tempat bertemu anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah-masalah yang dihadapi. Organisasi internasional menyediakan tempat atau forum pertemuan bagi para anggota untuk berdiskusi, berdebat, dan bekerja sama.

¹⁴ Archer, Clive. 2001. "*International Organization 3rd Edition*". London: Routledge. Hal. 33-34.

¹⁵ Bennet, A. Le Roy. 1997. "*International Organizations: Principles and Issues*". New Jersey: Prentice Hall Inc. Hal. 2-4.

¹⁶ Archer, *Op. Cit.* Hal. 68-79.

Organisasi internasional memberikan kesempatan lebih kepada anggotanya untuk menyampaikan dan meningkatkan pandangannya terhadap forum politik. Kesempatan tersebut tidak dapat diperoleh dalam hubungan bilateral.

Sedangkan, sebagai aktor independen, organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi. Sejak tahun 1960-an terdapat bukti-bukti bahwa sejumlah entitas termasuk organisasi internasional dapat mempengaruhi kejadian-kejadian di dunia. Organisasi internasional dalam hal ini bersifat mandiri dan bertindak sesuai dengan kemauannya sendiri.

Berdasarkan kategori tersebut, eksplorasi dan analisis yang dilakukan oleh organisasi internasional akan menampilkan sejumlah peranannya yaitu sebagai inisiator, fasilitator, mediator, rekonsiliator, dan determinator.¹⁷ Organisasi internasional juga berperan penting dalam mengimplementasikan, memonitor, dan menengahi perselisihan yang timbul dari adanya keputusan-keputusan yang dibuat oleh negara- negara.¹⁸

Konsep organisasi internasional dalam penelitian ini berguna untuk menganalisis bagaimana UNICEF melakukan atau menjalankan perannya. Melalui konsep ini juga dapat diketahui peran UNICEF menjadi aktor yang independen dalam perang sipil di Suriah tahun 2012-2018 dan klasifikasi UNICEF sebagai IGO atau organisasi antar Pemerintah yang keanggotaannya umum tetapi tujuannya terbatas. UNICEF merupakan sebuah bentuk perpanjangan tangan PBB untuk mengurus permasalahan terkait anak-anak maupun ibunya.

Human Rights

John Locke menjelaskan bahwa *Human Rights* atau Hak Asasi Manusia (HAM) adalah sesuatu yang diberikan langsung oleh Tuhan yang sifatnya kodrati. Artinya hak ini melekat dan tidak dapat terlepas dari dan dalam kehidupan manusia. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak tersebut sangat mendasar atau fundamental bagi hidup dan kehidupan manusia. *Human Rights* atau HAM merupakan hak yang dimiliki manusia yang telah

¹⁷ Situmorang dalam Andre Pareira. 1999. "Perubahan Global dan Perkembangan Studi

¹⁸ Hubungan Internasional". Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 135.

diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat.¹⁹ Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, dan agama atau kelamin karena itu bersifat asasi serta universal. Dasar dari semua hak asasi ialah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.

Setelah dunia mengalami dua perang yang melibatkan hampir seluruh negara dan di mana hak-hak asasi diinjak-injak, timbul keinginan untuk merumuskan hak-hak asasi manusia itu dalam suatu naskah internasional. Usaha ini pada tahun 1948 berhasil dengan diterimanya *Universal Declaration of Human Right* (pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi manusia) oleh negara-negara yang tergabung dalam PBB.²⁰ Setiap pelanggaran terhadap HAM mulai dari generasi pertama sampai ketiga selalu melibatkan peran Pemerintah yang biasa dikategorikan sebagai *crime by Government* yang termasuk ke dalam pengertian *political crime* (kejahatan politik) sebagai lawan dari pengertian *crime against Government* (kejahatan terhadap kekuasaan resmi). Karena itu, yang selalu dijadikan sasaran perjuangan HAM adalah kekuasaan represif negara terhadap rakyatnya. Akan tetapi, dalam perkembangan zaman sekarang dan di masa-masa mendatang, sebagaimana diuraikan di atas dimensi-dimensi HAM itu akan berubah makin kompleks sifatnya.

Hak Anak

Perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak telah diatur dalam hukum atau instrumen internasional. Konvensi Hak Anak (KHA) adalah dasar hukum perlindungan anak-anak di dunia. KHA bersifat mengikat secara yuridis dan politis yang menguraikan hak dasar manusia bagi setiap anak yang di dalamnya mencakup hak atas kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk memperoleh perlindungan, dan hak berpartisipasi.

Sesuai dengan pasal-pasal yang tercantum dalam 54 pasal KHA, terdapat enam kategori anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Kategori-kategori tersebut adalah sebagai berikut:²¹

¹⁹ Masyhur A. Effendi. 1994. "*Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*". Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal. 3.

²⁰ Budiardjo, Miriam. 1996. "*Dasar-Dasar Ilmu Politik*". Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hal. 120.

²¹ *Ibid.* Hal. 52.

1. Anak yang dipekerjakan atau anak yang terpaksa bekerja – terdapat 1,6 juta anak usia 10-14 tahun yang bekerja selama 35 jam setiap minggu. Angka tersebut sangat signifikan dengan meningkatnya angka putus sekolah di tingkat Sekolah Dasar.
2. Anak jalanan, dari tahun ke tahun jumlah anak yang turun ke jalanan semakin bertambah. Perhatian khusus diberikan kepada anak jalanan perempuan yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual.
3. Anak yang dieksploitasi secara seksual. Kurang lebih 30% pekerja seksual komersial adalah anak-anak di bawah umur. Pengiriman ke luar negeri (*trafficking*) semakin merajalela tetapi belum ada tindakan yang memadai. Anak-anak ini rentan HIV/AIDS maupun kekerasan fisik.
4. Perlakuan salah terhadap anak. Tindak kekerasan maupun perlakuan salah terhadap anak merupakan sesuatu yang terselubung karena seperti juga kekerasan terhadap perempuan (istri) dianggap sebagai masalah domestik yang tabu untuk diungkap. Kekerasan fisik, seksual, emosional, dan psikologik yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya dianggap sebagai hak orang tua. Anak yang dipekerjakan sebagai pelacur oleh orang tuanya dianggap sebagai sesuatu yang harus dilakukan untuk menyelamatkan ekonomi keluarga.
5. Anak yang mengalami konflik dengan hukum. Undang-Undang Peradilan Anak masih belum cukup kuat untuk melindungi anak karena sosialisasi dan implementasi yang sangat lambat. Tidak ada lembaga masyarakat yang memenuhi syarat bagi anak sehingga anak yang harus menjalani hukuman ditempatkan bersama para narapidana dewasa.
6. Anak dalam konflik bersenjata. Terjadinya gejolak politik dan militer di berbagai negara mengakibatkan puluhan ribu anak kehilangan orang tua, keluarga, dan masa depannya. Anak-anak terpaksa tinggal di pengungsian tanpa kepastian kembali hidup normal sebagai anak-anak.

Kegunaan konsep *human rights* atau hak anak terhadap penelitian ini adalah untuk menganalisis pelanggaran-pelanggaran hak anak yang terjadi pada perang sipil di Suriah tahun 2012-2018. Melalui konsep ini diketahui bahwa anak-anak dalam konflik bersenjata memerlukan perlindungan dari masyarakat internasional.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tipe penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menganalisis status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuannya adalah untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diteliti.²² Menurut Norman Denzin dan Yvona Lincoln, pendekatan kualitatif dilakukan dengan menekankan pada penafsiran hubungan yang interaktif antara teori dengan penelitian.²³ Penelitian ini mencoba menganalisis peristiwa yang masih baru terjadi dengan mengumpulkan informasi-informasi yang ada dan dihubungkan dengan teori atau konsep terkait, selanjutnya dipaparkan dalam bentuk teks atau tidak berupa angka.

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada.²⁴

Sumber data penelitian ini diperoleh dari beberapa literatur seperti proquest, laporan situasi yang dikeluarkan oleh UNICEF, dan beberapa artikel surat kabar atau situs berita. Sebagian besar sumber data pada penelitian ini didapatkan melalui situs resmi UNICEF (www.unicef.org) dalam bentuk jurnal, publikasi, dan laporan situasi atau *situation report* perang sipil Suriah tahun 2012-2018.

Pembahasan

Banyaknya pelanggaran yang terjadi dalam perang sipil di Suriah khususnya terhadap anak-anak memaksa UNICEF berupaya untuk memprioritaskan segala sesuatu yang menyangkut kehidupan anak-anak Suriah. Berdasarkan teori peran, UNICEF membuat program-program yang sejalan dengan tugas atau mandat yang telah ditetapkan untuk memperkuat, mendukung, dan mengkonfirmasi identitasnya. UNICEF mengambil peranan sebagai aktor yang independen di Suriah sesuai dengan konsep Organisasi Internasional. Pada perang

²² Nazir, M. 1988. "Metode Penelitian". Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal. 63.

²³ Corbetta, Piergiorgi. 2003. "Social Research: Theory, Methods, and Technique". London: SAGE Publications. Hal. 48.

²⁴ Hasan, M. Iqbal. 2002. "Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya". Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal. 58.

sipil di Suriah, UNICEF berperan sebagai inisiator, fasilitator, mediator/rekonsiliator, dan determinator. UNICEF sebagai inisiator berperan dalam memprakarsai kerja sama dengan pemerintah dan non-pemerintah seperti negara-negara lain maupun organisasi- organisasi lain untuk menyelamatkan atau mencari solusi terkait permasalahan anak-anak Suriah. UNICEF sebagai fasilitator berperan dalam menyediakan perlindungan dan bantuan yang dapat memenuhi kebutuhan anak-anak Suriah. Peran UNICEF sebagai mediator/rekonsiliator adalah dengan menengahi pihak-pihak yang terlibat dalam perang sipil di Suriah. Sedangkan sebagai determinator, UNICEF berperan dalam memastikan atau menjamin masa depan anak-anak Suriah dapat menjadi lebih baik.

Dalam perang sipil di Suriah, UNICEF menerapkan program-program reguler untuk memenuhi hak anak-anak di negara itu. Situasi dan kondisi di Suriah tidak sama dengan negara-negara lain, perang sipil selama bertahun-tahun telah berdampak pada kemerosotan di berbagai sektor. Diperlukan program-program yang dapat memulihkan keadaan dan menjamin masa depan yang lebih baik. UNICEF tidak hanya mengutamakan program-program jangka pendek selama perang sipil, namun juga memperhatikan standar jangka panjang pada anak-anak Suriah. Lembaga kemanusiaan ini memiliki target-target pada setiap program yang diterapkannya. Setiap tahun UNICEF selalu melakukan evaluasi demi mencapai keberhasilan dalam penanganan anak-anak Suriah. UNICEF menjalankan beberapa program di Suriah seperti perlindungan anak, pendidikan, air, sanitasi dan kebersihan, kesehatan dan nutrisi, pengembangan dan partisipasi remaja, serta kebijakan sosial.

UNICEF sebagai Inisiator

UNICEF berperan sebagai inisiator dengan menjalankan Program Kesehatan dan Nutrisi dalam perang sipil di Suriah selama tahun 2012-2018. Melalui program kesehatan dan nutrisi, UNICEF bekerja untuk memastikan ketersediaan layanan kesehatan dan gizi darurat bagi anak-anak maupun ibunya. UNICEF bersama mitra memperluas ketersediaan intervensi utama dalam perawatan kesehatan primer yang komprehensif dengan perhatian khusus pada wilayah yang paling rentan. Intervensi imunisasi rutin juga dilakukan oleh UNICEF untuk jangka panjang. UNICEF

mencegah kekurangan gizi dan mengupayakan perkembangan anak yang optimal dengan pendekatan masyarakat dan fasilitas pusat layanan. UNICEF juga meningkatkan kapasitas petugas kesehatan garis depan. Rantai pasokan vaksin dan komoditas penting dalam nutrisi disediakan oleh UNICEF sebagai pembangunan jangka panjang yang nantinya akan melibatkan Pemerintah.

UNICEF sebagai Fasilitator

UNICEF berperan sebagai fasilitator dengan menjalankan Program Pendidikan, Air, Sanitasi dan Kebersihan, serta Kebijakan Sosial dalam perang sipil di Suriah selama tahun 2012-2018. UNICEF mendukung jutaan anak yang kehilangan pendidikan dikarenakan perang sipil berkepanjangan. Peran utama UNICEF adalah meningkatkan keahlian dan sumber daya manusia melalui pembangunan kapasitas dan fungsionalitas sistem pendidikan nasional. UNICEF berupaya memperbaiki akses dan kualitas pendidikan sebagai investasi masa depan Suriah. Kegiatan UNICEF dalam sektor pendidikan seperti rehabilitasi sekolah, pelatihan guru, program pembelajaran yang dipercepat (kurikulum B) untuk mengejar ketertinggalan. UNICEF menjangkau anak-anak yang tidak memiliki akses ke pendidikan formal dengan program belajar mandiri. UNICEF juga menyediakan bahan-bahan belajar untuk anak-anak yang kurang mampu.

UNICEF fokus pada populasi yang terkena dampak di Suriah untuk memastikan anak-anak yang paling rentan dapat menerima bantuan air, sanitasi, dan kebersihan yang tepat sasaran. Situasi krisis Suriah telah menyebabkan sarana dan prasarana air, sanitasi, serta kebersihan sulit dijangkau anak-anak. Kualitas dan kuantitas air, sanitasi, serta kebersihan mengalami penurunan. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak-anak. Anak-anak menjadi rentan terkena penyakit dan terinfeksi kuman, bakteri, atau virus. UNICEF melakukan proyek-proyek transisi untuk investasi jangka panjang di Suriah seperti penyediaan air bersih, teknologi pengolahan air limbah, dan konstruksi lahan basah. UNICEF juga menerapkan pendidikan kebersihan di sekolah yang berfokus pada penyediaan air bersih, mencuci tangan, manajemen kebersihan menstruasi, persiapan makanan, dan mengelola risiko produk irigasi yang terkontaminasi.

UNICEF bekerja untuk memperkuat sistem dan kapasitas nasional untuk

mengurangi kemiskinan anak melalui peningkatan perlindungan sosial yang berfokus pada anak. Program kebijakan sosial bertujuan untuk mendukung anak-anak mencapai semua potensinya. UNICEF bersama mitra-mitranya menyediakan bantuan tunai dan layanan manajemen kasus dalam respon tanggap darurat. UNICEF dan mitra mendistribusikan barang bukan makanan atau *Non Food Items* (NFI) seperti pakaian musim dingin, musim panas, dan voucher elektronik. UNICEF melakukan intervensi sistem perlindungan sosial dan layanan sosial Suriah yang lebih baik. Intervensi perlindungan sosial tersebut melalui dukungan teknis, advokasi, dan survei-survei yang berfokus pada anak-anak. Sedangkan intervensi layanan sosial tersebut melalui dukungan teknis untuk uji coba model layanan sosial terpadu termasuk dukungan untuk membangun tenaga kerja sosial.

UNICEF sebagai Mediator/Rekonsiliator

UNICEF berperan sebagai mediator/rekonsiliator dengan menjalankan Program Perlindungan Anak dalam perang sipil di Suriah selama tahun 2012-2018. Melalui program perlindungan anak, UNICEF melindungi anak-anak dari segala bentuk tindakan kekerasan. Perang sipil yang berlarut-larut menjadikan anak-anak rentan diperlakukan secara tidak manusiawi. UNICEF selalu menyerukan agar pihak-pihak yang terlibat dalam perang sipil di Suriah menghentikan peperangan. Anak-anak membutuhkan bantuan kemanusiaan dan perlindungan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dialaminya. UNICEF terus menambah utusan-utusannya dalam upaya menjangkau setiap anak di seluruh wilayah. UNICEF melakukan advokasi terhadap kebijakan-kebijakan yang ramah anak. UNICEF juga memberi dukungan psikososial, pengasuhan berkelanjutan, pendidikan risiko bahaya ranjau, intervensi perubahan perilaku, layanan perlindungan, dan manajemen kasus. Pendekatan yang dilakukan oleh UNICEF adalah dengan berdialog dan pemantauan.

UNICEF sebagai Determinator

UNICEF berperan sebagai determinator dengan menjalankan Program Pengembangan dan Partisipasi Remaja dalam perang sipil di Suriah selama tahun 2012-2018. Melalui program pengembangan dan partisipasi remaja, UNICEF

mengadvokasi suara remaja di Suriah dengan memastikan setiap remaja mendapatkan akses layanan dan peluang serta kemitraan. UNICEF melakukan intervensi dalam peningkatan kapasitas remaja melalui peluang yang partisipatif termasuk inisiatif-inisiatif yang dicetuskan kaum muda, olahraga untuk pembangunan, keterlibatan digital, penelitian tindakan partisipatif, serta pendanaan awal kewirausahaan dan pendampingan. UNICEF juga meningkatkan pengetahuan remaja tentang hak-haknya melalui pendidikan dan pelatihan teknis kejuruan yang berbasis masyarakat, bimbingan kewarganegaraan, pelatihan keterampilan hidup, dan pendidikan kesehatan. Remaja-remaja Suriah dilibatkan sebagai mitra di kantor regional UNICEF untuk mengumpulkan data kebutuhan anak-anak dan mengembangkan program-program UNICEF.

Hambatan yang Dihadapi UNICEF di Suriah

UNICEF mengambil peran yang sangat penting dalam perang sipil yang terjadi di Suriah. Kehidupan jutaan anak-anak Suriah bergantung dari bantuan-bantuan yang disediakan oleh UNICEF. Untuk melindungi jutaan anak-anak tersebut, UNICEF menerapkan program-program strategis yang dapat menyelamatkan jiwa. Perang sipil yang terjadi sejak tahun 2011 sampai sekarang telah meningkatkan kebutuhan anak-anak. Kebutuhan-kebutuhan yang paling penting seperti makanan, air, obat-obatan, nutrisi, pakaian, dan tempat tinggal harus tetap tersedia. Dalam menjalankan tugasnya, UNICEF menghadapi berbagai macam hambatan di Suriah. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh UNICEF seperti risiko keamanan, akses ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau dan terkepung, serta kekurangan pendanaan.

Petugas atau perwakilan UNICEF di Suriah menghadapi risiko keamanan yang besar mengingat perang sipil Suriah adalah perang yang sangat kompleks. Pihak-pihak yang terlibat dalam perang sipil Suriah sewaktu-waktu dapat membahayakan keselamatan petugas atau perwakilan UNICEF ketika sedang menjalankan tugas. Dalam kondisi yang tidak kondusif, petugas dapat menjadi korban dan mengalami penangkapan, penahanan, maupun penyiksaan. Petugas atau perwakilan UNICEF terhambat oleh akses ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau dan terkepung. Banyaknya rute-rute yang rusak ke wilayah-wilayah terpencil

membuat petugas atau perwakilan UNICEF di Suriah mengalami kesulitan dalam menjangkau anak-anak yang membutuhkan bantuan. Di wilayah-wilayah yang terkepung, akses masuknya dijaga oleh tentara-tentara yang terlibat dalam perang. Petugas atau perwakilan UNICEF dilarang untuk memasuki wilayah tersebut.

Hambatan paling krusial yang dihadapi oleh UNICEF adalah kekurangan pendanaan. Dalam menjalankan program-program yang menguntungkan anak-anak Suriah, UNICEF memerlukan dana yang tidak sedikit. Kekurangan pendanaan ini memaksa bantuan dan layanan yang disediakan oleh UNICEF berkurang. Alokasi dana yang diterima UNICEF dari para donornya belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan anak-anak di Suriah. Menurut *Office for the Coordination of Humanitarian Affairs* (OCHA), keseluruhan dana yang dibutuhkan oleh UNICEF di Suriah adalah hampir 3,3 miliar US\$ tetapi hanya sekitar 52% yang dapat didanai. UNICEF baru menerima pendanaan lebih dari 1,7 miliar US\$. Pendonor utama UNICEF di Suriah adalah Amerika Serikat (688 juta US\$), Jerman (262 juta US\$), Inggris (148 juta US\$), Komisi Eropa (99 juta US\$), dan Kanada (80 juta US\$).²⁵²⁵

Implikasi Peran UNICEF dalam Perang Sipil di Suriah

Situasi dan kondisi negara Suriah sejak berkecamuknya perang sipil pada tahun 2011 semakin memprihatinkan. Kekerasan-kekeraan yang terjadi menjalar hampir ke seluruh wilayah Suriah. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak pun mengalami dampaknya. Perang sipil telah membuat anak-anak di Suriah hidup dalam keadaan serba kekurangan. Anak-anak di Suriah sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan dalam berbagai bidang. UNICEF selalu berupaya memenuhi kebutuhan anak-anak di Suriah. Program kerja yang dijalankan oleh UNICEF di Suriah bertujuan untuk memperbaiki masa depan Suriah dengan anak-anak sebagai generasi penerus. UNICEF menjangkau anak-anak di seluruh wilayah Suriah secara masif, termasuk wilayah yang sulit dijangkau dan terkepung.

Jutaan anak di Suriah telah merasakan dampak positif dari program-program UNICEF sejak tahun 2012. Program kerja UNICEF telah memberikan

²⁵ “Hundreds of Thousands of Civilians at Risk in Syria Amid Ongoing Violence in Northeast and Northwest”, diakses dari <https://news.un.org/en/story/2019/11/1050961> pada 24 November 2019.

implikasi terhadap kehidupan anak-anak di Suriah. Namun, UNICEF seharusnya dapat menekan *jumlah children in need* (anak-anak yang membutuhkan) setiap tahunnya. Hal ini didasarkan karena sejak tahun 2012 sampai tahun 2018 jumlah anak-anak yang membutuhkan berdasarkan *Humanitarian Needs Overview*, OCHA cenderung menunjukkan instabilitas atau tidak terjadi penurunan yang signifikan. Terjadinya instabilitas tersebut dapat dipengaruhi oleh keterbatasan dana yang diterima oleh UNICEF dari pendonor untuk menjangkau seluruh anak yang membutuhkan di Suriah. Intensitas perang yang meningkat yang terus digencatkan oleh pihak-pihak yang berperang juga menjadi pengaruh instabilitas jumlah *children in need* di Suriah per tahunnya. Berikut ini adalah tabel *children in need* di Suriah sejak tahun 2012 sampai tahun 2018:

Tabel 1.3 *Children in Need* di Suriah Tahun 2012-2018

<i>Children in Need</i>	Jumlah (Jiwa)
Tahun 2012	1.150.000
Tahun 2013	4.278.000
Tahun 2014	5.600.000
Tahun 2015	6.000.000
Tahun 2016	5.800.000
Tahun 2017	5.300.000
Tahun 2018	5.600.000

Sumber: Analisis peneliti berdasarkan *Humanitarian Needs Overview*, OCHA.²⁶

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini yang berjudul “Peran UNICEF dalam Menangani Anak-Anak Korban Perang Sipil di Suriah Tahun 2012-2018” maka peneliti menyimpulkan bahwa UNICEF mengambil peran menjadi aktor yang independen di Suriah. UNICEF berperan sebagai inisiator, fasilitator, mediator/rekonsiliator, dan determinator dalam perang sipil di Suriah. UNICEF menghadirkan program-program yang berprioritas terhadap anak-anak pada berbagai sektor. Program kerja UNICEF seperti perlindungan anak, pendidikan, air, sanitasi dan kebersihan, kesehatan dan nutrisi, pengembangan dan

²⁶ “*Syrian Arab Republic*”, diakses dari <https://www.unocha.org/syria> pada 24 November 2019.

partisipasi remaja, serta kebijakan sosial telah menjangkau anak-anak di 14 ke gubernuran yang ada di Suriah. UNICEF juga memastikan wanita hamil dan ibu menyusui di Suriah mendapatkan pertolongan dan bantuan. Melalui intervensinya, UNICEF menginginkan Suriah memiliki generasi yang berkompeten yang dapat menjaga perdamaian di Suriah. UNICEF menghadapi hambatan-hambatan selama di Suriah seperti risiko keamanan, akses ke wilayah yang sulit dijangkau dan terkepung, serta kekurangan pendanaan. Kekurangan pendanaan menjadi hambatan utama yang dihadapi UNICEF di Suriah. Keseluruhan dana yang dibutuhkan UNICEF, hanya setengahnya yang dapat didanai oleh para pendonor. Peran UNICEF dalam perang sipil di Suriah telah berimplikasi terhadap kehidupan anak-anak di negara itu.

Daftar Pustaka

Buku

- Archer, Clive. 2001. *“International Organization 3rd Edition”*. London: Routledge. Hal. 33-34.
- Azar E. E. 1990. *“The Management of Protracted Social Conflict: Theory and Cases”*. Michigan: Dartmouth. Hal. 9.
- Bennet, A. Le Roy. 1997. *“International Organizations: Principles and Issues”*. New Jersey: Prentice Hall Inc. Hal. 2-4.
- Budiardjo, Miriam. 1996. *“Dasar-Dasar Ilmu Politik”*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hal. 120.
- Carlesnaes, Walter et al. 2013. *“Handbook of International Relations”*. London: SAGE Publications. Hal. 336-339.
- Corbetta, Piergiorgi. 2003. *“Social Research: Theory, Methods, and Technique”*. London: SAGE Publications. Hal. 48.
- Harnisch, Sebastian et al. 2011. *“Role Theory in International Relations: Approaches and Analysis”*. New York: Routledge.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *“Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya”*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Masyhur A. Effendi. 1994. *“Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional”*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Miall Hugh, Oliver Ramsbotham & Tom Woodhouse. 1999. *“Contemporary Conflict Resolution. Chapter 1: Introduction”*. Cambridge: Polity Press.

Nazir, M. 1988. *“Metode Penelitian”*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sarwono, S. W. 2002. *“Teori-Teori Psikologi Sosial”*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal. 215.

Situmorang dalam Andre Pareira. 1999. *“Perubahan Global dan Perkembangan Studi Hubungan Internasional”*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 135.

Suhardono, Edy. 1994. *“Teori Peran (Konsep, Derivasi, dan Implikasinya)”*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hal. 3.

Situs Resmi/Berita

“Hundreds of Thousands of Civilians at Risk in Syria Amid Ongoing Violence in Northeast and Northwest”, diakses dari <https://news.un.org/en/story/2019/11/1050961> pada 24 November 2019.

“Syrian Arab Republic”, diakses dari <https://www.unocha.org/syria> pada 24 November 2019.

Strategi Mando-Pop Dalam Menghadapi Persaingan Global

Oleh:
Sevy Lelibriani¹

¹ Hubungan Internasional, Universitas Lampung
sevyleli77@gmail.com

Abstrak

Budaya populer merupakan budaya yang lahir dan berkembang di masyarakat sehingga disukai banyak orang. Budaya populer umumnya dimanfaatkan negara sebagai *soft-power* agar dapat diterima oleh negara lain. Salah satu negara yang memanfaatkan budaya populernya adalah Tiongkok yang memiliki Mando-pop sebagai budaya populer yang mampu meningkatkan posisinya di dunia. Sebagai negara yang sebelumnya tidak mendukung musik yang non-patriotik, kini Tiongkok beralih mendukung budaya populernya. Tiongkok memiliki strategi sehingga Mando-pop mampu diterima oleh masyarakat internasional dan mampu bersaing di level global. Pertanyaan yang diangkat dalam tulisan ini, yakni: “*Bagaimana strategi Tiongkok agar Mando-pop mampu menghadapi persaingan global?*” yang dibatasi pada tahun 2010-2018 ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dan primer yang didapatkan dari hasil wawancara untuk memvalidasi keabsahan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aktor negara maupun non-negara di Tiongkok saling bekerjasama untuk menyebarluaskan Mando-pop walaupun tujuan akhir dari kedua aktor berbeda. Aktor negara memiliki tujuan untuk menjadi kekuatan hegemoni budaya baru sedangkan aktor non-negara lebih berorientasi pada tujuan ekonomi. Sementara itu, strategi yang digunakan adalah menyesuaikan Mando-pop dengan selera pasar musik global serta pemanfaatan teknologi.

Kata Kunci : Mando-Pop, Budaya Populer, Globalisasi, Tiongkok

Pendahuluan

Perkembangan musik pop Tiongkok kini terus mengalami kemajuan. Pasalnya tak sedikit penyanyi asal negeri tirai bambu ini mulai menunjukkan eksistensinya di kancah internasional. Tentunya bukan jalan yang mudah bagi penyanyi asal Tiongkok untuk dapat memperoleh popularitas di luar negaranya. Terlebih jika berkaca pada tingginya tekanan pemerintah yang sebelumnya antipati terhadap musik yang mengikuti *trend* barat.

Pemerintah Komunis yang hanya menyukai musik berisi mengenai promosi nilai-nilai dan ideologi yang dianut partai serta menenangkan massa cenderung bersikap otoriter terhadap perkembangan industri musik di Tiongkok. Sehingga,

untuk tampil di konser maupun merilis rekaman pun, artis Tiongkok harus menyerahkan lirik lagu mereka untuk mendapat persetujuan Kementerian Kebudayaan, sebab segala sesuatu yang dianggap tidak patriotik dan sensitif secara politis akan disensor atau bahkan dilarang tayang. Pemerintah Tiongkok pun turut mengontrol secara ketat industri musik dengan cara mengalihkan seluruh hak kepemilikan media penyiaran ke pemerintah.¹ Musik pop bahkan sempat dilarang selama masa Revolusi Kebudayaan (1966-1978) karena dianggap sebagai ‘racun’ kapitalis. Tak hanya itu, gagasan pemuda untuk melakukan sesuatu agar terlihat berbeda dari orang-orang tua pun dipandang sebagai penyakit barat.² Hal yang lumrah apabila perkembangan industri budaya populer Tiongkok terbilang lambat.

Namun, lambat laun hal ini mulai bergeser. Industri musik di Tiongkok pun mulai mengalami perkembangan dan bahkan pemerintah pun mulai membuka diri untuk menerima masuknya budaya barat. Hal tersebut terjadi tak terlepas dari adanya rasa jenuh masyarakat terhadap musik yang berkembang di zaman Revolusi Kebudayaan.³ Pemerintah pusat pun turut menyadari dan prihatin bahwa kemajuan di sektor industri populer seperti film, musik, dan drama di Tiongkok akan tertinggal di belakang perkembangannya.⁴ Sehingga pemerintah Tiongkok mulai menetapkan budaya sebagai prioritas utama nasional dan beranggapan bahwa budaya adalah sumber kehidupan suatu bangsa.⁵

Pada masa awal kebangkitannya, musik pop Tiongkok, atau yang lebih dikenal dengan C-pop (*Chinese Popular Music*) banyak berpusat di Hongkong dan Taiwan. Sebab Hongkong dan Taiwan dipandang sebagai pusat dari musik balada dan sentimental yang cenderung digemari oleh kaum muda, berbanding terbalik dengan *China Mainland* yang masih didominasi oleh musik yang cenderung bersifat patriotik. Kiblat musik populer Tiongkok sendiri hingga saat ini masih

¹ Mandopop, Cantopop And Chinese Pop Music Industry: *Chinese Government Control of Pop Music* (terbit pada Januari 2014), diakses pada 16 Oktober 2018 tersedia di <http://factsanddetails.com/china/cat7/sub41/item249.html>.

² *Ibid*, *Chinese Pop Music*.

³ Ariella Intan Juwita Pesik, 2016, *Eksistensi Musik Literatur Cina*, Jakarta: Universitas Indonesia

⁴ Mandopop, Cantopop And Chinese Pop Music Industry: *Efforts to Improve China's Music Industry* (terbit pada Januari 2014), diakses pada 16 Oktober 2018, tersedia di <http://factsanddetails.com/china/cat7/sub41/item249.html>

⁵ Pernyataan Presiden Hu Jintao. (2012). Dimuat pada edisi cetak harian *Seputar Indonesia* dengan judul artikel *Presiden Hu Jintao Mendorong Penyebaran Budaya China di Luar Negeri*, dipublikasikan pada 2 Januari 2012.

didominasi oleh dua *sub-genre* C-pop, yaitu “Kanto-pop (粤语流行音乐)”⁶ dan “Mando-pop (华语流行音乐)”⁷. Kanto-pop sendiri banyak mendominasi pasar musik Hongkong sementara Mando-pop lebih banyak memainkan peran di industri musik Taiwan. Persaingan antara kedua *sub-genre* C-pop ini untuk mendunia terbilang cukup ketat. Namun, pasca tahun 2003, sejak industri Canto-pop mengalami skandal yang mengakibatkan meredupnya industri musik Hongkong, perlahan Mando-pop semakin mengalami peningkatan yang pesat. Bahkan, Mark Levin, seorang jurnalis musik pun berpendapat bahwa Kanto-pop akan mengalami penurunan yang sangat drastis dan Mando-pop akan menggantikan tempatnya.⁸

Taiwan sendiri sejak lama telah menjadi tujuan bagi para seniman Tiongkok untuk berlatih. Terbukti dengan kesuksesan sejumlah artisnya seperti S.H.E dan F4 yang populer di awal tahun 2000-an yang pada akhirnya menjadi tonggak dari kemunculan penyanyi-penyanyi Mando-pop di Taiwan lainnya, seperti Lollipop F dan Fahrenheit pada pertengahan tahun 2000 yang terbilang sukses besar, bahkan hingga ke negara-negara Asia lainnya. Sehingga banyak artis-artis dari Tiongkok pun memilih untuk berkarir di Taiwan karena dianggap lebih menghasilkan ketimbang berkarir di Tiongkok.

Namun seiring dengan berjalannya waktu, terhitung sejak memasuki tahun 2010 pemerintah Tiongkok yang mulai terbuka dengan musik non-patriotik mulai menyadari bahwa sektor budaya khususnya industri budaya populer sangat penting bagi negaranya. Mando-pop pun mulai mengalami perkembangan yang drastis di Tiongkok. Banyak artis-artis Mando-pop yang semula berkarir di Taiwan memilih untuk pindah ke Tiongkok.

Tak hanya itu, pemerintah Tiongkok pun nampaknya sadar bahwa selera pasar masih sangat berkiblat pada musik pop asal Korea Selatan atau yang lebih dikenal dengan K-pop. Sehingga pemerintah Tiongkok pun tak ragu untuk meningkatkan standar Pop-Cina dengan cara meniru atau melakukan imitasi K-pop.

⁶ Disebut Canto-pop karena musik ini beraliran pop dan menggunakan bahasa kanton, yang umumnya menjadi dialek Cina bagian selatan.

⁷ Mando-pop adalah musik pop yang dinyanyikan dalam bahasa mandarin, dialek Cina yang dominan digunakan di Cina bagian utara.

⁸ Mandopop, Cantopop And Chinese Pop Music Industry: *Cantopop and Mandopop* (terbit pada Januari 2014), diakses pada 16 Oktober 2018, tersedia di <http://factsanddetails.com/china/cat7/sub41/item249.html>.

Terbukti dari banyaknya acara musik yang meniru K-pop, salah satunya adalah *Idol Producer* yang telah menghasilkan *boy-group nine-percent* yang hingga kini banyak mencetak prestasi baik di dalam negeri maupun pada level global. Acara *Idol Producer* tersebut memiliki konsep sama persis dengan acara *Produce 101* yang sangat populer di Korea Selatan, dan walaupun penonton sadar bahwa acara tersebut adalah tiruan dari Korea Selatan, *Idol Producer* tetap berhasil meraih popularitas tak hanya di Tiongkok namun hingga ke luar negeri. Pemerintah Tiongkok pun turut mengirimkan seniman mereka untuk berlatih di luar Tiongkok agar dapat membantu mencapai hal yang masih berada di luar jangkauan musik Tiongkok.

Hal tersebut terbukti sukses sebab berdasarkan data yang telah Penulis himpun melalui situs musik Tiongkok (KKBOX, UFO Mandarin Chart, dan Yinyuetai), *youtube*, dan *chart billboard*, terhitung dari tahun 2017 hingga 2019 beberapa nama penyanyi Mando-pop semakin banyak menempati peringkat-peringkat dalam *chart* bergengsi. Tak hanya dalam *chart* musik, berdasarkan jumlah penonton di *youtube* pun penyanyi Mando-pop berhasil menarik minat pecinta musik. Kepopuleran Mando-pop tersebut dapat dilihat dari banyaknya jumlah penonton *video music* yang telah di *upload* pada situs *youtube*.

Popularitas yang diraih Mando-pop tersebut tentunya tak terlepas dari adanya dukungan aktor-aktor yang ada dibelakangnya. Berdasarkan kasus tersebut, maka muncul sebuah rumusan masalah, yakni: *Bagaimana strategi Tiongkok agar Mando-pop mampu menghadapi persaingan global?*

Sehubungan dengan pertanyaan penelitian tersebut, peneliti telah mengkaji 4 penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan. *Pertama*, penelitian berjudul ‘Penyebaran *Pop Culture* Jepang oleh *Anime Festival Asia* (AFA) di Indonesia tahun 2012-2016’ yang ditulis oleh salah satu mahasiswi jurusan Hubungan Internasional Universitas Mulawarman yang bernama Putri Safariani. Penelitian ini menjelaskan mengenai strategi dan upaya Jepang dalam menyebarkan produk budaya populernya melalui *event* *Anime Festival Asia* (AFA) yang diselenggarakan secara rutin di berbagai negara, salah satunya Indonesia.

Kedua, penelitian yang berjudul ‘*Hallyu* sebagai Fenomena Transnasional’ yang ditulis oleh Indah Chartika Sari, salah satu mahasiswa jurusan Hubungan

Internasional Universitas Riau. Penelitian yang menggunakan metode deskriptif analitis ini menganalisis mengenai fenomena kemunculan *Hallyu*, dari yang pada awalnya hanya merupakan budaya lokal namun lambat laun berkembang menjadi fenomena transnasional. Analisis juga meliputi aktor yang terlibat dalam upaya penyebaran budaya serta strategi yang digunakan oleh Korea Selatan.

Ketiga, penelitian yang berjudul ‘Upaya Thailand Menggunakan *Halal Food* sebagai *Soft Power* Negara’ yang ditulis oleh Nugrah Novita Nurarbani, salah satu mahasiswa jurusan Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif ini memaparkan mengenai bagaimana upaya pemerintah Thailand dalam mengencarkan industri halal di negara-negara Islam. Hal ini didasari dari adanya kesadaran oleh pemerintah Thailand bahwa wisatawan muslim merupakan pasar yang dapat membawa keuntungan besar bagi negaranya.

Keempat, merupakan penelitian yang berjudul ‘Upaya Jepang dalam Mempopulerkan Program *Cool Japan* sebagai *Nation Branding*’. Penelitian ini ditulis oleh Sidiq Ali Mustaqim yang merupakan mahasiswa jurusan Hubungan Internasional Universitas Mulawarman. Penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif ini memaparkan mengenai upaya Jepang dalam mengubah *image*-nya yang semula buruk melalui slogan “Cool Japan”.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Creswell (2008) mendefinisikan metode kualitatif sebagai suatu pendekatan yang bertujuan untuk mengeksplorasi serta memahami suatu gejala sentral.⁹ Untuk memahami gejala tersebut, peneliti biasanya akan terjun langsung ke lapangan untuk mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang sifatnya umum dan agak luas.¹⁰ Tak hanya itu, peneliti juga dapat mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada strategi aktor, baik aktor negara maupun non-negara di Tiongkok untuk mendukung Mando-pop dalam menghadapi persaingan

⁹ Dr. J. R. Raco, ME., M.Sc, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo. Hal. 7.

¹⁰ *Ibid*, hal. 8.

global. Penelitian ini difokuskan pada tahun 2010-2018. Sementara itu, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi dan wawancara yang dilakukan terhadap Biro Audio Visual dan Industri Musik di bawah naungan Kementerian Budaya Taiwan serta *fans*, *fanbase*, dan *fansite master* Mando-pop.

Dinamika Perkembangan Mando-Pop tahun 2010-2018

Dalam kurun waktu delapan tahun terakhir, Mando-pop telah mengalami cukup banyak perubahan. Perubahan tersebut dapat dinilai sebagai sesuatu yang positif sebab mampu secara perlahan membawa Mando-pop untuk masuk ke persaingan global. Hal tersebut merupakan bentuk dari upaya Tiongkok untuk membuat *popular culture*-nya mampu diterima tak hanya oleh masyarakat Tiongkok namun juga masyarakat global. *Trend* dunia yang didominasi oleh penyanyi idola yang mampu menyanyi dan menari secara bersamaan turut menarik Tiongkok untuk menciptakan musisi serupa. Hasilnya kini Mando-pop pun menjelma menjadi budaya populer yang turut bersaing dengan budaya populer lain yang telah lebih dahulu memasuki pasar global.

1. Tren Mando-pop tahun 2010-2018

Kepopuleran Mando-pop di Taiwan dan Tiongkok daratan semakin meningkat ketika memasuki tahun 2003 dimana pesaingnya, yakni Kanto-pop mengalami kejatuhan. Hingga tahun 2013, Mando-pop terus mengalami masa kejayaannya di Taiwan. Namun hal tersebut belum cukup untuk membuat Mando-pop dapat menembus pasar global dan bersaing di level global. Terlebih dengan kemunculan pesaing sesama regionalnya yang telah mampu mendobrak pasar dunia yakni K-pop. Setelah tahun 2013, Mando-pop di Taiwan mulai mengalami kemunduran.

Kurangnya kekuatan finansial dan pemasaran Taiwan menjadi salah satu alasan pada akhirnya banyak musisi Mando-pop di Taiwan yang mulai merambah ke Tiongkok daratan pada tahun 2014 hingga saat ini. Mando-pop bahkan saat ini dipandang telah hiatus di Taiwan. Sementara industri Mando-pop di Taiwan hiatus, Tiongkok justru terlihat menjanjikan bagi musisi Mando-pop, sebab pasar musik digital Tiongkok dinilai sebagai

pasar musik digital paling dinamis di dunia dengan pendapatan mencapai NT \$ 197 miliar pada tahun 2013.¹¹ Tiongkok pun tidak setengah-setengah dalam upaya mendukung pertumbuhan budaya populernya. Suntikan dana besar-besaran diberikan kepada acara pencarian bakat. Tak hanya itu, penyanyi-penyanyi muda asal Tiongkok daratan yang hadir dengan gaya musik serta visual yang sesuai dengan selera pasar global pun banyak bermunculan

2. Keunggulan Mando-Pop

Walaupun belum sepopuler para pesaingnya, Mando-pop memiliki keunggulan tersendiri. Mando-pop hadir dalam kondisi masyarakat yang terbuka, dengan kata lain Mando-pop hadir untuk menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat yang ada. Mando-pop juga memiliki kemampuan untuk meniru, meminjam, mengadopsi, atau mengadaptasi model budaya populer asing.¹² Hal tersebut tidak sepenuhnya negatif, sebab melalui kemampuan untuk mengadaptasi budaya lain ini 'lah Mando-pop dapat terus berkembang agar sesuai dengan keinginan masyarakat. Mando-pop sebagai budaya populer juga dikenal akan modernitasnya dan tak ketinggalan pula hal yang paling menarik dari Mando-pop adalah Mando-pop merupakan kombinasi dari tiga budaya yakni Tiongkok, Jepang, dan Barat yang mana hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi Mando-pop karena mampu menyatukan tiga unsur budaya menjadi satu.

Penikmat Mando-pop turut mengatakan bahwa Mando-pop memiliki keunikan tersendiri yang tidak dapat ditemukan pada para pesaingnya. Pada musik Mando-pop, umumnya para musisi tidak segan untuk memasukan instrumen tradisional Tiongkok ke dalam musiknya, dari segi lirik lagu pun, Mando-pop menggunakan lirik yang sesuai dengan gambaran kehidupan yang ingin disampaikan oleh musisi. Tak jarang pula lagu-lagu yang diproduksi menggunakan lirik gubahan dari puisi klasik. Lagu-lagu Mando-pop sendiri, jika dibandingkan

¹¹ Gwendolyn Ng, *Mandopop's Uphill Battle*. Diakses melalui laman <https://www.straitstimes.com/lifestyle/entertainment/mandopops-uphill-battle> diakses pada tanggal 11 April 2019.

¹² Marc L. Moskowitz, 2009, *Mandopop Under Siege: Culturally Bound Criticisms Of Taiwan's Pop Music*, Cambridge University Press: United Kingdom, hal. 70

dengan para pesaingnya bersifat lebih *everlasting*. Dari sisi penyanyinya sendiri, musisi Mando-pop lebih bebas berekspresi dalam memproduksi lagu walaupun berada di bawah naungan agensi, berbeda halnya dengan para pesaingnya seperti K-pop dan J-pop yang dalam hal produksi lagu masih dikontrol erat oleh pihak agensi. Musisi Mando-pop bahkan dikenal memiliki *performance* yang berbeda dengan musisi-musisi di negara lain. Selain itu, musisi Mando-pop turut didukung dengan visual artinya yang tidak kalah jika dibandingkan dengan para pesaingnya. Terlebih, tak hanya memiliki bakat dan visual yang menarik, musisi Mando-pop saat ini juga dinilai memiliki *personality* yang menarik dan lucu sehingga mampu menarik perhatian para penikmat musik global.

Selain keunggulan melalui esensi musik dan tampilannya, Mando-pop juga memiliki keunggulan lain yang belum dimiliki oleh para pesaingnya. Mando-pop saat ini hadir didukung oleh teknologi yang lebih mumpuni.

Strategi Tiongkok dalam Upaya Penyebaran Mando-pop Penyebarluasan Mando-pop

Mando-pop sebagai salah satu *popular culture* tentunya telah memenuhi enam esensi budaya populer. Salah satu tujuan munculnya Mando-pop sebagai budaya populer adalah untuk disebarluaskan sehingga mampu mendapatkan keuntungan secara komersil. Salah satu bentuk upaya penyebaran utama Mando-pop adalah dimulai dengan negara-negara yang memiliki penduduk yang tidak asing lagi dengan musik berbahasa Mandarin atau dengan kata lain adalah penduduk diaspora Tiongkok di negara lain.

Upaya penyebarluasan Mando-pop tentunya tidak hanya bermula dari adanya diaspora Tiongkok diberbagai negara saja. Dibalik produk Mando-pop yang dapat terdistribusi ke seluruh dunia, terdapat strategi dari aktor negara dan non-negara yang mendukungnya. Kemampuan Mando-pop untuk dapat muncul dan bersaing di level global tidak terlepas dari adanya peran pemerintah. Berdasarkan pernyataan dari Biro Pengembangan Audio Visual dan Industri Musik yang berada dibawah naungan Kementerian Budaya Taiwan, pemerintah Taiwan mensponsori acara *Golden Melody Awards*. GMA merupakan upacara penghargaan profil tertinggi di dunia musik berbahasa Mandarin. Tujuan dari diselenggarakannya

acara tersebut adalah untuk meramaikan pasar musik domestik Taiwan sekaligus pada saat yang sama meningkatkan pengembangan kinerja serta peluang pemasaran ke luar negeri. Selain itu, dukungan pemerintah Taiwan terhadap acara GMA juga ditujukan untuk mengkatalisasi sinergi antara bakat kreatif serta mempromosikan Mando-pop sebagai kekuatan budaya utama di kancah musik global.

Dalam dokumen perencanaan pemasaran Mando-pop yang diterbitkan oleh Biro Pengembangan Audio Visual dan Industri Musik pula dipaparkan langkah-langkah yang diupayakan oleh pemerintah Taiwan guna mendukung persebaran Mando-pop di level global. Pemerintah akan berupaya untuk menganalisis penempatan pasar, strategi pemasaran serta ruang lingkungannya. Mando-pop kini juga telah menjadi musik bagi komunitas Tiongkok lainnya khususnya di Republik Rakyat Tiongkok, sehingga tak hanya pemerintah Taiwan, pemerintah Tiongkok daratan pun tidak kalah dalam memberikan dukungannya terhadap Mando-pop agar mampu bersaing dalam industri musik global.

Hingga saat ini media hiburan Tiongkok telah mengalami pertumbuhan dan perubahan yang drastis. Mando-pop menjadi salah satu ekspor produk budaya populer yang paling banyak diminati baik di Tiongkok maupun di luar negeri. Sejalan dengan semakin tingginya minat atas Mando-pop, acara televisi yang memiliki format *reality show* turut menjadi sangat berpengaruh dalam hal penjualan musik Mando-pop.¹³ Tak hanya berpengaruh pada segi penjualan, *reality show* juga menjadi sasaran utama media sehingga Mando-pop semakin disorot baik di level domestik maupun global. Sehingga dukungan pemerintah Tiongkok atas munculnya acara-acara *reality show* berformat musik Mando-pop semakin tinggi. Selain melalui televisi, Mando-pop turut disebarluaskan melalui radio. Radio-radio berbahasa Mandarin maupun yang secara khusus hanya memutar lagu-lagu Mando-pop banyak tersebar di berbagai negara.

Tak hanya dukungan besar-besaran melalui media hiburan, Tiongkok turut mendukung persebaran Mando-pop melalui bidang akademik. Studi akademik di Tiongkok pun dibuka bagi pelajar yang ingin megkaji terkait hubungan politik dan

¹³ Jocelle Koh dan Matt Taylor, 2018, *Reality Check: Are Chinese Televised Singing Competitions Good for Mandopop*, tulisan diakses melalui <https://international.the.newslens.com/feature/singchina/100135>.

media hiburan.¹⁴ Tiongkok juga tak ketinggalan menampilkan Mando-pop dalam pagelaran musik seperti Festival Musim Semi dan upacara pembukaan dan penutupan Olimpiade Beijing.¹⁵ Hal tersebut membuktikan bahwa kini, pemerintah Tiongkok telah semakin terbuka dan tidak mempermasalahkan mengenai musik populer dan musik nasional yang saling tumpang tindih.

Strategi penyebarluasan Mando-pop tidak hanya dilakukan oleh aktor negara saja. Aktor non-negara pun turut terlibat dalam upaya penyebarluasan Mando-pop. Aktor non-negara yang berperan besar dalam hal ini adalah pihak swasta, khususnya dari industri musik penyedia jasa musik digital maupun label rekaman dan *fanbase* serta *fansite master* Mando-pop. Label rekaman yang menaungi para musisi merupakan elemen penting bagi musisi Mando-pop untuk dapat menembus pasar luar negeri.

Strategi aktor negara dan aktor non-negara yang saling mendukung dalam upaya menyebarluaskan Mando-pop tersebut bertujuan untuk membuat Mando-pop semakin populer. Popularitas Mando-pop yang semakin tinggi tentunya akan membantu Tiongkok untuk mencapai targetnya menjadi kekuatan baru hegemoni budaya.

Produksi Secara Massal

Strategi pemerintah Taiwan dalam memproduksi Mando-pop secara massal dapat dilihat pada dokumen perencanaan pemasaran Mando-pop yang diterbitkan oleh Biro Pengembangan Audio Visual dan Industri Musik di bawah Kementerian Budaya Taiwan. Beberapa strategi tersebut diantaranya adalah pemerintah berupaya menganalisis pasar dan perilaku konsumen sehingga produk Mando-pop yang di pasarkan secara global mampu diterima oleh konsumen.¹⁶ Pemerintah Taiwan juga menganalisis keuntungan dan kerugian terhadap produksi seniman, sehingga *output* produk Mando-pop yang dipasarkan tidak menimbulkan kerugian.¹⁷ Dan yang terakhir, pemerintah Taiwan juga bertugas untuk membuat

¹⁴ Gwendolyn Ng, *Mandopop's Uphill Battle*. Diakses melalui laman <<https://www.straitstimes.com/lifestyle/entertainment/mandopops-uphill-battle>> diakses pada tanggal 11 April 2019.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ The Bureau of Audio visual and Music Industry Development, 流行音樂行銷企劃人員職能基準, diakses pada laman https://www.bamid.gov.tw/downloadfilelist_382.html.

¹⁷ *Ibid.*

perencanaan produksi dan distribusi terkait pengemasan gambar dan produksi karya.¹⁸

Produksi secara massal produk Mando-pop tak hanya dilakukan oleh pemerintah Taiwan saja. Di Tiongkok memiliki strategi yang berbeda dalam upaya memproduksi Mando-pop secara massal. Pemerintah Tiongkok yang menyadari keuntungan dari adanya program televisi dengan format tersebut pun tidak ragu-ragu untuk memberikan suntikan dana besar-besaran terhadap *reality show*.¹⁹ Hal tersebut terbukti berhasil, sebab *reality show* seperti *The Voice of China*, *I Am a Singer*, *Idol Producer*, *The Rap of China*, *X Factor China* dan lain sebagainya berhasil menarik minat penonton. Hal tersebut semakin menambah antusias seniman dari berbagai lokasi untuk menghadiri kompetisi yang diadakan oleh Tiongkok. Penggemar musik pun turut antusias mendukung penyanyi idolanya dalam acara-acara tersebut dan media pun tak kalah besar-besaran dalam memberitakannya sehingga hasilnya dapat terlihat, Mando-pop mulai mendapat pengakuan baik di Tiongkok maupun negara lain.

Berdasarkan pemaparan peran pemerintah Tiongkok di atas, Tiongkok mulai terlihat menunjukkan citra sebagai negara yang terbuka dan ramah. Mando-pop bahkan mulai bisa dicampur dengan musik nasional. Namun walaupun pemerintah Tiongkok mulai terbuka bahkan secara langsung menjadi sponsor acara-acara musik, tetap perlu ditekankan kembali bahwa program-program tersebut masih berada dibawah intervensi negara. Dengan kata lain, seniman tidak bisa sesuka hati dalam mengekspresikan diri. Program televisi serta lagu-lagu Mando-pop tetap harus menaati peraturan serta lulus dari badan sensor Tiongkok sehingga tidak ada karya musik yang dianggap tidak sesuai atau mengancam internal Tiongkok.

Penyesuaian dengan Tren yang Sedang Populer

Penyesuaian diri Mando-pop dengan tren yang sedang populer tak terlepas dari adanya faktor kepentingan, baik oleh pemerintah maupun kaum elit lainnya. Mando-pop sebagai budaya populer Tiongkok pun turut berangsur-angsur

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Gwendolyn Ng, *Mandopop's Uphill Battle*. Diakses melalui laman <https://www.straitstimes.com/lifestyle/entertainment/mandopops-uphill-battle> diakses pada tanggal 11 April 2019.

mengikuti keinginan dan tren pasar dengan tujuan mencapai kepentingan Tiongkok untuk menjadi kekuatan budaya utama.

Beberapa bentuk penyesuaian Mando-Pop terhadap tren global, penulis paparkan sebagai berikut:

1. Mando-pop tampil dalam pertunjukan musik atau konser,
2. Mando-pop menggunakan teknologi digital,
3. *Genre* musik mando-pop semakin beragam,
4. Musisi mando-pop aktif di media sosial.

Strategi penyesuaian diri tersebut dilakukan oleh aktor negara dan aktor non-negara, yakni pemerintah Taiwan, pemerintah Tiongkok, dan musisi Mando-pop. Dalam dokumen perencanaan pemasaran Mando-pop yang diterbitkan oleh Biro Pengembangan Audio Visual dan Industri Musik di bawah Kementerian Budaya Taiwan dikatakan bahwa dalam upaya menyesuaikan diri dengan tren global, pemerintah Taiwan turut andil dalam meningkatkan integrasi dalam hal mematenkan kemampuan menyanyi artis, visual artis dan lain sebagainya. Pemerintah Taiwan juga melakukan pengujian pasar bagi musisi pendatang baru. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah musik yang diusung oleh penyanyi pendatang baru ini telah sesuai dengan keinginan pasar atau belum. Selain itu, pemerintah Taiwan juga meningkatkan ketajaman pengetahuan terhadap tren kehidupan dan budaya populer agar Mando-pop dapat diterima dengan baik oleh konsumen global.

Berbeda halnya dengan strategi pemerintah Taiwan, pemerintah Tiongkok justru membentuk kelompok penyanyi idola muda, yakni TFBoys. TFBoys yang merupakan ikon idola masa kini sengaja dibentuk sebagai strategi agar Mando-pop dapat diterima oleh masyarakat global. TFBoys sengaja dibentuk dengan misi menyampaikan nilai-nilai komunis yang dianut Tiongkok melalui lagu-lagu mereka.

Strategi penyesuaian diri tak hanya dilakukan oleh aktor negara saja, aktor non-negara pun turut andil dalam upaya menangkap konsumen global dengan cara menyesuaikan diri dengan selera pasar. Musisi Mando-pop tidak hanya berpusat di Tiongkok saja. Hingga kini, musisi Mando-pop banyak tersebar di Tiongkok daratan, Taiwan, Korea Selatan, Singapura, Malaysia, hingga Amerika Serikat.

Persebaran musisi Mando-pop tersebut membawa keuntungan tersendiri bagi upaya pertukaran budaya antara Tiongkok dengan negara lain. Terdapat berbagai upaya penyesuaian diri yang dilakukan musisi Tiongkok untuk dapat menarik minat pasar global salah satunya adalah melakukan kolaborasi lintas negara.

Keterlibatan Teknologi

Berdasarkan pernyataan pihak Biro Pengembangan Audio Visual dan Industri Musik Taiwan musik Mando-pop telah lama menjadi mesin utama yang mendorong evolusi musik berbahasa Mandarin. Evolusi Mando-pop ini tidak dapat terlepas dari tren pengembangan teknologi digital dan komunikasi internet agar memudahkan Mando-pop untuk diakses diberbagai belahan dunia. Apabila di Taiwan strategi mempopulerkan Mando-pop melalui pengembangan teknologi digital dilakukan langsung oleh pemerintah, lain halnya dengan Tiongkok. Di Tiongkok aktor non-negara yakni pihak swasta justru mengambil peran penting dalam upaya pemasaran Mando-pop ke level global melalui teknologi digital. Tiongkok yang dikenal dengan kemajuan teknologinya turut memperkuat kedudukan Mando-pop di kancah internasional. Perusahaan teknologi Tiongkok yang hadir dengan industri musik digitalnya telah menjadi kekuatan utama bagi kemajuan industri musik Tiongkok.

Mando-Pop sebagai Pilar Ekonomi Nasional

Sebagai perwujudan dari rencana Tiongkok untuk menjadikan industri budaya sebagai pilar ekonomi nasional pada tahun 2020, pemerintah Tiongkok tak hanya berperan dalam hal penyokongan dana saja. Tiongkok turut berperan dalam meningkatkan struktur industrinya serta membantu dalam membina merk dagang utamanya sehingga mampu meningkatkan konsumsi pasar.²⁰ Pemerintah Tiongkok tak ketinggalan turut mempromosikan pengembangan budayanya, termasuk dalam hal ini Mando-pop secara global.

Dukungan pemerintah Tiongkok juga diberikan dalam bentuk bantuan pembuatan perusahaan-perusahaan industri budaya yang memiliki daya saing serta

²⁰ Xinhua, 2017, *China Issues Five-years Reform Plan on Cultural Industry*, diakses melalui http://www.chinadaily.com.cn/business/2017-05/08/content_29248582.htm pada tanggal 22 April 2019.

pangsa pasar yang tinggi.²¹ Pemerintah Tiongkok juga memiliki andil dalam melakukan *merger* antara perusahaan budaya milik negara dan mengakuisisi kepemilikan asing.²² Perusahaan budaya milik negara diarahkan untuk memanfaatkan pasar modal sedangkan pemerintah memberlakukan sekuritisasi aset.²³ Sementara itu, Kementerian Budaya RRT memiliki peran sebagai pembuat keputusan utama dalam promosi.

Kepentingan Tiongkok dalam Persebaran Mando-pop

Melihat pada besarnya upaya Tiongkok untuk menyokong Mando-pop agar mampu berkompetisi di level global tentu ada kepentingan yang diusung oleh Tiongkok dibaliknya. Berdasarkan pemaparan pada pembahasan diatas disimpulkan bahwa Tiongkok memiliki dua kepentingan dalam upaya persebaran Mando-pop, yakni kepentingan menyebarkan budaya (hegemoni budaya) dan kepentingan ekonomi.

Kesimpulan

Penelitian yang berjudul *Strategi Mando-pop dalam Menghadapi Persaingan Global* ini memiliki sasaran untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu: *Bagaimana strategi Tiongkok agar Mando-pop mampu menghadapi persaingan global?* Maka, berdasarkan analisis yang telah dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa dalam upaya mendukung Mando-pop menghadapi persaingan global dapat dilihat melalui dua konsep, yaitu *popular culture* dan globalisasi. Jika dianalisis melalui konsep *popular culture*, aktor negara banyak memainkan peranan dalam membuat strategi agar Mando-pop mampu bersaing di level global. Strategi-strategi tersebut antara lain; penyebarluasan Mando-pop, produksi secara massal, dan menyesuaikan dengan tren yang sedang populer.

Melalui strategi penyebarluasan Mando-pop, pemerintah berupaya untuk membangun strategi pemasaran ke luar negeri, mensponsori acara-acara musik, membuka pusat studi akademik. Upaya penyebarluasan Mando-pop, turut didukung pula oleh aktor non-negara yakni fans Mando-pop yang tersebar diberbagai negara.

²¹ *Ibid*

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

Sedangkan melalui strategi produksi secara massal, pemerintah berperan dalam perencanaan produksi dan distribusi karya dan memberikan suntikan dana terhadap acara musik televisi. Serta yang terakhir, dalam upaya menyesuaikan Mando-pop dengan tren yang sedang populer, pemerintah banyak didukung oleh aktor non-negara seperti musisi Mando-pop. Strategi yang dilakukan dalam upaya menyesuaikan Mando-pop dengan tren yang sedang populer adalah dengan membentuk grup idola berideologi komunis namun sesuai dengan selera kaum muda, melakukan kolaborasi lintas negara, dan memberikan pelatihan terhadap artis-artis baru.

Sementara itu, melalui konsep globalisasi disimpulkan bahwa strategi penyebaran Mando-pop lebih didominasi oleh aktor non-negara. Aktor non-negara atau pihak swasta yang berperan penting adalah industri rekaman dan penyedia jasa musik digital. Sebagai rumah bagi raksasa teknologi di dunia, Tiongkok banyak didukung oleh teknologi digital yang berperan dalam menyebarkan Mando-pop ke berbagai belahan dunia. Industri rekaman dan penyedia jasa musik digital saling bekerjasama dalam melakukan pengembangan teknologi digital sehingga Mando-pop dapat dipasarkan ke luar negeri.

Berdasarkan analisis di atas, didapatkan kesimpulan akhir bahwa, baik aktor negara maupun aktor non-negara memiliki tujuan masing-masing dalam upaya penyebaran Mando-pop ke level internasional. Aktor negara bertujuan untuk menjadi kekuatan baru hegemoni budaya sementara aktor non-negara lebih berfokus pada tujuan ekonomi. Namun, walaupun memiliki tujuan yang sedikit berbeda, kedua aktor dapat saling bekerjasama dalam menciptakan strategi yang mampu mendukung Mando-pop menghadapi persaingan global.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan di atas, saran yang dapat penulis berikan bagi penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini terkendala pada wawancara terhadap pihak Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta sebab pihak narasumber tidak memberikan respon sebagaimana yang diharapkan, sehingga penelitian ini hanya valid dari pihak Kementerian Budaya Taiwan saja. Diharapkan pada penelitian selanjutnya, data dapat diperoleh dari pihak Tiongkok.

2. Penulis menyarankan, pada penelitian selanjutnya untuk berfokus pada rencana kerja Tiongkok lima tahun kedepan untuk menjadikan industri budaya populer di Tiongkok sebagai pilar ekonomi nasional pada tahun 2020.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan *Edited Volume*:

- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Penerbit Kencana
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya Cet 1*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Milles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Raco, J. R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Storey, John. 2015. *Cultural Theory and Popular Culture: An Introduction*. New York: Routledge.
- Winarno, Budi. 2008. *Globalisasi: Peluang atau Ancaman bagi Indonesia*, Jakarta: Penerbit Erlangga.

Karya Tulis Ilmiah:

- Chen-Yu Lin. 2018. *Questions of Chineseness: A study of China Wind Pop Music and the Post-1990s Generation in the PRC, Hong Kong, Taiwan, and the UK*, Liverpool: SOTA (University of Liverpool).
- Chu, Yiu-Wai. 2017. *Hongkong Cantopop: A Concise History*, Tiongkok: Hongkong University Press.
- Ho, Wai-Chung and Wing-Wah Law. 2012. *The Cultural Politics of Introducing Popular Music into China's Music Education*, Tiongkok: The University of Hongkong.
- Ho, Wai-Chung. 2010. *Westernization and Social Transformations*, Tiongkok: The University of Hongkong.
- Moskowitz, Marc L. 2009. *Mandopop Under Siege: Culturally Bound Criticisms Of Taiwan's Pop Music*, United Kingdom: Cambridge University Press.
- Mustaqim, Sidiq Ali. 2018. *Upaya Jepang dalam Mempopulerkan Program Cool Japan sebagai Nation Branding [skripsi]*. Samarinda: Universitas Mulawarman.

- Nurarbani, Nugrah Novita. 2018. *Upaya Thailand Menggunakan Halal Food sebagai Soft Power Negara* [skripsi]. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Pesik, Ariella Intan Juwita. 2016. *Eksistensi Musik Literatur Cina*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Rahmat, Pupu Saeful. 2009 *Penelitian Kualitatif*, Jurnal Equilibrium Vol. 5 No. 9 tahun 2009. Malang: Universitas Brawijaya.
- Ritzer, George. 2003. *Globalization of Nothing*. SAIS Review vol. XXIII no. 2 Summer–Fall 2003.
- Safariani, Putri. 2017. *Penyebaran Pop Culture Jepang oleh Anime Festival Asia (AFA) di Indonesia tahun 2012-2016* [skripsi]. Samarinda: Universitas Mulawarman.
- Sari, Indah Chartika. 2013. *Hallyu sebagai Fenomena Transnasional*, Riau: Universitas Riau.
- Steen, Andreas. 2015. *China Pop Love, Patriotism And The State In China's Music Sphere*.
- Wang, Grace. 2012. *The ABCs of Chinese Pop: Wang Leehom and the Marketing of a Global Chinese Celebrity*, USA: UC Santa Barbara.
- Yueh-Lin Ma. 2014. *Can Taiwan Keep Reigning Supreme?*, Commonwealth Magazine Vol. 542 diakses melalui laman <https://english.cw.com.tw/article/article.action?id=433>.

Laporan dan Publikasi:

- China's Digital Music Industry: Statistics and Facts. 2018. melalui situs <https://www.statista.com/topics/4680/digital-music-industry-in-china/> diakses pada tanggal 16 April 2019.
- Djarmiko, Achmad. 2006. *Soft Power Dan Kekuatan Nasional*, Jakarta: Kementerian Luar Negeri.
- Kaiman, Jonathan, *The Guardian*, terbit pada 25 Desember 2012.
- Pernyataan Presiden Hu Jintao. 2012. Dimuat pada edisi cetak harian Seputar Indonesia dengan judul artikel **Presiden Hu Jintao Mendorong Penyebaran Budaya China di Luar Negeri**, dipublikasikan pada 2 Januari 2012.
- The Bureau of Audio visual and Music Industry Development, **流行音樂行銷企劃人員職能基準**, diakses pada laman https://www.bamid.gov.tw/downloadfilelist_382.html.

Website / Portal Berita Online / Sumber Internet:

- Aji, Subronto, *Grobalisasi dan Terorisme*, diakses pada 28 November 2018, tersedia di <https://www.scribd.com/document/330622515/Grobalisme-Dan-Sebab>.

- Chris Fuchs, *The Limits Of Mando-Pop: With Mainland Money Flooding Into Taiwanese Celebrity Coffers, Activism Takes a Back Seat*. Diakses melalui laman <https://foreignpolicy.com/2014/04/18/the-limits-of-mandopop/> pada 11 April 2019.
- C-Pop vs K-Pop, (terbit pada 9 September 2007) diakses pada 2 Maret 2019 melalui laman <https://forums.soompi.com/en/topic/100173-cpop-vs-kpop/page/19/>.
- Do, Michael, *Why is K-pop more popular in the United States than C-pop or J-pop?* (terbit pada 26 Desember 2015) diakses pada 2 Maret 2019 melalui laman <https://www.quora.com/Why-is-K-pop-more-popular-in-the-United-States-than-C-pop-or-J-pop>.
- Gwendolyn Ng, *Mandopop's Uphill Battle*. Diakses melalui laman <https://www.straitstimes.com/lifestyle/entertainment/mandopops-uphill-battle> diakses pada tanggal 11 April 2019.
- Jocelle Koh dan Matt Taylor, 2018, *Reality Check: Are Chinese Televised Singing Competitions Good for Mandopop*, tulisan diakses melalui <https://international.thenewslens.com/feature/singchina/100135>.
- Implementasi MEA terhadap Kebudayaan: Globalisasi, Glokalisasi, Grobalisasi*, (terbit pada 2 Februari 2018), diakses pada 5 November 2018, tersedia di <https://duta.co/implementasi-mea-terhadap-kebudayaan-globalisasi-glokalisasi-dan-grobalisasi/>.
- K-Pop, J-Pop, Make Way For C-Pop, (terbit pada 11 Juni 2017) diakses pada 2 Maret 2019 melalui laman <http://www.voiceofchina.com.au/make-way-c-pop/>.
- Kevin Hsu, 2010, *Why is the Mandarin Pop Music Scene Based in Taiwan*, diakses melalui <https://www.quora.com/Why-is-the-Mandarin-pop-music-scene-based-in-Taiwan> pada tanggal 29 April 2019.
- Mandopop, Cantopop And Chinese Pop Music Industry: *Channel V and MTV* (terbit pada Januari 2014), diakses pada 21 Februari 2019 tersedia di <http://factsanddetails.com/china/cat7/sub41/item249.html>.
- Mandopop, Cantopop And Chinese Pop Music Industry: *Chinese Government Control of Pop Music* (terbit pada Januari 2014), diakses pada 16 Oktober 2018 tersedia di <http://factsanddetails.com/china/cat7/sub41/item249.html>.
- Mandopop, Cantopop And Chinese Pop Music Industry: *Music Industry in China* (terbit pada Januari 2014), diakses pada 21 Februari 2019 tersedia di <http://factsanddetails.com/china/cat7/sub41/item249.html>.
- Mandopop, Cantopop And Chinese Pop Music Industry: *Pirated Music in China* (terbit pada Januari 2014), diakses pada 21 Februari 2019 tersedia di <http://factsanddetails.com/china/cat7/sub41/item249.html>.
- Martin, Erica, 2018, *China's Music Industry to Break Through Internationally*, (terbit pada 13 February 2018), diakses pada tanggal 2 Maret 2019 melalui laman <http://knowledge.ckgsb.edu.cn/2018/02/13/china/china-music-industry-goes-international/>.

Memahami Selera Musik Generasi Milenial, diakses melalui laman <https://tirto.id/memahami-selera-musik-milenial-b49a> pada tanggal 29 April 2019.

Pop Mandarin, diakses melalui laman http://injil-pq93.kelasekstensi.co.id/id/1/2617-2507/Mandopop_114470_injil-pq93-kelasekstensi.html pada 20 Februari 2019.

Xinhua, 2017, *China Issues Five-years Reform Plan on Cultural Industry*, diakses melalui http://www.chinadaily.com.cn/business/2017-05/08/content_29248582.htm pada tanggal 22 April 2019.

Jumlah Voting untuk Acara 'Idol Producer', dilansir dari portal online <http://k-vibes.com/news/K-Pop> pada tanggal 13 April 2019.

Tahun 2020 Industri Budaya Cina Jadi Pilar Ekonomi Nasional, diakses melalui laman <https://www.jia-xiang.biz/tahun-2020-industri-budaya-cina-jadi-pilar-ekonomi-nasional/> pada tanggal 29 April 2019.

TFBoys Boyband Tiongkok yang Menjadi Penerus Komunisme. Diakses melalui <http://www.Idntimes.com/world/TF-Boys-Menjadi-Menerus-Komunisme> pada tanggal 12 April 2019.

Billboard Chart <www.billboard.com> diakses pada tanggal 20 Februari 2019.

Youtube <www.youtube.com> diakses pada tanggal 20 Februari 2019.

**Pemetaan Faktor-Faktor Pembangun Daya Saing Pariwisata
Terhadap Kedatangan Wisatawan Internasional
Negara-Negara Asia Pasifik Tahun 2017 dan 2019**

Oleh:
Wawan Taryanto¹

¹ Hubungan Internasional, Universitas Lampung
wawan.taryanto@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pengaruh antara faktor-faktor pembangun daya saing pariwisata terhadap kedatangan wisatawan internasional negara-negara Asia Pasifik tahun 2017 dan 2019. Penelitian ini bertujuan memetakan daya saing pariwisata di negara-negara Asia Pasifik serta mendeskripsikan keunggulan dan kelemahan pariwisata di negara-negara tersebut. Berbagai instrumen penelitian berupa teori keunggulan kompetitif dengan paradigm liberalisme interdependen dilibatkan dengan metode analisis data sekunder dan teknik pengumpulan data studi dokumentasi. Penelitian ini juga menggunakan analisis regresi linear berganda guna menjelaskan hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan tingkat kebenaran 98%, faktor-faktor daya saing pariwisata mempengaruhi kedatangan wisatawan internasional sebesar 80,80%. Dari keseluruhan faktor yang ada, teknologi informasi merupakan faktor terpenting yang dapat meningkatkan kedatangan wisatawan internasional secara signifikan dengan angka pengaruh 0,830, sedangkan variabel keterbukaan internasional justru menjadi kebalikannya dengan angka pengaruh -0,888. Sementara, pada sisi negara, Hong Kong merupakan negara dengan factor teknologi informasi tertinggi dan Jepang merupakan negara yang memiliki keunggulan kompetitif terbesar yakni 4,28, sedangkan Pakistan memiliki keunggulan kompetitif terkecil yakni 2,22. Berdasarkan hal tersebut, maka rekomendasi bagi pemerintah Indonesia berdasarkan penelitian ini adalah menjalin kerjasama teknologi informasi dengan Hong Kong yang memiliki nilai factor teknologi informasi tertinggi atau Jepang yang memiliki nilai kompetitif tertinggi.

**Kata Kunci : Daya Saing Pariwisata, Keunggulan Kompetitif,
Performa Pariwisata Asia Pasifik**

Pendahuluan

Pariwisata telah berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi makro dan mikro negara-negara. Peran pariwisata dalam ekonomi makro dapat dilihat dari kontribusinya terhadap *Gross Domestic Product* (GDP) dan penyediaan lapangan pekerjaan yang meningkat dari tahun ke tahun seiring pertumbuhan pariwisata. Pariwisata sepanjang 2009 – 2018 menurut *United Nations for World Tourist*

Organization (UNWTO) memiliki penerimaan langsung yang tumbuh rata-rata 6,20% setiap tahunnya atau tumbuh sebesar 70,00% dalam kurun waktu sepuluh tahun, dari 0,85 triliun dollar Amerika (USD) pada 2009, menjadi 1,45 triliun USD pada 2018.¹ Pariwisata secara total penerimaan pada 2018 bahkan mencapai 3,9% atau lebih dari 8,80 triliun USD dari total GDP dunia, sekaligus menyediakan 319 juta pekerjaan, setara dengan 10,40% dari seluruh jumlah lapangan kerja global.²

Peran pariwisata yang begitu penting dalam ekonomi makro negara menyebabkan sebagian besar negara di dunia memberikan perhatian khusus dengan menempatkan pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan nasionalnya. Sebanyak 185 dari 247 negara, atau 75,00% negara di dunia memiliki penerimaan pariwisata dalam GDP mereka³, bahkan 12 negara diantaranya mencapai lebih dari 40,00% total GDP negaranya⁴ Keduabelas negara ini seluruhnya adalah negara berkembang, sedangkan negara maju terdekat berada pada urutan ke -19, dengan nilai kontribusi 32,60%.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa pariwisata dapat dikembangkan di negara manapun, tanpa memandang kelompok negara, tingkat perekonomian, ataupun teknologi yang dimiliki. Negara berkembang justru memiliki kesempatan yang sangat terbuka untuk bersaing, bahkan unggul dalam sektor pariwisata. Maka dari itu, negara berkembang harus lebih konsen terhadap isu pariwisata dan perkembangannya.

Dari segi ekonomi mikro, pariwisata mendorong lahirnya, sekaligus menghubungkan berbagai industri lain. Hal ini menyebabkan pertumbuhan kuantitas sekaligus kualitas produk di berbagai industri terkait pariwisata, yang

¹ Dirangkum dari United Nations for World Tourist Organization, 2018, *UNWTO Annual Reports 2017*, Jenewa: UNWTO, hlm. 12 – 14, dan United Nations for World Tourist Organization , 2019, *UNWTO Tourism Highlight 2018*, Jenewa: UNWTO, hlm. 1 – 2.

² World Travel and Tourism Council, *Travel and Tourism Continues Strong Growth Above Global GDP*, diakses dari <https://www.wttc.org/about/media-centre/press-releases/press-releases/2019/travel-tourism-continues-strong-growth-above-global-gdp/> pada 15 Juli 2019 pukul 13.00 WIB.

³ Sejumlah negara yang dimaksud terbagi dalam 3 kategori, yaitu 192 diantaranya negara berdaulat yang diakui UN, 3 negara yang diakui UN secara de facto, dan 52 negara dengan yuridiksi dari negara lain dan merupakan bagian negara lain secara hukum dan wilayah. Lihat juga *How many countries are there in the world?* melalui www.world-country.com

⁴ Keduabelas negara tersebut secara berurutan ialah Macau, Seychelles, Maldives, St Kitts and Nevis, Grenada, Vanuatu, Cape Verde, St Vincent and the Grenadines, Belize, Antigua and Barbuda, St Lucia, dan Bahamas. Knoema, “Contribution of travel and tourism to GDP as a share of GDP (%)”, diakses dari <https://knoema.com/atlas/topics/Tourism/Travel-and-Tourism-Total-Contribution-to-GDP/Contribution-of-travel-and-tourism-to-GDP-percent-of-GDP> pada tanggal 14 Juli 2019 pukul 19.00 WIB.

⁵ *Ibid*

akhirnya menghasilkan tak hanya nilai ekonomis, tapi juga dapat menghadirkan citra suatu negara.⁶ Pariwisata bahkan tak hanya penting dalam lingkup negara, namun sebagai industri, pariwisata merupakan salah satu industri dengan pertumbuhan tercepat. Bila dibandingkan dengan seluruh sektor industri lain, pariwisata merupakan sektor dengan pertumbuhan tercepat kedua, dengan selisih hanya 0,10% dibawah sektor manufaktur yang mencapai 4,00%. Sedangkan di sektor jasa, pariwisata menjadi yang tertinggi selama satu dekade terakhir. Pertumbuhan pariwisata juga lebih tinggi dibandingkan dengan rerata pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, dengan selisih lebih dari satu persen.

Pertumbuhan pariwisata yang begitu cepat juga menyebabkan negara-negara berintegrasi membentuk kerjasama maupun membentuk institusi guna menjembatani berbagai pemangku kepentingan industri pariwisata. Beberapa institusi tersebut diantaranya ialah *T20 Initiative* dan *UN Steering Committee on Tourism for Development (SCTD)*. *T20 Initiative* didukung penuh oleh UNWTO untuk mengoordinasi pariwisata antar birokrasi negara maupun kementerian pariwisata secara langsung. UNSCTD dibentuk oleh delapan badan UN untuk mengelaborasi berbagai bidang penunjang pariwisata, mulai dari perekonomian, pendidikan, pembangunan, dan kebudayaan⁷ di berbagai level kepentingan, serta memprioritaskan agenda pariwisata berkelanjutan.⁸ Kini bahkan terdapat 2.262 organisasi pariwisata di seluruh dunia. Organisasi ini meliputi berbagai kementerian pariwisata, organisasi perjalanan, perhotelan, dan organisasi penunjang pariwisata lain di berbagai negara.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa pariwisata tak hanya dapat melahirkan institusi dalam skala global, dan regional, namun juga lokal negara.

Pariwisata jika dibandingkan dalam pertumbuhannya maka akan didapati bahwa kawasan Asia Pasifik memiliki pertumbuhan tertinggi dibanding kawasan lain. Pertumbuhannya dapat mencapai hampir dua kali lipat kawasan lain, dimana

⁶ Kshitiz Takur, *Importance of Tourism and Its Economic Value*, diakses dari <http://www.market-width.com/blogs/importance-Tourism-Industry-Economic-Value.htm> pada 20 Juli 2019 pukul 06.10 WIB.

⁷ *Ibid*

⁸ Dirangkum dari United Nations for World Tourism Organization, 2011, *UNWTO Annual Reports 2010*, Jenewa: UNWTO, hlm. 14 – 15.

⁹ Tourism Review Directory, *Tourism Organization*, diakses dari <https://www.tourism-review.org/travel-and-tourism-organizations-list> pada 14 Juli 2019 pukul 05.00 WIB.

Asia Pasifik mencapai angka pertumbuhan 2,4% dari tahun 2015-2017, sedangkan kawasan lain rata-rata 1%.¹⁰ Pariwisata Asia Pasifik di tahun yang sama juga membuka kesempatan untuk memfasilitasi perjalanan lebih aman dan nyaman, berkelanjutan dan tumbuh secara inklusif, serta mengembangkan lingkungan kerja yang lebih fleksibel dan berketerampilan.¹¹ Hal ini menjadikan pariwisata menjadi bagian penting bagi negara-negara di kawasan Asia Pasifik.

Salah satu komitmen yang dilakukan Asia Pasifik adalah dengan membentuk kerjasama pariwisata dalam kerangka kerjasama *Asia Pacific Economy Cooperation* (APEC) yang disebut dengan *Tourism Work Group (TWG) Workplan 2015 – 2019*. Kerjasama ini berisikan berbagai agenda kerjasama antar negara Asia Pasifik yang tergabung dalam APEC untuk meningkatkan, mengembangkan, membangun, mempromosikan, dan memastikan keberlanjutan pariwisata di negara-negara Asia Pasifik melalui mekanisme kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama dalam TWG terdiri dari kerjasama jangka pendek, kerjasama jangka panjang, kerjasama berkala, dan kerjasama insidental berdasarkan berbagai aspek pariwisata, mulai dari tenaga kerja, konten, hingga pemasaran pariwisata.

Meskipun secara rencana strategis kerjasama APEC menyangkut berbagai hal, namun pada kenyataannya kerjasama APEC hanyalah menyoal beberapa aspek pariwisata, sementara faktor pembangun daya saing pariwisata terdiri dari 14 faktor dan 90 indikator yang secara komprehensif menjadi tolak ukur bagi WEF untuk menentukan indeks daya saing pariwisata suatu negara. Hal ini menyebabkan kerjasama pariwisata Asia Pasifik cenderung monoton dengan agenda yang tidak berbeda jauh setiap tahunnya, bahkan dilain sisi menutup kemungkinan pengurutan skala prioritas di setiap negara anggota yang memiliki keragaman latar belakang dan konteks pariwisata. Maka dari itu penelitian ini tepat dilakukan untuk melakukan pemetaan faktor pembangun daya saing pariwisata agar kerjasama Asia Pasifik menjadi lebih terarah dan dapat menentukan prioritas. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah memetakan factor-faktor pembangun daya saing pariwisata terhadap kedatangan wisatawan internasional di negara-

¹⁰ World Economic Forum, 2017, *The Travel and Tourism Competitiveness Report 2017: Paving the way for a more sustainable and inclusive future*, Jenewa: WEF. Hlm. 8.

¹¹ Asia Pacific Economic Cooperation, 2018, *State of APEC Tourism Report 2018*, Lima: APEC Secretariat.

negara Asia Pasifik dan mengetahui posisi pariwisata negara-negara tersebut. Berdasarkan hal ini, maka pertanyaan penelitian jurnal ini adalah *Bagaimana pengaruh faktor daya saing pariwisata terhadap kedatangan wisatawan internasional di negara-negara Asia Pasifik?*

Teori dan Konsep

Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori keunggulan kompetitif yang dicetuskan oleh Porter, sementara konsep yang dipakai dalam penelitian ini ialah konsep daya saing pariwisata yang juga diilhami oleh berbagai pendapat Porter dan peneliti-peneliti terdahulu. Dasar-dasar konseptual daya saing berada diantara teori keunggulan komparatif Ricardian, dan kerangka keunggulan kompetitif Porter. Keunggulan komparatif merupakan kekayaan bawaan dari destinasi wisata, yang meliputi sumber daya alam, warisan budaya, dan kekayaan bawaan lain.¹² David Ricardo mendefinisikan teori daya saing berdasarkan paradigma perdagangan internasional, menurutnya daya saing berkaitan dengan ketersediaan sumber daya, atau penciptaan keuntungan diantara negara-negara yang terdampak oleh prinsip biaya aliran barang. Definisi ini menyebabkan daya saing mencakup sisi penawaran, yang menjelaskan alasan negara saling melakukan perdagangan, dan menentang adanya hubungan *zero-sum*.

Berlawanan dengan keunggulan komparatif, keunggulan kompetitif timbul saat terjadinya perencanaan, pengelolaan, dan kebijakan pemasaran yang diterapkan pada keunggulan komparatif. Sehingga definisi daya saing menurut Porter berawal dari teori manajemen, dimana ia menyebut bahwa negara dapat memperoleh keunggulan kompetitif dengan penciptaan kompetensi dari penyebaran dan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Ia menyimpulkan bahwa definisi yang paling sesuai dari daya saing adalah produktivitas.¹³ Definisi ini membuat daya saing mencakup upaya meningkatkan

¹² Maria del P. Pablo Romero, Palma Golmez Calero, dan Javier Sanches Rivas, 2016, *Tourism, Competitiveness and Economic Growth: A New Analytical Model*, InTech: www.intechopen.com, hlm. 113.

¹³ Dirangkum dari Michael E. Porter, 1990, *The Keunggulan kompetitif of Nations*, Harvard: Harvard Business Review edisi Maret – April 1990, hlm. 76, dan Robertico Croes, 2013, *Evaluation of Tourism Competitiveness and Its Effect on Destination Management: Making A Difference in Costa Rica?*, Costa Rica: Diálogos Revista Electrónica de Historia, Universidad de Costa Rica, hlm. 119.

produktivitas melalui peningkatan jumlah input fisik modal dan tenaga kerja, peningkatan kualitas input yang digunakan, dan peningkatan teknologi, serta mendukung adanya hubungan *zero-sum*.

Selain Ricardo dan Porter, beberapa peneliti yang terdiri dari Crouch, Ritchie, dan Hudson menulis bahwa daya saing merupakan konstruksi multidimensi yang mencakup kemampuan menggerakkan sumber daya untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan baik di pasar yang telah ada, maupun yang baru.¹⁴ Definisi ini menjelaskan daya saing mencakup pengalaman berkesan wisatawan, kinerja yang unggul, dan peningkatan kualitas hidup penduduk. Artinya, definisi ini mengkritik daya saing pariwisata yang fokus ke salah satu sisi, baik kepuasan pengunjung, maupun keuntungan pemilik atau penduduk lokal, namun harus adanya kesinambungan diantara keduanya, untuk dapat menjamin adanya pertumbuhan berkelanjutan. Dengan kata lain dalam pengertian ini daya saing melingkupi keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif.

Berdasarkan definisi daya saing diatas, peneliti akan lebih menekankan bahasan penelitian ini sebagaimana definisi yang dikemukakan oleh Porter yang memandang daya saing dari sisi manajerial. Sehingga definisi yang peneliti ambil berdasarkan hal tersebut yaitu daya saing pariwisata merupakan kemampuan negara dalam mendayagunakan faktor-faktor produktivitas pariwisata untuk meningkatkan performa pariwisatanya. Faktor-faktor produktivitas pariwisata, sebagaimana penelitian terdahulu, merujuk pada dimensi-dimensi dan faktor-faktor yang tercantum dalam laporan TTCR terbitan WEF yang selanjutnya peneliti sebut sebagai faktor-faktor pembangun daya saing pariwisata. Faktor-faktor pembangun daya saing pariwisata ini terdiri dari empat dimensi dalam kategorisasi faktor-faktornya yang meliputi kondisi lingkungan penunjang, kondisi kebijakan pariwisata, kondisi infrastruktur, dan kondisi sumber daya, berikut ini:

Pertama, kondisi lingkungan penunjang merupakan dimensi yang berisi serangkaian faktor terkait sisi manajerial dan bisnis dari pariwisata. Dimensi ini memuat lima faktor yaitu: (1) faktor lingkungan bisnis merupakan faktor yang berisi serangkaian aturan bagi para pelaku bisnis pariwisata, dan hal-hal lain yang terkait bisnis pariwisata itu sendiri. Mulai dari kebijakan terkait bisnis wisata, hingga pada

¹⁴ Robertico Croes, *Op Cit*, hlm. 120.

investasi yang dilakukan dalam sector pariwisata. (2) faktor keamanan, merupakan faktor yang berisi serangkaian peraturan maupun tindakan yang dilakukan oleh pengelola wisata untuk mencegah terjadinya ancaman keamanan, atau kecelakaan kepada para wisatawan. (3) faktor kesehatan, merupakan faktor yang berisi serangkaian tindakan yang dilakukan guna menjamin kebersihan sanitasi, dan lingkungan, serta menjamin tidak tertularnya wisatawan oleh wabah penyakit berbahaya seperti halnya HIV, ebola, zika, dan lainnya. (4) faktor sumber daya manusia, menunjukkan kualifikasi para pekerja wisata terampil, dan seberapa baik penyedia wisata dalam melakukan perekrutan dan pendidikan terhadap karyawan mereka. (5) faktor teknologi informasi merupakan faktor yang menyediakan kemudahan bagi wisatawan untuk dapat melakukan pemesanan destinasi wisata, tiket perjalanan, paket wisata, dan lainnya secara online. Faktor ini sangat bersinggungan dengan kehadiran teknologi informasi dalam pelayanan ticketing, dan reservasi online.

Kedua, kondisi kebijakan pariwisata merupakan dimensi yang berisi serangkaian keterkaitan pemerintah setempat dalam mengelola dan mengembangkan pariwisatanya. Adapun faktor yang terdapat dalam dimensi ini meliputi: (1) faktor prioritas pariwisata, merupakan prioritas yang menjadi tujuan negara dalam mengembangkan wisatanya. Hal ini berkaitan dengan visi negara dalam pariwisatanya, mulai dari slogan yang disamaikan hingga hasil yang diharapkan. (2) faktor keterbukaan internasional, menunjukkan keterbukaan akses kerjasama antar negara dengan negara lainnya dalam peluang mengembangkan pariwisatanya secara terbuka. Semakin terbuka akses kerjasama antar negara maka akan semakin tinggi pula daya saing pariwisata negaranya. (3) faktor persaingan harga, yang menciptakan terbukanya perdagangan secara adil, tanpa adanya monopoli. Semakin kompetitif harga yang ditawarkan maka akan semakin besar kesempatan bagi para pelaku usaha dalam berbagai kategori untuk dapat menawarkan produknya dan bersaing satu dengan lainnya. Disisi lain wisatawan dapat menerima barang yang mereka inginkan dengan harga terbaik. (4) faktor keberlanjutan lingkungan, menjamin adanya keberlangsungan dan perlindungan terhadap lingkungan. Sehingga alam akan tetap lestari, dan perilaku wisatawan akan menjadi disiplin.

Ketiga, kondisi infrastruktur, merupakan dimensi yang terkait dengan pengadaan fasilitas fisik dan transportasi untuk mengakses destinasi wisata. Terdapat tiga faktor yang menjadi bagian dimensi ini, yakni: (1) faktor transportasi udara, yang memerhatikan pengadaan infrastruktur penerbangan, mulai dari bandara, pesawat, hingga jumlah jam berdasarkan jarak penerbangan. (2) faktor transportasi darat mampu mengubungkan pusat bisnis, pemerintahan, dan destinasi wisata secara langsung akan lebih baik bagi pengembangan pariwisata. Seperti dengan ketersediaan kereta, dan transportasi penunjang lain yang memberikan kenyamanan selama dalam perjalanan. (3) faktor layanan wisatawan, berkaitan dengan kualitas pelayanan bagi wisatawan. Semakin komprehensif fasilitas yang disediakan, maka layanannya akan semakin berkualitas.

Keempat, kondisi sumber daya, merupakan dimensi yang berkaitan dengan daya tarik yang ditimbulkan oleh kekayaan bawaan yang dimiliki oleh suatu destinasi. Dimensi ini terdiri dari dua faktor yaitu: (1) faktor sumber daya alam, yang meliputi kekayaan alam, flora dan fauna, serta kehadiran taman nasional dan area yang dilindungi. Faktor ini memberikan daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung, karena keindahan alam secara alami memberikan daya tarik yang berbeda dengan yang dibuat secara sengaja. (2) faktor budaya dan bisnis perjalanan, berkaitan dengan atraksi budaya yang ditampilkan oleh sebuah destinasi. Semakin menarik atraksi budayanya, maka daya tarik terhadap wisatawan akan semakin tinggi, terlebih jika disematkan warisan budaya UNESCO, akan lebih tinggi probabilitasnya bagi para wisatawan untuk berkunjung ke tempat wisata.

Berdasarkan paparan di atas, maka untuk dapat mengetahui daya saing pariwisata suatu negara, diperlukan model yang sesuai dengan paparan Porter atas daya saing pariwisata tersebut. Adapun model yang dikemukakan Porter dikenal dengan sebutan model *Porter's Diamond*. Modelnya merepresentasikan metodologi untuk membangun strategi perusahaan dalam mencapai daya saing lebih besar dalam globalisasi ekonomi. Porter menggunakan dua jenis faktor dalam model ini, yaitu faktor primer dan faktor sekunder. Faktor primer terdiri dari kondisi faktor produktif; adanya sumberdaya manusia yang berkualitas; kondisi permintaan (rasa dan variasi); serta karakteristik, kehadiran dan perkembangan sektor terkait. Faktor sekunder terdiri dari tindakan yang diambil oleh pemerintahan lokal, dan

perubahan. Kedua jenis faktor ini selanjutnya dijabarkan kedalam empat fakto, yaitu kondisi faktor, kondisi permintaan, industry penunjang dan terkait, dan strategi firma, struktur dan persaingan.

Porter menjelaskan bahwa (1) kondisi faktor, merupakan faktor produksi, seperti tenaga kerja ahli, infrastruktur, dan kebutuhan berkompetisi dalam industri seperti apa adanya. Bila dibandingkan dengan faktor-faktor pembangun daya saing pariwisata, maka variabel keamanan, kesehatan, sumber daya manusia, sumber daya alam, budaya dan bisnis perjalanan termasuk dalam faktor ini; (2) kondisi permintaan, merupakan pemasaran atas barang dan jasa. Berdasarkan hal ini maka performa pariwisata yang meliputi variabel kedatangan wisatawan internasional, penerimaan pariwisata internasional, dan arus masuk investasi asing termasuk dalam faktor ini; (3) industri pendukung dan terkait, merupakan ketersediaan penyedia produk atau jasa yang terkait persaingan internasional. Berdasarkan hal ini maka variabel lingkungan bisnis, teknologi informasi, infrastruktur transportasi udara, transportasi darat dan pelabuhan, pelayanan wisatawan termasuk dalam faktor ini; dan (4) strategi firma, struktur dan persaingan, merupakan bentuk dari dukungan pemerintah atas terciptanya kebijakan menciptakan persaingan industri yang kompetitif. Berdasarkan hal ini maka variabel prioritas pariwisata, keterbukaan internasional, persaingan harga, keberlanjutan lingkungan termasuk dalam faktor ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan alur logika deduktif yang dijelaskan secara deskriptif. Berdasarkan hal ini maka penelitian ini ditujukan untuk melakukan uji pengaruh antar variabel dengan menggunakan data-data numerik, dan berdasarkan teori yang telah dipilih dan menjelaskannya dalam sebuah deskripsi. Sebagaimana Nanang Martono menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif dilakukan dengan mengumpulkan data berupa angka, atau data berupa kata-kata atau kalimat yang dikonversi menjadi bentuk angka. yang diolah menggunakan metode statistik tertentu dengan menguji teori terdahulu guna menyelesaikan masalah penelitian atau menjawab pertanyaan penelitian.¹⁵

¹⁵ Nanang Martono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder Edisi Revisi 2*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 20.

Variabel independen dalam penelitian ini disebut juga variabel faktor-faktor pembangun daya saing pariwisata yang terdiri dari beberapa dimensi dan faktor sesuai dengan kerangka pemikiran. Dimensi variabel daya saing meliputi kondisi lingkungan penunjang, kondisi kebijakan pariwisata, infrastruktur, dan sumber daya. Sedangkan faktor dari dimensi penelitian ini terdiri dari: lingkungan bisnis, keamanan, kesehatan, sumber daya manusia, teknologi informasi, prioritas pariwisata, keterbukaan internasional, persaingan harga, keberlanjutan lingkungan, transportasi udara, transportasi darat dan pelabuhan, pelayanan wisatawan, sumber daya alam, dan budaya dan bisnis perjalanan. Variabel dependen dalam penelitian ini disebut juga variabel performa pariwisata yang terdiri dari tiga faktor, yaitu kedatangan wisatawan internasional, penerimaan pariwisata internasional, dan arus masuk investasi asing.

Data masing-masing variabel dalam definisi operasional ini didapat berdasarkan data yang tersedia dalam TTCI 2017 dan 2019. Data ini telah dipublikasi berdasarkan data survei melalui wawancara eksekutif negara-negara yang terlibat dalam WEF, dengan indikator pertanyaan berdasarkan *The Global Competitiveness Report 2016 – 2017* dan *2018 – 2019*. Data yang diperoleh dibentuk kedalam kode tingkatan antara satu sampai tujuh. Satu (1) menunjukkan kualifikasi terendah, terkecil, atau terlemah dari indikator, sedangkan tujuh (7) menunjukkan kualifikasi tertinggi, atau terkuat. Sehingga berdasarkan hal tersebut, negara-negara yang memiliki nilai indeks besar yakni antara lima (5) sampai tujuh (7) dapat dikatakan lebih unggul dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki nilai indeks satu (1) sampai tiga (3), sementara negara dengan nilai indeks empat (4) berada diantara keduanya atau rata-rata.

Populasi penelitian merupakan ke-seluruhan unit individu dalam ruang lingkup penelitian yang akan diteliti dengan tingkat unit analisis tertentu. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari unit analisis negara yang merupakan anggota Asia Pasifik, sejalan dengan fokus penelitian yang mengkaji daya saing pariwisata negara-negara Asia Pasifik. Populasi keseluruhan yang peneliti ambil dari negara-negara Asia Pasifik ialah 21 negara. Negara-negara tersebut ialah Australia, Bangladesh, Kamboja, Tiongkok, Hong Kong, India, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Laos, Malaysia, Mongolia, Nepal, Selandia Baru, Pakistan, Filipina,

Singapura, Sri Lanka, Taiwan, Thailand dan Vietnam. Kedua puluh satu negara ini akan dikaji dalam dua tahun yakni tahun 2017 dan 2019, sehingga keseluruhan populasi dapat dikatakan menjadi 42 negara. Data-data dari negara-negara tersebut kemudian dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi literatur dan dokumentasi yang bersumber dari sumber data sekunder.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi karena penelitian ini adalah melakukan uji pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Jenis analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linear berganda yang menjelaskan hubungan antara variabel dependen dengan banyak variabel independen. Adapun bentuk dari persamaan regresi linear berganda adalah:

$$y = \alpha + b_1x_1 + \dots + b_kx_k$$

Keterangan:

- y : adalah variabel dependen
- α : adalah konstanta populasi
- b : koefisien regresi populasi
- x : adalah variabel independen
- k : adalah jumlah variabel bebas

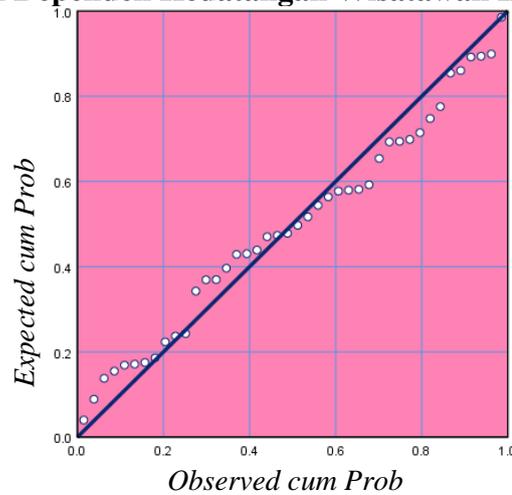
Uji regresi linear berganda memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi guna memastikan data yang digunakan layak dan sesuai untuk diperujikan secara linear berganda, yang disebut uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik merupakan uji yang digunakan untuk melihat sebaran data yang berlaku dalam penelitian. Adapun uji asumsi klasik memuat beberapa bentuk pengujian mulai dari uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

Pengaruh Faktor Pembangun Daya Saing Pariwisata Terhadap Kedatangan Wisatawan Internasional

Uji Asumsi Klasik

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab metodologi sebelumnya bahwa uji asumsi klasik digunakan untuk melihat sebaran data yang berlaku dalam penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menggunakan tiga macam uji asumsi klasik dalam penelitian ini, yaitu uji normalitas, uji linearitas dan uji multikolinearitas. Ketiganya dapat dijelaskan berdasarkan tabel dan gambar berikut:

**Gambar 1. Hasil Uji Normalitas P Plot
Variabel Dependen Kedatangan Wisatawan Internasional**



Sumber: Diolah oleh Peneliti.

Gambar di atas menunjukkan bahwa data yang diperoleh mengikuti garis diagonal, sehingga disimpulkan bahwa data yang digunakan untuk variabel ini terdistribusi secara normal.

Tabel 1. Hasil Uji Linearitas dan Multikolinearitas

Faktor-faktor pembangun daya saing pariwisata	Sig	Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
Lingkungan Bisnis	0.963	0.075	13.301
Keamanan	0.849	0.271	3.690
Kesehatan	0.044	0.147	6.793
Sumber Daya Manusia	0.146	0.112	8.946
Teknologi Informasi	0.002	0.045	22.128
Prioritas Pariwisata	0.986	0.298	3.357
Keterbukaan Internasional	0.656	0.173	5.793
Persaingan Harga	0.962	0.441	2.266
Keberlanjutan Lingkungan	0.750	0.194	5.144
Transportasi Udara	0.214	0.064	15.706
Transportasi Darat dan Pelabuhan	0.727	0.098	10.173
Pelayanan Wisatawan	0.976	0.147	6.816
Sumber Daya Alam	0.082	0.212	4.713
Budaya dan Bisnis Perjalanan	0.002	0.194	5.144

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Berdasarkan tabel uji, didapati bahwa secara umum variabel independen memiliki hubungan yang linear secara signifikan terhadap variabel dependen, kecuali untuk variabel kesehatan, teknologi informasi dan budaya dan bisnis perjalanan yang memiliki nilai *deviation from linearity sig* < 0,05. Tabel ini juga menunjukkan bahwa variabel lingkungan bisnis, teknologi informasi, transportasi

udara, dan transportasi darat dan pelabuhan memiliki nilai *tolerance* < 0,10 dan *VIF* > 10,00, sehingga terjadi multikolinearitas pada keempat variabel ini, sedangkan variabel lain memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan *VIF* < 10,00, sehingga tidak terjadi gejala multikolinearitas pada sepuluh variabel lainnya. Gejala multikolenearitas yang terjadi dalam penelitian ini disebabkan oleh lebarnya sebaran data yang digunakan dalam variabel tersebut, terutama terkait dengan sampel negara yang digunakan dimana negara maju di Asia Timur cenderung memiliki nilai yang berkali lipat dibanding negara berkembang di Asia Selatan, sehingga meskipun terjadi multikolinearitas, tetap akan digunakan.

Uji Model Pada Variabel Dependen Terhadap Kedatangan Wisatawan Internasional

Uji model merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui seberapa signifikan dan berpengaruh penempatan variabel independen dalam model yang digunakan terhadap variabel dependen. Uji ini terdiri dari berbagai macam cara pengujian, namun dalam penelitian ini peneliti hanya akan menggunakan dua macam uji yang umum digunakan, yakni uji simultan yang melihat signifikansi variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen berdasarkan uji F, dan uji determinasi yang melihat kekutan model variabel independent secara bersama-sama dalam menjelaskan variabel dependen berdasarkan nilai *R Square*.

Tabel 2. Hasil Uji Model pada Variabel Dependen terhadap Kedatangan

Faktor-faktor pembangun daya saing pariwisata	Hasil Uji	
	<i>T</i>	<i>Sig</i>
Konstanta	-0.226	0.823
Lingkungan Bisnis	-0.008	0.993
Keamanan	-0.249	0.805
Kesehatan	-2.651	0.013
Sumber Daya Manusia	1.303	0.204
Teknologi Informasi	2.053	0.050
Prioritas Pariwisata	0.297	0.769
Keterbukaan Internasional	-4.441	0.000
Persaingan Harga	0.853	0.401
Keberlanjutan Lingkungan	-1.622	0.116
Transportasi Udara	0.350	0.729
Transportasi Darat dan Pelabuhan	1.083	0.288
Pelayanan Wisatawan	1.376	0.180
Sumber Daya Alam	1.184	0.247
Budaya dan Bisnis Perjalanan	2.419	0.023

	<i>R</i>	<i>R Sq</i>	<i>F</i>	<i>Sig</i>
<i>Regression</i>	0.899	0.808	8.121	0.000
<i>Residual</i>				
<i>Total</i>				

Sumber: Hasil olah data peneliti

Berdasarkan tabel di bawah, didapati bahwa nilai *R Square (R Sq)* adalah 0,808, sedangkan nilai *F* adalah 8,121 (*Sig* = 0,000). Hal ini berarti bahwa model yang digunakan sangat mampu merepresentasikan hubungan yang terjadi antara variabel independen dengan variabel dependen, yang artinya variabel faktor pembangun daya saing pariwisata secara bersama-sama tak hanya memiliki kekuatan model yang tinggi dalam menjelaskan variabel dependen kedatangan wisatawan internasional, yang mencapai 80,8%, namun juga secara bersama-sama mampu menjelaskan variabel dependen tersebut dengan signifikan. Keduanya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Uji Parsial Pada Variabel Dependen Kedatangan Wisatawan Internasional

Uji parsial merupakan uji yang dilakukan guna mengetahui signifikansi pengaruh dari hipotesis variabel independen terhadap variabel dependen secara sendiri-sendiri atau parsial. Berdasarkan tabel di atas, kita dapat bahwa secara parsial, hanya variabel kesehatan, teknologi informasi, keterbukaan internasional, dan budaya dan bisnis perjalanan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel kedatangan wisatawan internasional. Hal ini ditandai dengan nilai signifikansi 0,000-0,050, sedangkan variabel lain tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel kedatangan wisatawan internasional, yang ditandai dengan nilai signifikansi 0,050-0,999. Sehingga secara parsial, dapat dikatakan bahwa hipotesis hubungan antara variabel kesehatan, teknologi informasi, keterbukaan internasional, dan budaya dan bisnis perjalanan terhadap variabel kedatangan wisatawan internasional diterima, sedangkan untuk hubungan variabel lainnya dapat dikatakan bahwa hipotesisnya ditolak.

Berdasarkan tabel di bawah, diperoleh hasil nilai konstanta negatif, dengan secara setiap individu variabel didapati bahwa sepuluh diantaranya memiliki nilai positif, dan empat lainnya memiliki nilai negatif atas variabel kedatangan wisatawan internasional. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka peneliti

mendapati hasil analisis regresi linear berganda, dengan paparan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Faktor-faktor Pembangun Daya Saing Pariwisata)	Kedatangan Wisatawan Internasional	
	B	Beta
Konstanta	-0.193	N.a.
Lingkungan Bisnis	0.193	0.126
Keamanan	-0.051	-0.046
Kesehatan	-0.771	-0.594
Sumber Daya Manusia	0.555	0.328
Teknologi Informasi	0.685	0.830
Prioritas Pariwisata	0.051	0.036
Keterbukaan Internasional	-0.986	-0.888
Persaingan Harga	0.108	0.066
Keberlanjutan Lingkungan	-0.801	-0.381
Transportasi Udara	0.028	0.035
Transportasi Darat dan Pelabuhan	0.208	0.271
Pelayanan Wisatawan	0.211	0.274
Sumber Daya Alam	0.285	0.274
Budaya dan Bisnis Perjalanan	0.267	0.444

Sumber: Hasil olah data peneliti

Kesembilan variabel yang memiliki nilai positif ialah sumber daya manusia, teknologi informasi, prioritas pariwisata, persaingan harga, transportasi udara, transportasi darat dan pelabuhan, pelayanan wisatawan, sumber daya alam, dan budaya dan bisnis perjalanan. Sedangkan kelima variabel yang bernilai negatif ialah lingkungan bisnis, keamanan, kesehatan, keterbukaan internasional dan keberlanjutan lingkungan. Sehingga rumus yang terbentuk adalah sebagai berikut:

$$Z \text{ Score } y = -0,193 + 0,126x_1 - 0,046x_2 - 0,594x_3 + 0,328x_4 + 0,830x_5 + 0,036x_6 - 0,888x_7 + 0,066x_8 - 0,381x_9 + 0,035x_{10} + 0,271x_{11} + 0,274x_{12} + 0,274x_{13} + 0,444x_{14}$$

Berdasarkan rumus tersebut maka diperoleh data bahwa:

1. Bila negara tidak melakukan apapun terhadap variabel faktor-faktor pembangun daya saing maka akan terjadi penurunan jumlah kedatangan

wisatawan internasional sebanyak 0,193 kali dari jumlah sebelumnya di negara tersebut.

2. Bila negara meningkatkan variabel lingkungan bisnis sebesar 1 angka maka akan terjadi kenaikan jumlah kedatangan wisatawan internasional sebanyak 0,126 kali dari jumlah sebelumnya di negara tersebut.
3. Bila negara meningkatkan variabel keamanan sebesar 1 angka maka akan terjadi penurunan jumlah kedatangan wisatawan internasional sebanyak 0,046 kali dari jumlah sebelumnya di negara tersebut.
4. Bila negara meningkatkan variabel kesehatan sebesar 1 angka maka akan terjadi penurunan jumlah kedatangan wisatawan internasional sebanyak 0,594 kali dari jumlah sebelumnya di negara tersebut.
5. Bila negara meningkatkan variabel sumber daya manusia sebesar 1 angka maka akan terjadi kenaikan jumlah kedatangan wisatawan internasional sebanyak 0,328 kali dari jumlah sebelumnya di negara tersebut.
6. Bila negara meningkatkan variabel teknologi informasi sebesar 1 angka maka akan terjadi kenaikan jumlah kedatangan wisatawan internasional sebanyak 0,830 kali dari jumlah sebelumnya di negara tersebut.
7. Bila negara meningkatkan variabel prioritas pariwisata sebesar 1 angka maka akan terjadi kenaikan jumlah kedatangan wisatawan internasional sebanyak 0,036 kali dari jumlah sebelumnya di negara tersebut.
8. Bila negara meningkatkan variabel keterbukaan internasional sebesar 1 angka maka akan terjadi penurunan jumlah kedatangan wisatawan internasional sebanyak 0,888 kali dari jumlah sebelumnya di negara tersebut.
9. Bila negara meningkatkan variabel persaingan harga sebesar 1 angka maka akan terjadi kenaikan jumlah kedatangan wisatawan internasional sebanyak 0,066 kali dari jumlah sebelumnya di negara tersebut.
10. Bila negara meningkatkan variabel keberlanjutan lingkungan sebesar 1 angka maka akan terjadi penurunan jumlah kedatangan wisatawan internasional sebanyak 0,381 kali dari jumlah sebelumnya di negara tersebut.

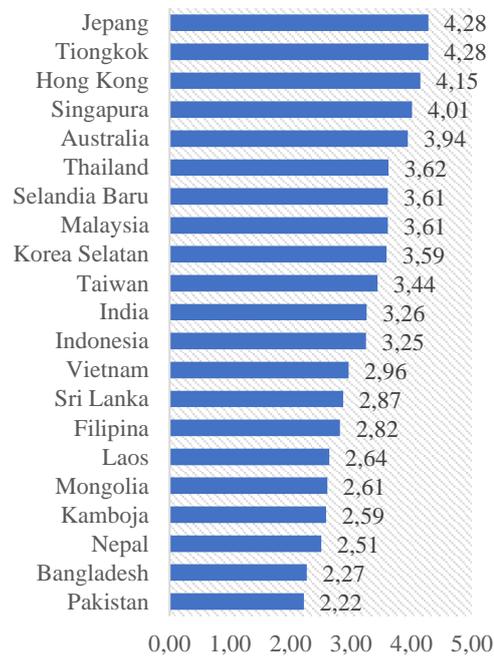
11. Bila negara meningkatkan variabel transportasi udara sebesar 1 angka maka akan terjadi kenaikan jumlah kedatangan wisatawan internasional sebanyak 0,035 kali dari jumlah sebelumnya di negara tersebut.
12. Bila negara meningkatkan variabel transportasi darat dan pelabuhan sebesar 1 angka maka akan terjadi kenaikan jumlah kedatangan wisatawan internasional sebanyak 0,271 kali dari jumlah sebelumnya di negara tersebut.
13. Bila negara meningkatkan variabel pelayanan wisatawan sebesar 1 angka maka akan terjadi kenaikan jumlah kedatangan wisatawan internasional sebanyak 0,274 kali dari jumlah sebelumnya di negara tersebut.
14. Bila negara meningkatkan variabel sumber daya alam sebesar 1 angka maka akan terjadi kenaikan jumlah kedatangan wisatawan internasional sebanyak 0,274 kali dari jumlah sebelumnya di negara tersebut.
15. Bila negara meningkatkan variabel budaya dan bisnis perjalanan sebesar 1 angka maka akan terjadi kenaikan jumlah kedatangan wisatawan internasional sebanyak 0,444 kali dari jumlah sebelumnya di negara tersebut.

Dapat dikatakan bahwa sebagian besar faktor-faktor pembangun daya saing pariwisata bila diterapkan terhadap kedatangan wisatawan internasional memiliki dampak positif, dengan rasio 10/14 atau setara dengan 71,43% dari keseluruhan variabel. Keseluruhan variabel secara rata-rata memberikan dampak positif terhadap kedatangan wisatawan internasional sebesar 0,055 dengan variabel yang berdampak tertinggi ialah variabel teknologi informasi yang memberikan dampak positif sebesar 0,830 kali dan keterbukaan internasional yang memberikan dampak negatif sebesar 0,888 kali. Sedangkan variabel yang memiliki dampak terendah ialah transportasi udara yang memiliki dampak positif sebesar 0,035 kali dan keamanan yang berdampak negatif sebesar 0,046 kali.

Keunggulan Kompetitif Negara-negara Asia Pasifik

Analisis keunggulan kompetitif dilakukan dengan pengklasifikasian variabel independen dan dependen ke dalam model *Porter's Diamond*.

Gambar 1. Perbandingan Keunggulan Kompetitif Pariwisata Negara-negara Asia Pasifik



Sumber: Diolah oleh Peneliti

Berdasarkan data di atas, dapat kita ketahui bahwa pariwisata di negara-negara Asia Pasifik memiliki nilai keunggulan kompetitif berbeda-beda, dimana rentangnya berada pada angka 2 sampai 5. Rentang nilai 2 sampai 3 merupakan rentang dengan jumlah terbanyak, yakni sembilan negara, mulai dari Bangladesh, Kamboja, Laos, Mongolia, Nepal, Pakistan, Filipina, Sri Lanka, dan Vietnam. Rentang nilai 3 sampai 4 memiliki jumlah negara yang tidak berbeda jauh dengan rentang sebelumnya, yakni delapan negara yang terdiri dari Australia, India, Indonesia, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Taiwan dan Thailand. Sedangkan pada rentang nilai tertinggi yaitu 4 sampai 5, hanya terdapat empat negara, yakni Tiongkok, Hong Kong, Jepang dan Singapura. Dari ketiganya, nilai tertinggi dimiliki Tiongkok dengan nilai 4,28, dan nilai terendah ialah Pakistan dengan nilai 2,22, sedangkan yang berada diantara keduanya ialah Indonesia dengan nilai 3,25.

Pemetaan Pariwisata Negara-negara Asia Pasifik

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka peneliti akan memetakan kondisi pariwisata di negara-negara Asia Pasifik berdasarkan pada indeks variabel

pembangun daya saing pariwisata dan variabel performa pariwisata. Kedua hal tersebut selanjutnya akan dibandingkan dengan nilai dari pertumbuhannya dari tahun 2017 ke tahun 2019, dan melihat posisi negara-negara tersebut.

Table 4. Pemetaan Pariwisata Negara-negara Asia Pasifik

Faktor Pembangun Daya Saing Pariwisata				Kedatangan Wisatawan Internasional			
Negara	Indeks	Negara	Tumbuh	Negara	Jumlah	Negara	Tumbuh
Jepang	5,35	Pakistan	8,43	Tiongkok	58812850,00	India	93,63
Australia	5,18	Bangladesh	8,24	Thailand	32702842,50	Nepal	74,44
Singapura	5,15	India	6,07	Hong Kong	27285263,00	Vietnam	62,67
Hong Kong	5,14	Mongolia	4,72	Malaysia	25834875,50	Jepang	45,36
Selandia Baru	4,99	Tiongkok	4,50	Jepang	24214254,50	Indonesia	24,42
Korea Selatan	4,89	Korea	4,48	Singapura	12979714,50	Filipina	23,51
Malaysia	4,75	Indonesia	4,37	India	11785016,50	Mongolia	21,52
Tiongkok	4,70	Filipina	4,32	Indonesia	11677379,50	Thailand	18,58
Taiwan	4,69	Vietnam	3,98	Taiwan	10589692,50	Australia	18,42
Thailand	4,54	Thailand	3,52	Vietnam	10432900,00	Sri Lanka	17,68
Indonesia	4,34	Kamboja	2,82	Australia	8129850,00	Kamboja	17,32
India	4,25	Nepal	2,65	Korea Selatan	7283725,50	Selandia Baru	16,98
Vietnam	4,03	Jepang	2,30	Filipina	5990791,00	Singapura	15,4
Sri Lanka	4,03	Malaysia	1,98	Kamboja	5188715,00	Tiongkok	6,78
Filipina	3,89	Selandia Baru	1,88	Laos	3400063,50	Hong Kong	4,49
Mongolia	3,72	Australia	0,97	Selandia Baru	3297000,00	Taiwan	2,87
Laos	3,70	Laos	0,97	Sri Lanka	1957390,00	Korea Selatan	0,95
Kamboja	3,60	Hong Kong	-0,55	Pakistan	965499,00	Malaysia	0,88
Nepal	3,55	Singapura	-1,24	Nepal	739585,00	Bangladesh	0
Bangladesh	3,25	Taiwan	-1,36	Mongolia	427752,00	Pakistan	0
Pakistan	3,18	Sri Lanka	-1,93	Bangladesh	125000,00	Laos	-8,9

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Berdasarkan data pada tabel 4 didapati bahwa rata-rata negara-negara Asia Timur memiliki nilai variabel tertinggi pada faktor pembangun daya saing daripada negara sub kawasan lainnya, namun rata-rata negara-negara Asia Selatan justru memiliki angka pertumbuhan tertinggi dibanding sub kawasan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa potensi pariwisata di negara-negara Asia Selatan dalam mengembangkan faktor daya saingnya lebih besar dibandingkan negara lain, terutama Pakistan, Bangladesh dan India. Sehingga tidak menutup kemungkinan suatu saat daya saing pariwisata negara-negara Asia Selatan yang merupakan

negara-negara berkembang akan melampaui daya saing pariwisata negara-negara Asia Timur yang merupakan negara maju bila tetap konsisten.

Sedangkan pada performa pariwisata, seperti halnya faktor daya saing pariwisata, negara-negara Asia Timur saat ini memiliki performa yang jauh lebih besar dibandingkan negara di sub kawasan lainnya, terutama Tiongkok dan Hong Kong, sementara negara-negara di kawasan Asia Selatan juga memiliki nilai pertumbuhan performa pariwisata yang lebih tinggi dibanding lainnya, terutama India dan Nepal. Sehingga sama halnya dengan faktor daya saing, negara-negara Asia Selatan tidak menutup kemungkinan akan melampaui negara-negara Asia Timur pada suatu waktu bila tetap konsisten dengan pertumbuhannya.

Tabel 5. Keunggulan dan Kelemahan Pariwisata di Negara-negara Asia Pasifik

No	Nama Negara	Faktor-faktor Pembangun Daya Saing Pariwisata																											
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
1	Australia	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
2	Bangladesh	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	
3	Kamboja	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	
4	Tiongkok	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
5	Hong Kong	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
6	India	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
7	Indonesia	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
8	Jepang	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
9	Korea Selatan	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
10	Laos	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	
11	Malaysia	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
12	Mongolia	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	
13	Nepal	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
14	Selandia Baru	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
15	Pakistan	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	
16	Filipina	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	
17	Singapura	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
18	Sri Lanka	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	
19	Taiwan	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
20	Thailand	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
21	Vietnam	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	

Keterangan: U Unggul, R Rata-rata, L Lemah, A Tahun 2017, B Tahun 2019

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Pemetaan faktor-faktor pembangun daya saing pariwisata juga dapat menunjukkan keunggulan dan kelemahan dari pariwisata sebuah negara. Sebagaimana telah disinggung dalam definisi operasional di bab metodologi penelitian, peneliti membagi kategori keunggulan dan kelemahan pariwisata negara-negara Asia Pasifik berdasarkan faktor-faktor pembangun daya saing pariwisata kedalam tiga bagian. Ketiga bagian tersebut ditandai dengan warna yang berbeda satu dengan lainnya, yakni warna hijau untuk kategori unggul, warna kuning gold untuk kategori rata-rata, dan warna jingga kecoklatan. Faktor-faktor

pembangun daya saing pariwisata berkategori unggul merupakan faktor yang memiliki nilai indeks $\geq 5 - \leq 7$, sementara faktor-faktor yang berkategori rata-rata merupakan faktor yang memiliki nilai indeks $\geq 4 - < 5$, sedangkan faktor-faktor berkategori lemah memiliki nilai indeks < 4 .

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kelompok negara dengan keunggulan pariwisata terbanyak ialah Singapura dengan sepuluh faktor, Australia Sembilan faktor, dan Jepang Sembilan faktor, sementara kelompok negara dengan keunggulan pariwisata terkecil ialah Pakistan dan Bangladesh dengan hanya satu faktor. Kelompok negara dengan nilai faktor rata-rata terbanyak ialah India, Indonesia, Korea Selatan dan Malaysia, sedangkan kelompok negara dengan nilai faktor rata-rata tersedikit ialah Singapura, Pakistan dan Kamboja dengan hanya dua faktor. Adapun kelompok negara dengan kelemahan pariwisata terbanyak ialah Pakistan dengan sebelas faktor, Bangladesh sepuluh faktor, dan Kamboja sembilan faktor, sementara negara dengan kelemahan pariwisata terkecil ialah Jepang yang sama sekali tidak memiliki faktor pembangun daya saing pariwisata dalam kategori lemah. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa Jepang memiliki pariwisata yang paling unggul secara keseluruhan dibanding negara lainnya, sementara Pakistan merupakan negara yang memiliki pariwisata paling lemah diantara negara lainnya.

Faktor-faktor Pembangun Daya Saing Pariwisata dan Kerjasama Internasional di Bidang Pariwisata.

Berdasarkan analisis penelitian yang telah dibahas, maka diperoleh beberapa intisari penelitian, yakni pada variabel kedatangan wisatawan internasional, faktor pembangun daya saing yang signifikan berjumlah empat variabel, yakni kesehatan, teknologi informasi, keterbukaan internasional serta budaya dan bisnis perjalanan. Sedangkan faktor yang memiliki pengaruh positif terhadap variabel ini adalah lingkungan bisnis, sumber daya manusia, teknologi informasi, prioritas pariwisata, persaingan harga, transportasi udara, transportasi darat, pelayanan wisata, sumber daya alam, dan budaya dan bisnis perjalanan.

Berdasarkan ringkasan di atas, maka peneliti menemukan bahwa untuk meningkatkan performa pariwisatanya secara keseluruhan, maka negara saat ini harus lebih konsen pada variabel berikut ini secara berurutan yakni teknologi

informasi, budaya dan bisnis perjalanan, sumber daya manusia, pelayanan wisata, sumber daya alam, transportasi darat, lingkungan bisnis, persaingan harga, prioritas pariwisata dan transportasi udara. Hal ini berarti factor utama yang dapat meningkatkan kedatangan wisatawan internasional ialah factor yang terkait langsung dengan wisatawan mulai dari teknologi yang memudahkan mencari informasi destinasi wisata hingga berbagai fasilitas akomodasi dan layanan wisatawan. Kondisi saat ini negara-negara Asia Pasifik banyak melakukan kerjasama pariwisata antar negara, baik dalam bentuk organisasi maupun kesepakatan lebih konsen kepada manajemen pemerintahan dan bisnisnya. Sehingga kondisi saat ini dapat dikatakan kurang tepat untuk meningkatkan kedatangan wisatawan internasional, sebab mengedepankan campur tangan negara lebih utama serta bisnis lebih didahulukan dari factor lain, sementara seharusnya untuk dapat meningkatkan kedatangan wisatawan internasional semestinya lebih mengutamakan berbagai factor yang dapat menjamin layanan wisata yang terbaik.

Kesimpulan

Berdasarkan paparan di atas maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan tingkat kebenaran 98%, faktor-faktor daya saing pariwisata mempengaruhi kedatangan wisatawan internasional sebesar 80,80%. Dari keseluruhan faktor yang ada, teknologi informasi merupakan faktor terpenting yang dapat meningkatkan kedatangan wisatawan internasional secara signifikan dengan angka pengaruh 0,830, sedangkan variabel keterbukaan internasional justru menjadi kebalikannya dengan angka pengaruh $-0,888$. Sementara, pada sisi negara, Jepang merupakan negara yang memiliki keunggulan kompetitif terbesar yakni 4,28, sedangkan Pakistan memiliki keunggulan kompetitif terkecil yakni 2,22.

Penelitian ini masih hanya memberikan pemetaan dan gambaran dari uji pengaruh dan masih belum mendalam karena menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan sampel 21 negara, sedangkan model yang digunakan merupakan model yang diterapkan pada lebih dari 100 negara. Untuk itu, peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian ini, terutama meskipun dengan tingkat kebenaran 98% penelitian ini masih memiliki *confidence interval* 17% sehingga harus hati-hati dalam menggunakan hasil penelitian ini. Maka peneliti menyarankan

untuk setidaknya menggunakan sampel 36 negara atau menambah variabel penelitian untuk mendapat *confidence interval* dibawah 10%.

Meskipun demikian, pemetaan yang dihasilkan dalam penelitian ini dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan untuk merumuskan prioritas kebijakan dalam menentukan capaian daya saing pariwisata negaranya, terutama Indonesia. Berikut ini adalah rekomendasi yang peneliti berikan untuk pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan performa pariwisatanya, yaitu jika Indonesia ingin meningkatkan kedatangan wisatawan internasional maka perlu meningkatkan variabel teknologi informasi dan variable lain yang berkaitan langsung dengan jaminan atas pelayanan terhadap wisatawan mulai dari perencanaan wisata, akomodasi hingga fasilitas destinasi. Maka Indonesia disarankan menjalin kerjasama dibidang tersebut dengan Hong Kong selaku negara yang memiliki nilai indeks variable teknologi informasi tertinggi dibanding negara lainnya, dengan indeks 6,50 pada 2017, dan 6,60 pada 2019 atau menjalin kerjasama dengan Jepang yang memiliki nilai kompetitif tertinggi.

Daftar Pustaka

Buku

- Uniter Nations for World Tourism Organizations. 2010. *Understanding Basic Glossary*. New York: UNWTO.
- Uniter Nations for World Tourism Organizations. 2017. *UNWTO Annual Reports 2017*. Jenewa: UNWTO.
- World Economic Forum. 2017. *The Travel and Tourism Competitiveness Report 2017: Paving The Way for More Sustainable and Inclusive Future*. Jenewa: WEF
- Asia Pacific Economic Cooperation. 2018. *State of APEC Tourism Report 2018*. Lima: APEC Secretariat.
- Jackson, Robert dan George Sorensen. 2013. *Introduction to International Relations: Theories, and Approaches 5th Edition*. New York: Oxford University Press.
- Wardani, Mia Ayu dan Sri Mulatsih. 2017. *Analisis Daya Saing dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ekspor Ban Indonesia ke Kawasan Amerika Latin*. Bogor: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan.
- Trisnawati, Rina, Wiyadi dan Edy Priyono. 2008. *Analisis Daya Saing Industri Pariwisata untuk Meningkatkan Ekonomi Daerah: (Kajian Perbandingan Daya Saing Pariwisata Antara Surakarta dengan Yogyakarta)*. Yogyakarta: Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Islam Indonesia.

- Yuliyanti, Karlina 2009. *Analisis Faktor-faktor Penentu Daya Saing dan Preferensi Wisatawan Berwisata ke Kota Bogor (Skripsi)*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Calderwood, Lauren Uppink dan Maksim Soshkin. 2019. *The Travel and Tourism Competitiveness Report 2019: Travel and Tourism at a Tipping Point*. Jenewa: World Economic Forum.
- United Nations for World Tourism Organizations. 2010. *UNWTO Annual Reports 2010*. Jenewa: UNWTO.
- Static Division, Department of Economic and Social Affairs United Nations. 2010. *International Recommendations for Tourism Statistic 2008*. New York: United Nations.
- Wall, Geoffrey dan Alister Mathieson. 2006. *Tourism: Change, Impacts, and Opportunities*. London: Pearson Education Limited.
- Luo, Wenbin. 2018. *Evaluating Tourist Destination Performance: Expanding the Sustainability Concept*. Basel: MDPI.
- Nunkoo, Robin dan Boopen Seetanah. 2018. *Foreign Direct Investment and Tourism Development: A Theoretical and Empirical Review* dalam Cooper, Chris, Serena Volo, William C. Gartner dan Noel Scott. 2018. *The SAGE Handbook of Tourism Management: Theories, Concepts and Disciplinary Approaches to Tourism*. London: SAGE Publications Ltd.
- Association of South East Asia Nations. 2015. *ASEAN Economic Community Blueprint 2025*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- Ritchie, J.R. Brent dan Crouch, Geoffrey I. 2003. *The Competitive Destination: A Sustainable Tourism Perspective*. Cambridge: CABI Publishing.
- Romero, Maria del P. Pablo, Calero, Palma Golmez dan Rivas, Javier Sanches. 2016. *Tourism, Competitiveness and Economic Growth: A New Analytical Model*. InTech.
- Martono, Nanang. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder Edisi Revisi 2*. Jakarta: Rajawali Press.
- Martono, Nanang. 2014. *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*. Depok: Rajawali Press.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: BP Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: BP Universitas Diponegoro.

Jurnal

- Porter, Michael E. 1990. *The Competitive Advantage of Nations*. Harvard: Harvard Business Review.

- Croes, Robertico. 2013. *Evaluation of Tourism Competitiveness and Its Effect on Destination Management: Making A Difference in Costa Rica?*. Costa Rica: Dialogos Revista Electronica de Historia, Universidad de Costa Rica.
- Dwyer, Larry dan Kim, Chulwon. 2003. *Destination Competitiveness: A Model and Determinants*. Sydney: University of New South Wales.
- Widyatama, Danar, Djumawan, dan Hartono, Muji. 2016. *Peran Indonesia dalam Mewujudkan Demokratisasi ASEAN 1998 – 2010*. Yogyakarta: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Negeri Yogyakarta.

Website

<http://www.world-country.com>

<http://www.knomea.com>

<http://www.market-width.com>

<http://tourism-review.org>

<https://kemlu.go.id>

<https://tourism-data.id>

<https://worldbank.org>

<https://intechopen.com>

<http://www.wttc.org>

<http://www.weforum.org>

<http://www.economicshelp.org>

**Kebijakan Luar Negeri Inggris Dalam Bidang Ekonomi Terhadap Eropa
Pasca Referendum *Brexit* Pada Sektor *Foreign Direct Investment* (FDI),
Ketenagakerjaan, dan Ekspor Impor Pada Tahun 2016-2018**

Alfidra Aska Piejaya¹

¹ Hubungan Internasional, Universitas Lampung
alfidraaska@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan luar negeri Inggris terhadap Uni Eropa pada tahun 2016 hingga 2018. Penelitian ini berangkat dari masalah yang ditemukan oleh penulis yakni selama rentang tahun 2016 hingga 2018 terjadi fenomena *Brexit*, fenomena ini terjadi untuk pertama kali dalam sejarah Eropa, hal tersebut memaksa kedua belah pihak untuk menegosiasikan ulang segala kebijakan yang telah terjalin sebelumnya. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan luar negeri dan teori pertumbuhan ekonomi dengan pendekatan penelitian kualitatif. Hasil yang diketahui oleh penulis adalah referendum *Brexit* membawa dampak negatif pada postur perekonomian Inggris yakni penurunan PDB dan FDI. Selain itu kebijakan Inggris pada bidang FDI setelah referendum *Brexit* adalah negara UE yang menanamkan modalnya di Inggris saat ini sedang di moratorium. Dalam bidang ketenagakerjaan Inggris tetap mempertahankan kebijakan anti *schengen* dan warga UE wajib mendapatkan visa jika ingin memasuki wilayah Inggris. Dalam ekspor impor Inggris mengenakan tarif pada 88% komoditi yang masuk ke Inggris dengan tarif sebesar 36% dari harga barang.

Kata Kunci : *Brexit*, Ekspor-Impor, FDI, Ketenagakerjaan.

PENDAHULUAN

Negara Inggris sejak tahun 1973 sudah bergabung dengan perjanjian perdagangan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) yang saat ini di kenal dengan nama Uni Eropa (UE). Keuntungan Inggris bergabung dengan UE adalah, mendapatkan kemudahan dalam perdagangan internasional, yaitu tidak ada hambatan tarif maupun hambatan non tarif untuk perdagangan dalam lingkup UE (Detik.com). Kemudahan ini sangat menguntungkan untuk Inggris, karena pasar penjualan produk dari Inggris juga sebagian besar ada di negara-negara anggota UE. Alasan Inggris ingin bergabung dengan UE tidak terlepas dari alasan ekonomi. Perubahan orientasi ekonomi luar negeri Inggris bukan saja karena masalah tarif, adapun masalah lainnya adalah kekuatan ekspor, karena tidak adanya tarif dalam keanggotaan UE yang membuat negara anggota UE bebas mengekspor ke sesama

anggota UE. Dengan harapan inilah Inggris apabila bergabung dengan UE dapat dengan leluasa mengeksport hasil olahannya ke sesama negara anggota UE tanpa dikenakan tarif (Fidya Faridah Kultsum, 2018:166).

Inggris yang awalnya merupakan anggota dari UE memutuskan untuk keluar dari blok tersebut, dan peristiwa ini disebut dengan *Brexit*. *Brexit* adalah fenomena dimana salah satu anggotanya keluar dari UE. Negara Inggris, Irlandia Utara, Wales dan Skotlandia dikenal juga sebagai Britania Raya. Oleh karena itu fenomena ini disebut dengan *Britain Exit (Brexit)* yang berarti negara-negara yang tergabung di wilayah Britania Raya setuju untuk keluar dari UE (www.guardian.com). Peristiwa ini terjadi pada masa kepemimpinan perdana menteri David Cameron. Semua usia dapat mengambil bagian dalam voting yang diadakan pada Kamis 23 Juni 2016, untuk memutuskan Inggris harus meninggalkan atau tetap berada di UE. Hasilnya yang memilih meninggalkan UE sebanyak 52% sedangkan sisanya atau sekitar 48% memilih untuk tetap berada didalam UE (www.bbc.com).

Sebanyak 52% penduduk warga Inggris memilih untuk meninggalkan UE. Sedangkan sebanyak 48% warga Inggris memilih untuk tetap berada di UE. Total pemilih sebesar 33.551.983 juta jiwa berikut besaran pemilih yang memilih meninggalkan dan tetap berada di UE. Persebaran warga Inggris yang memilih tetap berada di UE sebesar 16.141.241 juta pemilih. Sementara yang memilih meninggalkan UE lebih banyak ketimbang tetap berada di UE, dengan selisih 1.269.501 juta pemilih dengan total 17.410.742 juta pemilih. Kebanyakan warga Inggris yang memilih tetap berada di UE berasal di wilayah Inggris Utara, sedangkan yang memilih meninggalkan UE berasal dari Inggris Selatan. Inggris dapat memberikan permohonan meninggalkan UE dengan merujuk pada pasal 50 dari Perjanjian Lisbon. Perjanjian Lisbon memberikan waktu dua tahun bagi kedua belah pihak untuk menyetujui syarat- syarat untuk dapat keluar dari UE. Dalam pasal 50 perjanjian Lisbon tersebut disebutkan bahwa:

1. *Any Member State may decide to withdraw from the Union in accordance with its own constitutional requirements.*
2. *A Member State which decides to withdraw shall notify the European Council of its intention. In the light of the guidelines provided by the European Council, the Union shall negotiate and conclude an agreement with that State,*

setting out the arrangements for its withdrawal, taking account of the framework for its future relationship with the Union.

3. *For the purposes of paragraphs 2 and 3, the member of the European Council or of the Council representing the withdrawing Member State shall not participate in the discussions of the European Council or Council or in decisions concerning it.*

Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa untuk dapat keluar dari UE, Inggris harus memenuhi syarat-syarat yang terdapat pada pasal 50 perjanjian Lisbon seperti yang disebutkan di atas. Dimana dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa Inggris harus memberi izin Dewan Eropa terkait dengan pengunduran dirinya. Dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa Inggris tidak diperbolehkan ikut berpartisipasi dalam diskusi bersama Dewan Eropa (Europa.eu).

Inggris bergabung dengan UE pada tahun 1973. Tujuan Inggris bergabung dengan UE adalah untuk mendapatkan kemudahan akses pasar bebas antar negara anggota UE. Pada tahun 1987 negara anggota *European Economic Community* (EEC) berkumpul di Brussels untuk menandatangani *Single European Act* (SEA) yang bertujuan untuk mencapai sebuah pasar internal, area tanpa batas di mana pergerakan bebas barang, orang, jasa, dan modal terjamin. Pencapaian pasar internal ditargetkan untuk dicapai sebelum 31 Desember 1992. Selanjutnya pada 1 November 1993, disepakati perjanjian *Maastricht* sebagai penanda berdirinya UE. Perjanjian Maastricht mendorong semakin terintegrasinya Eropa tidak hanya di bidang ekonomi akan tetapi juga bidang sosial, dan politik. Perjanjian ini menyempurnakan *European Community* menjadi UE. Perjanjian ini mencerminkan keinginan negara anggota untuk membawa UE di bawah satu struktur hukum yang jelas dan integrasi mendalam di bidang sosial, politik, dan ekonomi. Terdapat tiga pilar utama dalam UE yang telah diatur didalamnya, yaitu:

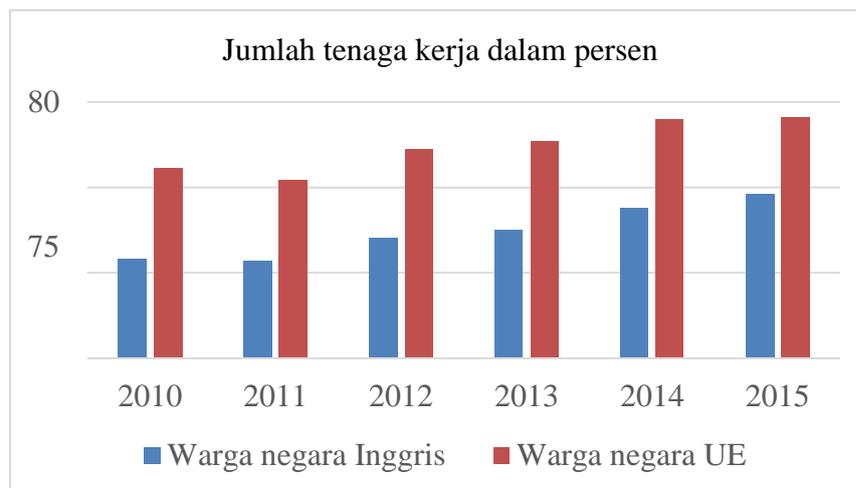
1. *European Communities*, yang menangani kebijakan ekonomi, sosial, dan masalah lingkungan UE
2. *Common Foreign and Security Policies* (CFSP), yang menangani urusan luar negeri dan kemiliteran UE.
3. *Justice and Home Affairs*, yang bertanggung jawab atas kerjasama mengenai pemberantasan tindak kriminal.

Di dalam perjanjian ini, terdapat beberapa hal penting lain yaitu memperkenalkan rencana penggunaan mata uang tunggal, meningkatkan kekuatan parlemen Eropa dengan membuat lembaga baru yaitu *Comitee of the Region*, dan memperkenalkan konsep “kewarganegaraan” Eropa. Perjanjian ini ditanda tangani oleh Perdana Menteri Inggris John Mayor. Dengan dibentuknya UE berarti akan terjadi transfer kekuatan besar negara-negara anggota untuk menjadi satu dalam sebuah UE. Inggris menandatangani perjanjian *Maastricht* dengan pernyataan “*opt-outs*” atau ketidaksetujuan Inggris pada opsi *single currency* (Nissen, 2008:25)

Sebagai hasil dari Perjanjian *Maastricht*, UE membuat kebijakan *Single Market* yang mulai berlaku pada bulan Januari 1993. Kebijakan ini didasarkan pada empat kebebasan; yaitu pergerakan barang, tenaga kerja, jasa, dan modal di seluruh negara anggota UE. Hal ini berarti Inggris dapat melakukan kegiatan perdagangan secara bebas tanpa hambatan dengan negara-negara anggota UE yang lain (Europa.ue).

Investasi berkembang dari 23 billion Euro di tahun 1992 menjadi 159 billion Euro pada tahun 2015. Inggris otomatis menjadi negara tempat investasi modal terbesar nomor lima di dunia (Appendini, 1999:3). Tetapi Inggris tidak dapat menikmati peningkatan investasi secara terus menerus, hal tersebut dapat dilihat dari diagram di bawah ini. Dilihat dari data di atas penanaman modal asing ke Inggris terus menurun sejak tahun 2010. Tahun 2013 merupakan tahun terendah dalam kurun waktu tahun 2010-2015. Pada tahun 2013 terendah dengan nilai sebesar 69 juta Dollars, di bandingkan dengan tahun 2010 memiliki selisih sebesar 6 juta Dollars. Penurunan terjadi di karenakan para investor merasa tidak aman untuk menempatkan dananya di Inggris karena belum ada kepastian kapan Inggris akan keluar dari UE walaupun referendum *Brexit* sudah lama keluar sehingga investor menarik kembali dananya dari Inggris.

Selain sektor investasi, yang menjadi masalah adalah sektor tenaga kerja, karena berdasarkan data tenaga kerja asing lebih banyak dibandingkan tenaga kerja lokal Inggris, hal tersebut dapat dilihat dari data berikut ini. Dilihat dari gambar di bawah, pada tahun 2010 hingga 2015, pekerja yang berasal dari luar Inggris lebih banyak dibandingkan dengan tenaga kerja lokal Inggris dengan perbandingan 4:5.



Gambar 1. Persentase pekerja UE dan non UE di Inggris tahun 2010-2015

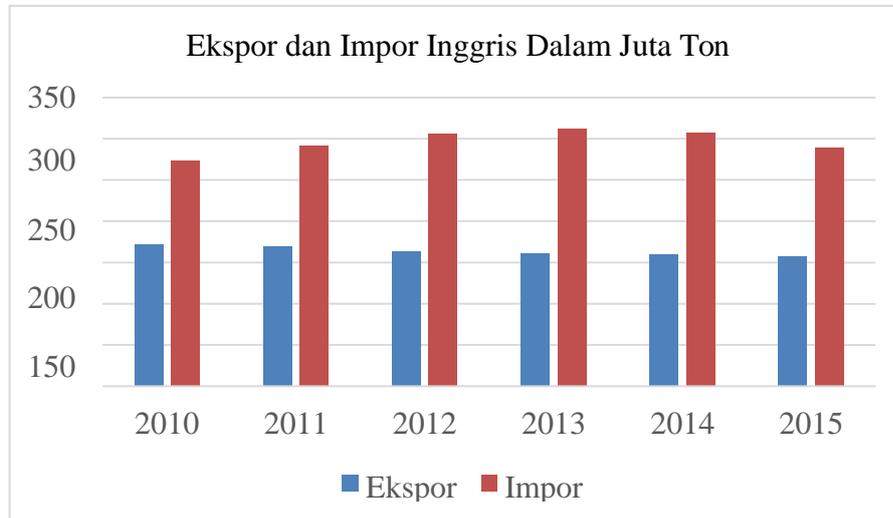
Sumber: Diolah dari lama web <https://www.ons.gov.uk>

Dampak dari hal tersebut yang akan dialami oleh Inggris adalah semakin mengecilnya kesempatan bagi warga negara lokal untuk mendapatkan pekerjaan karena semakin bertambahnya jumlah saingan dengan datangnya tenaga kerja asing ke negara Inggris. Dampak lain dari banyaknya tenaga kerja asing yang ada adalah menimbulkan peluang pengangguran semakin bertambah, apabila tidak diimbangi dengan penambahan lapangan pekerjaan. Di samping itu, sektor ekspor dan impor juga mengalami masalah karena berdasarkan data, impor Inggris lebih banyak dibandingkan dengan data ekspor mereka. Karena berdasarkan teori perdagangan internasional bahwa *single market* seharusnya dapat dinikmati dengan adanya kenaikan ekspor dibandingkan impor, tetapi ini justru ekspor Inggris lebih kecil dibandingkan dengan impornya.

Dari data di bawah, pada tahun 2010 jumlah ekspor negara Inggris sebesar 172 juta ton sedangkan jumlah impornya sebesar 274 juta ton, kemudian pada tahun 2011 jumlah ekspor Inggris berjumlah 170 juta ton, sedangkan impornya berjumlah 292 juta ton. Jumlah impor dari negara Inggris lebih besar sampai pada tahun 2015 dibandingkan dengan jumlah ekspornya.

Berdasarkan pemaparan penulis di atas, bergabungnya Inggris dengan UE memberikan keuntungan pada sektor FDI, ketenagakerjaan, dan ekspor-impor. Namun, 6 tahun terakhir sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 data menunjukkan bahwa FDI, ketenagakerjaan, dan ekspor-impor mengalami

permasalahan. Dimana FDI permasalahannya adalah menurunnya FDI yang ada di Inggris dari tahun 2011 sampai dengan 2015 apabila FDI menurun dampaknya juga adalah ekspor juga akan menurun (Republika.co.id).



Grafik 2. Jumlah Ekpor dan Impor negara Inggris tahun 2010-2015

Sumber: Diolah dari laman web <https://www.ons.gov.uk>

Di sektor ketenagakerjaan permasalahannya adalah banyaknya tenaga kerja asing yang bekerja di Inggris dibandingkan dengan tenaga kerja lokal, jika permasalahan ini tidak diselesaikan maka akan terjadi kecemburuan sosial di kalangan tenaga kerja lokal kepada tenaga kerja asing karena adanya perbedaan antara fasilitas dan gaji yang mereka terima. Selain itu juga dapat menyebabkan terjadinya proses marginalisasi pencari kerja domestik karena mempersempit peluang tenaga kerja lokal untuk dapat terserap di berbagai lapangan pekerjaan yang tersedia (Republika.co.id).

Sedangkan permasalahan ekspor-impor berdasarkan data di atas, jumlah impor lebih banyak dibandingkan dengan jumlah ekspor yang dilakukan oleh Inggris hal ini berarti ada indikasi bahwa produk dalam negeri sudah tergantikan oleh produk dari luar negeri dan apabila terus di biarkan akan membuat produk lokal semakin tergerus dan tentu apabila impor lebih tinggi dibandingkan dengan ekspor maka akan terjadi pelemahan nilai mata uang (Detik.com). Oleh sebab itu penulis ingin menjabarkan upaya kebijakan luar negeri Inggris dalam bidang ekonomi terhadap Eropa pasca referendum *Brexit* pada sektor *Foreign Direct Investment* (FDI), ketenagakerjaan, dan ekspor-impor pada tahun 2016-2018.

Mengapa penulis memilih ketiga sektor tersebut dibandingkan dengan sektor lainnya karena menurut *International Political Economy* ketiga sektor tersebut berperan dalam pembangunan di Inggris (David H. L., 2005:29). Karena referendum *Brexit* terjadi pada tahun 2016 tentu Inggris harus merubah kebijakannya terhadap UE dalam bidang ekonomi seperti FDI, ketenagakerjaan, dan ekspor impor. Hal tersebut lah yang menarik bagi penulis untuk dapat menelitinya.

Kebijakan Luar Negeri

Foreign policy atau kebijakan luar negeri adalah basis pondasi dari Keilmuan Hubungan Internasional. Teori dan masalah dalam keilmuan tersebut berangkat dari hubungan yang terjadi antar negara dengan negara, kebijakan luar negeri juga merupakan basis dari para pengambil keputusan. Kebijakan luar negeri adalah mengenai bagaimana negara bersikap dan bereaksi terhadap dunia internasional, serta bagaimana dunia internasional membentuk karakter aktor tersebut, hal ini merupakan dasar dari kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri adalah refleksi sikap dan reaksi yang dipicu oleh sistem internasional itu sendiri, masing-masing negara pasti memiliki pandangan dan sikap yang berbeda dengan negara lainnya. (Hudson, 2013:20). Hal tersebut yang kemudian justru memengaruhi negara lainnya, dan akan turut mengubah situasi sistem internasional itu sendiri.

Perumusan kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh seorang aktor atau negara tentunya melihat serta memahami konsekuensi dari kebijakan yang akan diterapkan. Menurut Valerie Hudson kebijakan luar negeri terbagi menjadi tiga yakni aksi, tidak bereaksi dan tidak memutuskan atau abstain (Hudson, 2014:75). Kebijakan luar negeri langsung mengarah kepada permasalahan yang dituju dengan kata lain yang membuat aktor bersikap demikian. Lebih lanjut, kebijakan luar negeri tidak akan berlaku selamanya, kebijakan luar negeri merupakan sesuatu yang bersifat dinamis mengikuti sistem internasional itu sendiri.

Sifat dinamis yang dimiliki kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh beberapa faktor, bergantung pada masalah yang terdapat pada sistem internasional, kepentingan, serta politik domestik turut membawa pengaruh pada kebijakan luar

negeri suatu negara. Sederhananya dalam memahami kebijakan luar negeri tidak lebih sebagai aksi-reaksi yang terjadi dalam sistem internasional, tentunya ketidakpastian yang merupakan sifat sistem internasional itu sendiri membawa perubahan pada konstelasi kebijakan luar negeri. Tujuan pembuatan kebijakan luar negeri negara akan mengejar kepentingan yang dirasa paling menguntungkan untuk dirinya hal tersebut bisa dilakukan dengan cara perubahan ataupun pemeliharaan (*change and maintenance*).

Proses pengambilan keputusan menurut model Graham T. Allison memiliki tiga *point of view* yang pertama yaitu actor rasional, dimana negara adalah aktor utama dalam pengambilan keputusan secara rasional berawal dari kepentingan nasional mereka. Yang kedua adalah *organizational behavior* dimana organisasi atau institusi menawarkan aksi yang direkomendasikan berdasarkan pada pengalaman yang telah dilewati. Yang ketiga adalah *governmental politics*, model ini melihat bahwa kebijakan adalah hasil dari permainan politik seperti proses tawar menawar antara aktor yang terlibat. (Allison, 1999:45). Dalam menganalisis kebijakan luar negeri Inggris, penulis menggunakan teori kebijakan luar negeri yang merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu negara dalam merespon kebijakan dari negara lain dalam dunia internasional. Hal tersebut menjadikan bahwa kebijakan luar negeri menjadi suatu keharusan untuk dikeluarkan oleh suatu negara. Referendum yang dikeluarkan Inggris bahwa negara tersebut memutuskan untuk keluar dari UE menjadi awalan baru kebijakan luar negeri Inggris terhadap UE.

Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi merupakan teori yang menjelaskan tentang perkembangan negara-negara dalam bidang ekonomi yang bisa diukur dengan FDI, ketenagakerjaan, dan juga imigrasi (Schumpeter :1911 15). Teori ini membahas khusus negara-negara miskin tentang pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi (Schumpeter, 1911:15). Pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan produksi atau pendapatan per kapita suatu negara. Produksi biasanya diukur dengan *Gross National Product* (GNP) atau *Gross National Income* (GNI). Pembangunan ekonomi mengacu pada pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan

perubahan dalam ekspor dan struktur ekonomi.

Perubahan-perubahan pada lini GNI dan GNP ini dipengaruhi oleh FDI, Imigrasi, dan Ketenagakerjaan (Schumpeter, 1911:44). Performa GNI dan GNP dipengaruhi oleh indikator tersebut karena proses ekonomi baik input dan output membutuhkan investasi (FDI), ketenagakerjaan dan juga kebijakan keimigrasian (Schumpeter, 1911:33). Teori ini juga membahas peningkatan terhadap performa ekonomi suatu negara. Peningkatan GNP akan dipengaruhi oleh peningkatan GNI. Menurut Schumpeter tersebut disebutkan pertumbuhan ekonomi suatu negara juga ditentukan atau dapat diukur melalui GNI dan GNP. Tetapi hal yang menentukan GNI dan GNP ditentukan oleh tiga faktor FDI, Ketenagakerjaan, dan juga ekspor impor. Kebijakan ketiga sektor itu mempengaruhi GNI dan GNP dengan kata lain ketiga sektor tersebut yang mengontrol pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ketiga kebijakan tersebut menjadi unsur dari pertumbuhan ekonomi, hal tersebutlah yang menentukan sukses dan tidaknya performa pertumbuhan ekonomi suatu negara. Teori ini digunakan untuk menjelaskan dampak kebijakan luar negeri Inggris pasca referendum *Brexit* terhadap FDI, ketenagakerjaan, dan ekspor impor. Sehingga bisa diketahui performa pertumbuhan ekonomi Inggris pasca referendum *Brexit*.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah fenomenologi, dengan pendekatan penelitian kualitatif. Fenomenologi merupakan metode penelitian yang menjelaskan terkait fenomena sosial yang jarang terjadi. Fenomenologi ini sendiri berbasis pada kejadian yang hanya sekali seperti anomaly ataupun peristiwa yang langka lainnya. (Reeves, 2008:118). Menurut Edmund Husserl menjelaskan bahwa fenomenologi menuntut penulis untuk melakukan penelitian mendalam (*In Depth*).

“The role of phenomenology was therefore to explore the essence of consciousness as experienced from the first-person point of view. Studies that draw upon this theoretical perspective concentrate on exploring how individuals make sense of the world in terms of the meanings and classifications they employ” (Reeves :2008).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah kualitatif-deskriptif, menurut penulis merupakan sebuah pendekatan penelitian terhadap suatu fenomena

tertentu yang ingin diteliti, kemudian mendeskripsikan fenomena tersebut secara detail, dan mengaitkannya dengan teori yang relevan hingga berujung pada kesimpulan.

John Creswell mengatakan bahwa, kualitatif merupakan pendekatan Penelitian yang prosesnya terletak pada teks dan juga gambar dan dalam menjelaskan data yang telah didapat membutuhkan sebuah penulis yang telah memahami subjek, objek penelitian serta teori terkait (Creswell, 1997:183). Berbeda dengan penelitian yang berbasis pada kuantitatif, ada beberapa perbedaan dalam penelitian yang menggunakan kualitatif, pada penelitian kualitatif dimulai dari pengambilan data seperti gambar, lalu mempersiapkannya ke dalam analisis data, kemudian membaca data, mendeskripsikan data, lalu menghubungkan pada teori, kemudian baru kesimpulan (Creswell, 1997:185).

Lebih jauh tentang pendekatan penelitian kualitatif- deskriptif, pendekatan ini memiliki tujuan merangkum atau mendeskripsikan secara komperhensif dari suatu kejadian khusus, baik itu individu maupun kelompok (Lambert, 2012:5). Kualitatif- deskriptif tidak hanya menjelaskan atau mendeskripsikan secara garis besarnya saja namun juga harus mendetail dalam menjelaskan fenomena/*research area* dari yang sedang diteliti.

Descriptive research is a study of status and is widely used in education, nutrition, epidemiology, and the behavioral sciences. Its value is based on the premise that problems can be solved and practices improved through observation, analysis, and description (Koh, 2000:8),

Ensook mendukung penulis bahwa kualitatif-deskriptif merupakan pendekatan yang prakteknya memecahkan masalah berdasarkan analisis dan deskripsi.

Penelitian kualitatif-deskriptif pada akhirnya mempelajari tentang sesuatu secara teoritis dengan pendekatan deskriptif yang ada didalam kualitatif. Kualitatif-deskriptif lebih cenderung menggambarkan dari kejadian alami, yang kemudian ditarik ke dalam konteks *research arena*, dalam penelitian ini juga tidak ada pemilihan variabel ketika akan memulainya. Kualitatif-deskriptif tidak menjadikan landasan teori sebagai suatu kebutuhan yang wajib dipenuhi dalam penelitian jenis ini, sebab penelitian dengan kualitatif-deskriptif tidak menghasilkan teori dari data yang dikumpulkan selama penelitian (Koh, 2000:7) karena hanya menjabarkan atau

mendeskripsikan saja, sehingga penelitian kualitatif-deskriptif akan menuntun penulis kepada simpulan yang kaya informasi bersumber dari data yang diperoleh.

Jenis data yang diperoleh penulis adalah jenis data sekunder artinya data yang kedua. Penulis memperoleh data tersebut melalui artikel-artikel yang diterbitkan dalam jurnal-jurnal internasional, laporan berita, laporan tahunan, website pemerintah. Sumber-sumber tersebut keseluruhannya berkenaan dengan kebijakan luar negeri khususnya menyangkut Inggris dan UE, yang digunakan untuk menjawab sumber masalah yang penulis angkat dalam skripsi ini.

Proses dalam Memutuskan Kebijakan Luar Negeri Inggris Bidang Ekonomi Setelah Referendum *Brexit*

Pedoman negosiasi UE yang diadopsi secara resmi oleh Dewan Eropa pada bulan April 2017 yang menguraikan prinsip-prinsip inti untuk negosiasi dan menyerukan pendekatan bertahap. Pedoman tersebut memperjelas bahwa bukan anggota UE, yang tidak memenuhi kewajiban yang sama dengan anggota, tidak dapat memiliki hak yang sama dan menikmati manfaat yang sama dengan anggota pada PTE tidak dapat dipisahkan. Dokumen tersebut juga berpendapat bahwa negosiasi harus dibagi menjadi dua fase: yang pertama menyangkut ketentuan keluar dan yang kedua tentang masa depan hubungan Inggris dan UE. Fase kedua akan dimulai setelah terdapat kemajuan yang cukup dibuat pada tahap pertama. Akhirnya, UE memperjelas bahwa tidak akan ada negosiasi terpisah antara negara-negara anggota individu dan Inggris.

Setelah referendum, PM Theresa May melihat bahwa dia harus membuat terobosan yang jelas tentang UE untuk mendapatkan dukungan dari kelompok yang anti Eropa. Dia menafsirkan hasil referendum sebagai sinyal yang jelas bahwa rakyat Inggris menginginkan pemerintah mengendalikan Imigrasi UE, melakukan *Hard Brexit*, yang akan membuat Inggris meninggalkan sistem PTE (*Journal of European Economic Policy*:2019). Januari 2017 di *Lancaster House*, Perdana Menteri May menguraikan tujuan negosiasi pemerintah untuk *Brexit*. Pidato itu mengesampingkan keanggotaan Inggris pada PTE, sebaliknya menyerukan untuk melakukan kesepakatan perdagangan bebas dengan UE dan perjanjian perdagangan baru dengan negara-negara lain.

Tujuan penting lainnya bagi pemerintah adalah untuk mengambil kembali kendali imigrasi dan hukum Inggris, mengakhiri yurisdiksi pengadilan Eropa, serta menjamin hak-hak warga negara UE yang tinggal di Inggris, dan hak warga negara Inggris di negara-negara anggota UE lainnya. Pada bulan Maret 2017, negosiasi tentang penarikan keanggotaan dari UE dimulai (*Journal of European Public Policy* :2019).

Dampak *Brexit* terhadap Postur Perekonomian Inggris

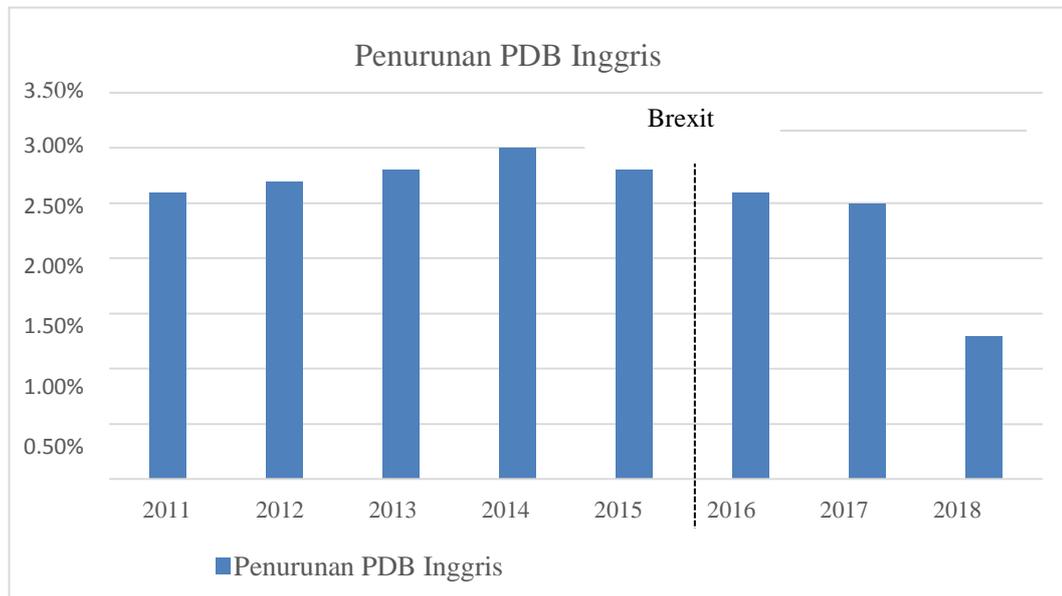
Keputusan Inggris untuk keluar dari kesatuan UE tentu membawa efek yang luas bagi Inggris sendiri maupun UE secara keseluruhan. Perekonomian Inggris terpuak akibat fenomena tersebut, hal ini terjadi disebabkan Inggris dan juga negara yang bermitra dengan negara tersebut harus meninjau ulang terkait perjanjian yang telah berjalan. Hal tersebut disebabkan ketika perjanjian tersebut dibuat, negara mitra ekonomi Inggris masih melihat negara tersebut menjadi bagian dari UE, sedangkan sejak Inggris memutuskan keluar maka perjanjian ekonomi harus direvisi. Postur perekonomian menjadi hal pertama yang akan terkena imbas dari fenomena tersebut, sehingga fenomena tersebut akan berdampak langsung.

Penurunan PDB Inggris

Jika Inggris keluar dari UE pada 2018, hal tersebut akan mengurangi ekspor negara itu dan membuat impor negara tersebut lebih mahal. Selain itu tren PDB per kapita akan lebih rendah dalam rentang 0,6%-3,0% pada tahun 2030 dibandingkan jika negara tersebut tetap berada di UE (Ifo.de). Jika memperhatikan perhitungan efek dinamis yang menyebabkan PDB menurun seperti integrasi ekonomi terhadap investasi dan perilaku inovasi maka kerugian PDB akan lebih besar lagi dapat meningkat 14% (Ifo.de).

Penurunan PDB Inggris pasca referendum *Brexit* karena ketidakpastian rencana kepergian negara itu dari UE sejak 31 Oktober 2017. Hal tersebut berdampak pada kepercayaan bisnis dan investor. Ketidakpastian yang terjadi sejak saat itu meningkat. Pemerintah Inggris telah berjanji untuk meninggalkan UE tanpa kesepakatan jika para pemimpin UE menolak untuk menegosiasikan seluruh perjanjian baru dengan Inggris. UE telah mengatakan kesepakatan yang dicapai

sebelum referendum *Brexit*, tetapi ditolak oleh anggota parlemen Inggris, serta tidak siap untuk dinegosiasikan (www.oecd.org).



Gambar 3. Penurunan PDB Inggris.

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Dampak ekonomi Inggris yang memilih meninggalkan UE tanpa kesepakatan perdagangan antar kedua belah pihak, menyebabkan instrumen ekonomi PDB negara tersebut runtuh. Perkiraan dampak dari pindahnya hubungan perdagangan antara Inggris dan UE akan dikenakan tarif, serta hambatan non-tarif baru bagi perdagangan kedua belah pihak. Hal tersebut karena UE akan memperlakukan Inggris sebagai negara yang belum bermitra dagang penting dengan Eropa serta tidak memiliki perjanjian perdagangan sebelumnya.

Penurunan PDB Inggris disebabkan karena tekanan dari parlemen yang menuntut Inggris menegosiasikan perjanjian dengan UE, disisi lain pemimpin UE sepakat menolak, hal tersebut memberikan tekanan terhadap perekonomian negara tersebut cukup hebat (www.wsj.com). Pelaku ekonomi Inggris khawatir jika Inggris keluar tanpa kesepakatan apapun terkait perdagangan dengan Eropa akan menurunkan volume impor negara tersebut. Disebabkan hal tersebut, PDB Inggris diproyeksikan akan mengalami penurunan hingga hal ini berbuntut pada pelambatan ekonomi Inggris (www.wsj.com). Hal utama yang mengkhawatirkan

adalah tarif yang akan diberlakukan kepada Inggris dan sebaliknya, sebab ketika Inggris dalam naungan UE, tarif tersebut ditiadakan.

Dampak dari skenario *Brexit*, di mana perdagangan Inggris dan UE tidak memiliki perjanjian perdagangan, hal tersebut tentu akan memproyeksikan pertumbuhan yang akan kecil bagi Inggris di masa depan. Ekonomi Inggris akan terus melambat beberapa tahun kedepan, sebesar -0,17% pada pertumbuhan PDB riil selama 13 tahun (www.oecd.org). Namun, dampak ini dapat dikurangi hingga rata-rata 0,04% pertahun jika Inggris menerapkan langkah-langkah mitigasi dalam bentuk perdagangan yang mencakup penghapusan tarif (www.oecd.org).

Dampak Ekonomi Inggris Setelah *Brexit* Di Bidang FDI

Inggris terus menunjukkan kinerja yang kuat dalam menarik FDI masuk ke negara tersebut, dan tetap menjadi salah satu penerima terbesar FDI (www.worldbank.org). Pada tahun 2016, setelah serangkaian keputusan besar Inggris untuk keluar dari UE, arus masuk FDI yang dilaporkan ke Inggris mencapai rekor tertinggi sepanjang masa dengan nilai \$196 miliar, menjadikan Inggris penerima investasi terbesar kedua di dunia, setelah Amerika Serikat (www.unctad.org). Di samping ekonomi yang jauh lebih besar seperti Amerika Serikat, Cina dan India, serta Jerman, Inggris juga telah menjadi salah satu penerima terbesar FDI produktif atau investasi yang menghasilkan kapasitas produksi baru. FDI terdiri dari investasi luar suatu negara untuk memulai operasional atas perusahaan asing, hal tersebut berguna untuk memperluas perusahaan yang ada atau mengakuisisi perusahaan lokal.

Inggris adalah penerima utama FDI dengan nilai saham diperkirakan lebih dari £1 triliun, sekitar setengahnya dari anggota lain UE. Menurut *United Kingdom Trade and Investment* (UKTI) hanya Amerika Serikat dan Cina yang menerima FDI lebih banyak daripada Inggris, setelah referendum *Brexit*. Negara-negara umumnya berlomba-lomba mendatangkan FDI karena akan meningkatkan produktivitas, hal tersebut akan meningkatkan *output* bagi negara penerima FDI.

Alasan keberhasilan Inggris dalam menarik FDI berlipat ganda terdapat beberapa hal mendukung hal tersebut. *Pertama*, memiliki bahasa Inggris sebagai

bahasa resmi membuat komunikasi dengan mitra di negara lain menjadi lebih mudah, khususnya dengan AS, investor terbesar di seluruh dunia. *Kedua*, lingkungan yang ramah bisnis dan sistem kelembagaan yang stabil menjadikan negara ini tempat yang menarik untuk memulai dan melakukan bisnis. Inggris juga telah lama menjadi juara perdagangan bebas, yang telah membantu meningkatkan kepercayaan bisnis asing. Inggris adalah ekonomi terbuka yang relatif kecil tetapi sebagai anggota UE, hal ini menawarkan akses bisnis yang sangat mudah ke PTE. Meskipun Inggris tetap menjadi anggota UE hingga 29 Maret 2019, pemungutan suara *Brexit* telah menyebabkan ketidakpastian yang cukup besar atas beberapa hal yang tampaknya penting bagi investor, terutama ketersediaan tenaga kerja dan akses ke pasar UE.

Karena sifatnya yang jangka panjang, FDI sensitif terhadap persepsi risiko ketidakpastian (Resmini, 2000:38). Ini berarti bahwa ketidakpastian yang disebabkan oleh *Brexit* saat ini memiliki dampak signifikan pada FDI ke Inggris. Jepang salah satu investor utama di Inggris, telah memperingatkan bahwa perusahaannya dapat meninggalkan negara itu jika menjadi tidak menguntungkan untuk melayani pasar Eropa dari Inggris (Pitas, 2018:56). Baru-baru ini *Europe Attractiveness Survey*, yang melacak investasi sejak tahun 2000, mencatat peningkatan arus keluar proyek oleh perusahaan-perusahaan Inggris ke negara-negara Eropa lainnya (EY :2018). Laporan ini sebagai peringatan keras dari perusahaan-perusahaan di sektor-sektor tersebut bahwa mereka harus memindahkan pekerjaan dan operasi ke daratan Eropa untuk mengatasi perombakan peraturan yang memuat kejelasan terkait PTE (Chu, 2018:41).

FDI membawa manfaat langsung karena perusahaan asing biasanya lebih produktif dan membayar lebih tinggi upah buruh dari perusahaan domestik. Tetapi FDI juga membawa manfaat tidak langsung seperti penerapan teknologi baru dan juga sistem manajerial di perusahaan asing dapat diadopsi oleh perusahaan domestik, dan hal tersebut seringkali ditemui pada perusahaan multinasional (Harrison dan Rodriguez-Clare, 2009:27). FDI juga bisa meningkatkan kompetisi antar perusahaan dalam negeri, hal tersebut akan memaksa manajer perusahaan lokal untuk meningkatkan kinerja mereka. Terkait dengan efek yang timbul akibat *Brexit* terhadap FDI Inggris, terdapat skenario yang bisa saja terjadi tentunya fenomena

tersebut akan membuat penetrasi FDI Inggris berbeda daripada negara tersebut tergabung dalam UE.

Skenario yang diprediksi dan pasti terjadi adalah penurunan volume FDI Inggris, ada beberapa faktor yang memengaruhinya menjadi turun. Faktor yang pertama adalah Inggris menjadi satu- satunya negara yang akan menjadi platform perdagangan besar di Eropa jika negara tersebut keluar dari UE. Namun hal tersebut dimanfaatkan oleh Inggris untuk meningkatkan tarif, hal tersebut akan menciptakan ketidakseimbangan tarif barang impor negara tersebut. Faktor kedua adalah beberapa perusahaan multinasional menempatkan pabrik mereka di Inggris, namun perakitan yang barang komoditi perusahaan tersebut dilakukan di luar Inggris. Hal ini akan memunculkan sebuah skenario jika perusahaan multinasional tersebut akan mengembalikan pabrik mereka kembali ke negara asal, disebabkan aturan regulasi terkait migrasi serta tarif yang diterapkan Inggris. Ketiga dan terakhir yang menjadi faktor menurunnya FDI Inggris adalah perjanjian perdagangan memegang peranan penting terkait masa depan perekonomian Inggris dan Eropa, keluarnya Inggris tanpa ada kesepakatan perdagangan akan membuat masa depan ekonomi negara tersebut suram, sebab pelaku industri tidak memiliki payung hukum yang jelas bagi aktivitas ekonomi mereka (*BrexitBlueprint*, 2019:24).

Investasi luar negeri ke Inggris 19% lebih rendah akibat suara untuk meninggalkan UE lebih besar ketimbang memilih menetap di UE. Arus masuk FDI ke Inggris terus menurun sejak mencapai puncaknya pada tahun 2015. Untuk Inggris, hal ini adalah penurunan FDI terus menerus terpanjang dalam sejarah Inggris, dengan penurunan sekitar 10% dari total proyek di Inggris tahun 2015 serta penurunan sebesar £1,5 miliar dalam arus investasi modal antara 2016 dan 2017 (University of Sussex :2019).

Pada awal 2015, seperempat dari semua proyek FDI ke dalam UE ditujukan untuk Inggris. Pada akhir 2017, proporsi ini turun menjadi 18%. Di sektor jasa, yang menyumbang sekitar tiga perempat dari ekonomi Inggris, kerugian investasi diperkirakan setinggi 25%. Sektor yang paling terpukul meliputi industri bernilai tinggi seperti penerbitan perangkat lunak, manajemen investasi dan perbankan ritel dengan pengurangan FDI pasca *Brexit* yang menempatkan pekerjaan dengan keterampilan tinggi memiliki risiko tertinggi (www.sussex.ac.uk).

Menurut biro ekonomi Inggris, meskipun Inggris belum meninggalkan UE terdapat dua skenario *Brexit* yang akan berdampak pada keputusan perusahaan multinasional untuk berinvestasi di Inggris. Pertama, ada peran ketidakpastian perusahaan multinasional sementara menunda investasi, menunggu klarifikasi mengenai sifat hubungan masa depan antara Inggris dan UE terutama soal kemudahan melakukan bisnis dengan 27 Negara Anggota UE yang tersisa. Kedua, ada kemungkinan bahwa *Brexit* telah melemahkan kepercayaan investor di Inggris, membuat Inggris secara permanen kurang menarik bagi investor (www.gov.uk/economicsbureau).

Penurunan FDI Inggris tercatat terus menurun sejak tahun 2003 hingga tahun 2017. Lebih dari 12.000 proyek investasi ke Inggris dicatat antara tahun 2003 dan 2017. Jumlah ini mencakup semua investasi produktif berbasis proyek yang menghasilkan kapasitas baru tetapi tidak termasuk merger dan akuisisi. Proyek-proyek ini menghasilkan hampir 900.000 pekerjaan yang diciptakan, dengan perkiraan nilai total investasi \$540 miliar. Sekitar 8.000 perusahaan yang berbeda memilih untuk berinvestasi di Inggris selama periode ini, dan proyek rata-rata menciptakan 72 pekerjaan dan bernilai \$45 juta (Chu, 2018:41).

Tabel 1. Lapangan Kerja dan Pengeluaran Modal.

Tahun FDI	Proyek Investasi	Lapangan Kerja Tercipta	Pengeluaran Modal (USD)
2003-2014	9.006	669.044	416.843
2003-2014 (rata-rata pertahun)	751	55.754	34.737
2003-2014 (rata-rata perproyek)	-	74	46
2015	1.139	81.507	55.971
2015 (rata-rata perproyek)	-	72	49
2016	1.041	67.897	34.739
2016 (rata-rata perproyek)	-	65	33
2017	942	60.629	33.147
2017 (rata-rata per proyek)	-	64	35

Sumber: UK Trade Policy Observatory 2019

Sebagai perbandingan, antara 2003 dan 2017 proyek rata-rata di UE menciptakan 112 pekerjaan dan bernilai \$35 juta. Untuk proyek-proyek di negara-negara non-UE, angka yang sesuai adalah 189 pekerjaan dan \$73 juta. Seperti yang

ditunjukkan pada tabel berikut, penciptaan lapangan kerja rata-rata dan pengeluaran modal per proyek yang dicatat selama periode 2003-2014 yaitu ketika sebelum referendum UE lebih tinggi daripada yang dicatat sejak pemungutan suara *Brexit* pada 2016. Jumlah proyek lebih rendah di 2016 dan lebih rendah lagi di 2017 (Chu, 2018:25).

Investor terbesar di Inggris adalah Amerika Serikat. Antara 2003 dan 2014, proyek ini menyumbang hampir 40 persen dari semua proyek investasi masuk, dan sejak 2015 sekitar 35 persen (www.oecd.org). Investor non UE utama lainnya di Inggris termasuk Jepang, India, Kanada, Australia, dan, baru-baru ini, China, yang sekarang merupakan salah satu dari lima investor teratas dengan 4,5 persen pangsa proyek. Meskipun menyumbang bagian yang lebih kecil dari investasi non-UE, FDI dari UE juga cukup besar. Misalnya, Jerman dan Prancis adalah investor terbesar kedua dan ketiga di Inggris, dengan Prancis menyusul Jerman pada 2015 dan 2016. Namun, pada 2017, FDI dari Prancis turun jauh (dari 89 proyek pada 2016 menjadi 47 pada 2017).

Berbeda dengan Prancis dan Jerman, investasi Amerika Serikat mengalami kenaikan sesudah *Brexit*. Hal ini dikarenakan Amerika bukan merupakan anggota UE, Amerika Serikat dan Inggris terjalin keterikatan perdagangan bebas. Investasi Amerika Serikat naik karena mereka ingin membantu Inggris ketika memutuskan hubungan dengan PTE (www.straitstimes.com). Sektor investasi yang mendominasi investasi langsung luar negeri Inggris adalah sektor teknologi. Sektor teknologi merupakan sektor strategis bagi Inggris. teknologi yang dimaksud adalah teknologi dalam bidang energi baru terbarukan karena London sepakat untuk mereduksi karbon emisi yang dihasilkan industrinya (smart-energy.com)

Dampak Ekonomi Inggris Setelah *Brexit* Di Bidang Ketenagakerjaan

Setelah sektor FDI yang berimbas akibat referendum, hal lain yang turut terkena akibat dari keluarnya Inggris dari UE adalah sektor ketenagakerjaan. Perlu untuk diketahui bahwa index HDI Inggris termasuk yang sangat tinggi (www.oecd.org). Tingginya index pembangunan manusia Inggris menyebabkan penduduk Inggris memiliki keterbukaan wawasan yang sangat tinggi. Hampir seluruh kota di penjuru Inggris memiliki pekerjaan yang berbayar tinggi

(www.oecd.org).

Bidang pekerjaan yang dimiliki rakyat Inggris bergerak di bidang *white collar* artinya hampir 90% rakyat Inggris adalah kalangan menengah atas. Tingginya tingkat pendidikan tentu berimbas pada pembangunan ekonomi, ekonomi Inggris melesat jauh dengan tenaga ahli yang didukung oleh sektor penunjang memadai dan juga pemerintah Inggris sendiri. Tingginya penduduk Inggris yang berada di kalangan menengah atas membuat negara harus mengimpor pekerja kasar atau pekerja terampil yang berasal dari luar Inggris. pada tahap ini perjanjian bergerak bebas baik bagi turis maupun pekerja yang bisa bebas masuk dan keluar Inggris berpengaruh. Keterbukaan Inggris terhadap pekerja asing dan juga turis memudahkan pekerja khususnya dari kalangan Eropa untuk bekerja di Inggris, namun hal itu seketika berubah ketika Inggris memutuskan keluar dari UE.

Statistik yang ada memperlihatkan bahwa referendum Inggris mempengaruhi pergerakan warga uni eropa ke Inggris. dari statistik tersebut pada Juni 2016 warga negara UE yang masuk ke Inggris berkisar sekitar 195.000 orang terus menurun menjadi kurang dari 100.000 orang hingga bulan juni 2017 (Biro Imigrasi Inggris). Hal ini menandakan bahwa warga negara UE yang berkunjung ke Inggris mengalami penurunan minat akibat *Brexit* dan belum lagi syarat yang membuat warga UE memiliki izin khusus untuk masuk ke Inggris. Izin khusus tersebut harus diberikan karena perjanjian bebas lintas batas tersebut juga sedang di moratorium ketika Inggris memutuskan untuk keluar dari UE. Perbandingan dengan ketika ebelum referendum adalah Inggris memiliki lebih banyak pengunjung yang berkisar diatas 200.000 orang warga negara UE yang berada di Inggris, namun seiring dengan keputusan Inggris untuk keluar dari UE maka intensitas warga negara UE yang berkunjung ke Inggris juga mengalami penurunan.

Dampak Ekonomi Inggris Setelah *Brexit* Di Bidang Ekspor Impor

Hal terakhir yang berimbas akibat referendum dari Inggris adalah ekspor impor. Bagimanapun juga Inggris merupakan negara yang memiliki ekonomi terbesar mengalahkan Jerman di seluruh Eropa. Inggris memiliki iklim investasi yang baik didukung fasilitas yang sangat memadai membuat negara tersebut berhasil mencatatkan sebagai anggota negara dengan ekonomi terbesar di

dunia atau G8 (www.wto.org). Untuk menjaga hal tersebut tetap berjalan baik harus berada dalam koridor yang telah ditetapkan seperti sebelumnya. Sekali gesekan saja akan memengaruhi Inggris bahkan akan menyebabkan kerugian bagi London.

Dalam konteks referendum dan neraca perdagangan Inggris, salah satu yang telah terjalin ketika Inggris berada dalam UE adalah kerjasama ekonomi antara Inggris dengan negara-negara Eropa khususnya perjanjian ketika Inggris memiliki akses ke PTE, dan Eropa memiliki akses ke pasar Inggris. Perjanjian tersebut dibuat karena memiliki potensi keuntungan besar dan juga ketergantungan sebagai negara yang berada di Eropa. Hal tersebut yang membuat kedua belah pihak mengadakan perjanjian pasar bebas dan membuka peluar pasar selebar-lebarnya tanpa terkecuali. Hal tersebut juga termasuk ketika perjanjian bebas tarif yang diterapkan kedua belah pihak, dengan begini, tidak ada lagi halangan bagi kedua negara untuk mengkases pasar masing- masing mitra.

Referendum mempengaruhi itu semua, neraca perdagangan Inggris anjlok karena ketika proses keluarnya Inggris, maka Inggris harus mendiskusikan kembali perjanjian yang telah dibuat. Akibat dari rekonsiliasi perjanjian yang telah ditandatangani kedua belah pihak dan sampai hari inipun belum akhir final maka aktivitas perdagangan dimoratorium sampai kebijakan perdagangan baru selesai dibuat. Hal ini akan membuat proyeksi masa depan ekonomi Inggris memburuk. Berdasarkan analisi dari biro perdagan luar negeri Inggris persentase kerugian defisit ekspor impor Inggris semakin dalam.

Statistik biro perdagan luar negeri Inggris mencatat bahwa kesenjangan dalam neraca perdagangan Inggris semakin dalam. Pada tahun 2016 ketika Inggris melakukan referendum sebesar - 1890 juta Poundsterling namun hal tersebut semakin dalam pasca referendum tahun 2019 sebesar -7124 juta Poundsterling (www.tradingeconomics.com). Hal tersebut mengindikasikan bahwa ekspor impor yang merupakan bagian dalam neraca perdagangan Inggris memiliki efek tidak sedikit, depresi neraca perdagangan akibat dari moratorium perjanjian pasar bebas dan tentu saja tarif yang diberlakukan oleh kedua belah pihak. Hal tersebut akan membuat ekonomi Inggris terhenti dan stagnan, beberapa analisis ekonomi Inggris bahkan mengatakan jika ketidakpastian keluarnya Inggris dari UE terus berlanjut hingga 2021 maka besar kemungkinan ekonomi Inggris akan mengalami resesi.

Daftar Pustaka

Buku

- Chu, B. 2018. *UK Economy to Slows Rapidly as Hard Brexit Looms*. New York. OECD Forecast.
- Creswell, John. 1997. *Qualitative Inquiry and Research Design Choosing Among Five Traditions*. London: SAGE Pubs.
- Harrison dan Rodriguez Clare. 2009. *Multinational and linkages*. Paris: Routledge.
- Keohane, Robert. 1996. *Internationalization and Domestic Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Koh, E.T. 2000. *Introduction to Nutrition and Health Research.*, Massachusetts., Kluwer Academic Publishers.
- Lambert, Mike. 2012. *A Beginner's Guide to Doing Your Education Research Project*. New York., Unniversity of Wolverhampton Pub.
- Maddison, Aggus. 2006. *Asia: Class Structure and Economic Growth: India and Pakistan Since the Mughuls*. San Diego: Routledge.
- Marvin, Zelkowitz. 2009. *Economy in Britain*. London: Routledge.
- Monaghan. A. 2014. *Brexit: A Risk Assessment For Language Provision In Manchester*. Manchester: University of Manchester Publication
- Niall, M Adams. 2004. *Methods and Models in Statistics*. London: Imperial College Press.
- Reid, A. 2019. *Buses annd Breaking Point: Freedom of Expression and the Brexit Campaign*. Brussel: Springer.
- Resmini, 2000. *Not Backing Britain: FDI inflows Since the Brexit Referendum*. London: Routledge.
- Robert and Srensen. 2009. *Introduction to International Relations*. New York: Cambridge University Press.
- Robert Powell. 1994. *Anarchy In International Relations Theory: The Neorealist-Neoliberal Debate*. New York: Rochelleterman.
- Schumpeter, Joseph. 1911. *The Theory Of Economic Development*. New York: Columbia University Press.
- Wipfer, J. 2017. *The Acquis: European Union Law and So Many Laws*. Paris: The History of The European Union.

Jurnal

Brexit Blueprint

- Allison T. Graham et. 1999. *Essence Decision : Explaining the Cuban Missile Crisis*. halaman 13-15.
- Altaweel, M. 2019. *The Heritage of Brexit: Roles of The Past In The Construction of Political Idetities Through Social Media*. Journal of Social Brexit.

- Appendini, Kirsten. 1999. *Economic Integration in NAFTA and the EU Deficient Institutionalality*. New York: Palgrave Macmillan.
- Booth, T. 2017. *Response To Brexit, Archeology And Heritage :Reflection*. Papers from the Institute of Archeology.
- David H L International Political Economy tersedia di http://www.untagsmd.ac.id/files/Perpustakaan_Digital_2/POLITICAL%20ECONOMY%20International%20political%20economy%20Perspectives%20on%20global%20power%20and%20wealth.pdf diakses pada tanggal 20 Januari 2020
- Fidya Faridah Kultsum Dinamika Inggris dan Uni Eropa tersedia di <https://ejournal.upi.edu/index.php/factum/article/download/15603/8738> diakses pada tanggal 18 Januari 2020
- Hawkins, O. 2010. *Brexit an Uncertain Journey*. Evidence Based Nursing.
- Hobolt, SB. 2016. *The Brexit Vote: A Divided Nation, A Devide Continent*. Taylor & Francis Journal of European Public Policy.
- Hudson M. Valerie and Vore S. Christopher. 1995. *Foreign Policy Analysis Yesterday, Today, and Tomorrow Vol. 39 No. 2*. Wiley on Behalf of The International Studies Association.
- Jensen, MD. 2016. *When Politics Prevails: The Political Economy Of A Brexit*. Taylor & Francis Journal of European Economy Policy.
- Pitas, Coastas. 2018., *UK Carmakers Urge Brexitt Delay Rather Than No-Deal Exot*. Euro Pub.
- Reeves Why Use theories in Qualitative Reseach tersedia di <https://www.bmj.com/content/337/bmj.a949> diakses pada tanggal 19 Januari 2020
- Straathof, B., 2008., *The internal market and the ducth economy: implications for trade and economic growth.*, Ideas Repec

Situs, Rilis Media

- BBC *Brexit Result* diakses pada tanggal 12 Februari 2019 tersedia di https://www.www.bbc.com/news/politics/eu_referendum/results.
- BBC *Britain and the EU: A long and Rocky Relationship* Diakses pada tanggal 3 Januari 2018 tersedia di <http://www.www.bbc.com/news/uk-politics-26515129>.
- BBC Dampak *Brexit* bagi UE diakses pada tanggal 3 Januari 2018 tersedia di <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20160624152859134140703/dampak-Brexit-bagi-uni-Eropa-dari-ekonomi-hingga-imigrasi/>
- BBC *United Kingom Country Profile* tersedia di <https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-18023389> diakses pada tanggal 18 Januari 2020.
- CIA *Making Brexit Happen* tersedia di <https://www.cia.org.uk/News/Details/Making-Brexit-Happen> diakses pada tanggal 14 Januari 2020.

- CNBC *What The UK Election Result Means For Brexit* tersedia di <https://www.cnbc.com/2019/12/13/brexit-what-does-the-uk-election-result-mean-for-britain-and-the-eu.html> diakses pada tanggal 19 Januari 2020.
- Fortune Brexit and Its Impact* tersedia di <https://fortune.com/2019/02/21/brexit-ireland-crown/> diakses pada tanggal 1 Januari 2020.
- Government of the UK. UK Trade agreements with non EU Countries* tersedia di <https://www.gov.uk/guidance/uk-trade-agreements-with-non-eu-countries-in-a-no-deal-brexit> diakses pada tanggal 18 Januari 2020.
- How The Uk Remains Its Connection With European Single Market* tersedia di <https://www.straitstimes.com/world/europe/uk-to-end-eu-free-movement-immediately-after-brexit> diakses pada tanggal 18 Januari 2020.
- IFO Economic Effects of Brexit on the European Economy* tersedia di https://www.ifo.de/DocDL/EconPol_Policy_Report_04_2017_Brexit.pdf diakses pada tanggal 4 Desember 2019.
- OECD *Human Development Index of the UK* tersedia di <https://data.oecd.org/united-kingdom.htm> diakses pada tanggal 18 Januari 2020.
- OECD Project publik in the uk after brexit tersedia di <https://data.oecd.org/united-kingdom.htm> diakses pada tanggal 8 Oktober 2019.
- OECD *Reversing Brexot Would Boost Ecnomoy* tersedia di <https://www.bbc.com/news/business-41652416> diakses pada tanggal 18 Januari 2020
- OECD *The Economic Consequences of Brexit* tersedia di <https://www.oecd.org/economy/The-Economic-consequences-of-Brexit-27-april-2016.pdf> diakses pada tanggal 18 Januari 2020-01-18
- OECD *The Potential Economic Impact of Brexit* tersedia di [http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=ECO/WKP\(2018\)66&docLanguage=En](http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=ECO/WKP(2018)66&docLanguage=En) diakses pada tanggal 20 Januari 2020.
- OECD *The Trade Of The Government Of The UK* diakses pada tanggal <http://www.oecd.org/gov/risk/trade-in-counterfeit-products-and-uk-economy-report-update-2019.pdf> diakses pada tanggal 19 Januari 2020.
- Oil Price Slide on Surprise Crude Build* tersedia di <https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/Oil-Prices-Slide-On-Surprise-Crude-Build.html> diakses pada tanggal 3 Januari 2020.
- Reupblika Inggris Uni Eropa Mulai Bahas Perjanjian Dagang Dengan Inggris tersedia di <https://internasional.republika.co.id/berita/q44v9e382/uni-eropa-mulai-bahas-perjanjian-dagang-dengan-inggris> diakses pada tanggal 22 Januari 2020.
- Smart Energy Regional News Europe UK* tersedia di <https://www.smart-energy.com/regiona-news/europe-uk/energy-workforce-challenges-hindering-uks-2050-ne-zero-goal/> diakses pada tanggal 0009 Februari 2020.
- Trading Economics UK Trade Balance* tersedia di <https://tradingeconomics.com/united-kingdom/balance-of-trade> diakses pada tanggal 18 Januari 2020.

UNCTAD *No Deal Brexit* tersedia di <https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2052> diakses pada tanggal 2 Januari 2020.

Universoty of Sussex Exprest says Brexit revolutionse tersedia di <https://www.sussex.ac.uk/news/all?page=79&id=41432> diakses pada tanggal 5 Desember 2019.

World Bank FDI of the UK tersedia di <https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS> diakses pada tanggal 2 Januari 2020.

WSJ Britain Moves Toward Brext as Clock Ticks on Trade Deal tersdia di <https://www.wsj.com/articles/britain-moves-toward-brexite-as-clock-ticks-on-trade-deal-11578402004> diakses pada tanggal 18 Jnuari 2020.

WSJ Five Things About the Brexit Deal tersedia <https://www.wsj.com/articles/five-things-about-the-brexite-deal-11571347640> diakses pada tanggal 3 Januari 2020.

WTO G8 And How The Works To Global Trade tersedia di https://www.wto.org/english/news_e/pres03_e/pr344_g8_summit_stat_e.htm diakses pada tanggal 18 Januari 2020.

Pro Dan Kontra Bitcoin: Analisis Pengaruh Perkembangan Bitcoin, Performa Fiat Money dan Sistem Kelola Negara

Oleh:
Ria Aulia Mediana¹

¹ Hubungan Internasional, Universitas Lampung
riaaulia@outlook.com

Abstrak

Bitcoin memiliki sistem *peer to peer* yang bertolak belakang dengan sistem keuangan dengan menghilangkan pihak ketiga dalam transaksi, hal ini mendapat pertentangan dari banyak negara. Penelitian ini bertujuan mencari pengaruh perkembangan Bitcoin, performa *fiat money* dan sistem kelola negara-negara di dunia dalam menentukan posisinya terhadap legalitas Bitcoin. Teori dan konsep yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sistem keuangan internasional dan sistem kelola negara; dengan pendekatan kuantitatif serta analisis regresi logistik multinomial yang didukung dengan data sekunder. Hasil analisa dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh signifikan dalam menentukan posisi negara atas Bitcoin merupakan faktor-faktor politik, sedangkan faktor-faktor ekonomi justru tidak signifikan berpengaruh. Sehingga dapat dikatakan bahwa penerimaan negara atas Bitcoin cenderung dikarenakan alasan politik dibandingkan dengan ekonomi, padahal Bitcoin itu sendiri berada pada aspek ekonomi. Jika penerimaan Bitcoin di legalkan, maka negara-negara di dunia tetap harus menyertai peran pemerintah sebab Bitcoin dinilai tidak memiliki aturan yang jelas dan berpotensi merugikan orang lain.

Kata Kunci : *Bitcoin, Fiat Money, Cryptocurrency, Sistem Kelola Negara, Sistem Keuangan Internasional*

Pendahuluan

Sistem keuangan internasional di tahun 2008 telah mengalami gangguan akibat terjadinya krisis global yang dirasakan di hampir seluruh negara dengan skala yang berbeda-beda. Sebuah ide baru muncul pada saat bersamaan mengenai format sistem keuangan internasional, yaitu lahirnya sistem *cryptocurrency* yang merupakan penggunaan mata uang digital dengan konsep kriptografi atau kode rahasia sebagai sistem keamanannya. Bitcoin sebagai bentuk *cryptocurrency* pertama yang muncul, telah berkembang di tengah keberadaan sistem keuangan konvensional. Kemunculan Bitcoin kemudian menimbulkan pro dan kontra atas kontrol dan penerimaan negara-negara dunia.

Bitcoin saat ini bukan merupakan satu-satunya bentuk *cryptocurrency* yang ada di dunia. Terdapat 1500 bentuk *cryptocurrency* lainnya: seperti Litecoin, Dogecoin, Ripple dan lain sebagainya.¹ Atas hal ini, Bitcoin merupakan *cryptocurrency* pertama sekaligus yang paling populer. Bitcoin bukan hanya berbeda, namun relatif lebih unggul dari *cryptocurrency* lain, dimana kapitalisasi pasarnya menguasai 49% total keseluruhan *cryptocurrency* dunia. Nilai Bitcoin juga merupakan yang tertinggi di antara *cryptocurrency* lain atau setara dengan 81% dari keseluruhan nilai *cryptocurrency* yang ada. Posisi Bitcoin yang jauh berada di atas *cryptocurrency* lainnya dan berpotensi mendominasi pasar *cryptocurrency*, karena potensi penerimaannya secara luas untuk menyingkirkan *cryptocurrency* lain dari pasar keuangan.

Penerimaan Bitcoin serta sambutan baik dari masyarakat dan dunia bisnis, ternyata tidak sejalan dengan respon pemerintah negara-negara dunia. Kehadiran Bitcoin justru menimbulkan pro dan kontra dalam hubungan antar negara, maupun kehidupan domestik negara. Pemerintah negara-negara di dunia melalui bank sentralnya memiliki posisi beragam atas penerimaan Bitcoin, bahkan cenderung melarang dan belum memandang Bitcoin sebagai sebuah mata uang.

Penelitian ini kemudian melihat beberapa penelitian terdahulu guna memberikan gambaran mengenai fenomena Bitcoin dan perkembangannya, sehingga dapat membantu pembangunan kerangka pemikiran. Hal ini dinilai penting untuk dilakukan guna menemukan pembaharuan dan keunikan pada penelitian, serta mempermudah peneliti dalam membangun kerangka pemikiran. Adapun penelitian tersebut ialah:

Pertama adalah penelitian yang ditulis oleh Thomas Alcorn, Adam Eagle dan Ethan Sherbondy yang berjudul “*Legitimizing Bitcoin: Policy Recommendations*”.² Penelitian tersebut berangkat dari munculnya fenomena Bitcoin yang merepresentasikan sebuah inovasi teknologi pada mata uang. Penelitian karya Alcorn secara tidak langsung memodelkan bahwa pertimbangan

¹ Jenis Cryptocurrency antara lain Ethereum, Ripple, Litecoin, Stellar, Dash, Zcash, Dogecoin, Bytecoin, BitShares, MaidSafeCoin, NXT, BanxShares, Cardano, EOS, NEO, Monero, IOTA, NEM, TRON, RaiBlocks. Data diperoleh dari <https://coinmarketcap.com/all/views/all/>

² Thomas Alcorn. 2013. *Legitimizing Bitcoin: Policy Recommendations*. *Ethics and Law on the Electronic Frontier*. Cambridge: MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory.

atas perkembangan *cryptocurrency* (Bitcoin) mempengaruhi rumusan rekomendasi kebijakan yang dalam hal ini berupa pelegalan Bitcoin, khususnya terkait penetapan hukum serta aturan pasar dan bisnis Bitcoin. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa terdapat aspek lain yang dapat mempengaruhi kebijakan sebuah negara seperti aspek masyarakat, aspek pasar dan lain sebagainya.

Penelitian *Kedua* ditulis oleh Samantha Douma dengan judul “*Bitcoin: The Pros and Cons of Regulations*”.³ Penelitian tersebut berangkat dari kontroversi kemunculan Bitcoin yaitu ketika pemerintah negara-negara dunia mengambil sikap yang berbeda terkait penggunaan Bitcoin. Penelitian karya Douma berkontribusi terhadap penelitian ini guna membangun kerangka pemikiran mengenai logika persaingan antara Bitcoin dan *fiat money* dalam mempengaruhi kebijakan keuangan negara. Logika atas hadirnya pengaruh tersebut merujuk pada penjelasan Douma atas kaitan nilai pada mata uang sebagai media pertukaran untuk mengetahui nilai yang ada pada Bitcoin. Keberlangsungan Bitcoin karenanya butuh ditetapkan jika ingin dipergunakan, serta secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap penentuan kebijakan keuangan negara. Kebijakan keuangan negara penting dirumuskan untuk menciptakan stabilitas perekonomian suatu negara, sehingga dalam implementasinya negara seharusnya mengambil keputusan atas penggunaan atau tidaknya suatu *currency*. Logika yang dikemukakan oleh Douma tersebut kemudian diadopsi dalam penelitian ini sebagai salah satu aspek yang mempengaruhi posisi negara dalam penerimaan Bitcoin.

Penelitian ketiga adalah penelitian yang ditulis oleh Matthew Kien dengan judul “*Coining Bitcoin’s “Legal-Bits”: Examining the Regulatory Framework for Bitcoin and Virtual Currencies*”.⁴ Penelitian tersebut berangkat dari fenomena kemunculan *virtual currency* dan Bitcoin yang baru-baru ini menyita perhatian media dan para pembuat kebijakan negara. Atas kehadiran fenomena tersebut, masih banyak masyarakat yang belum memahami apa dan bagaimana cara kerja *virtual currency* termasuk Bitcoin. Penelitian karya Kien ini

³ Samantha Douma. 2016. Master Tesis. *Bitcoin: The Pros and Cons of Regulation. International Relation (Master)*. Leiden: Leiden University.

⁴ Matthew Kien. 2014. *Coining Bitcoin’s “Legal-Bits: Examining the Regulatory Framework for Bitcoin and Virtual Currencies*. *Harvard Journal of Law & Technology* Vol. 27. Cambridge: Harvard Law School.

berkontribusi terhadap penelitian ini sebagai landasan dalam perumusan model kerangka pemikiran. Penelitian ini mengadopsi konsep yang digunakan dalam penelitian Kien yaitu berupa konsep *virtual currency* serta konsep tata kelola. Kien dalam penelitiannya berasumsi bahwa *virtual currency* dan konsep tata kelola menjadi dasar pertimbangan kebijakan pemerintah Amerika Serikat khususnya pada aspek hukum dan legalitas Bitcoin. Sedangkan penelitian ini justru hanya berfokus pada kebijakan terkait posisi penerimaan atau penolakan negara terhadap Bitcoin.

Penelitian keempat yang ditulis oleh Daniela Sonderegger dengan judul “*A Regulatory and Economic Perplexity: Bitcoin Needs Just a Bit of Regulation*”.⁵ Penelitian tersebut berangkat dari pemikiran bahwa terdapat perubahan pada sistem keuangan dunia, yang mana otoritas pusat tidak lagi menjadi satu-satunya pihak yang berperan dalam pergerakan nilai mata uang, tapi juga atas keberadaan masyarakat dalam sistem tersebut. Sonderegger mengemukakan bahwa Bitcoin bukan hanya sekedar teknologi baru, lebih dari itu juga merupakan tawaran sistem keuangan baru yang tidak terpusat sebagaimana mata uang konvensional lainnya.⁶ Penelitian karya Sonderegger ini memposisikan Bitcoin yang didominasi oleh level bisnis dan *fiat money* yang dikuasai oleh pemerintah, dimana terdapat persaingan diantara dua hal tersebut. Sonderegger berpendapat bahwa Bitcoin dan *fiat money* tidak secara bersamaan saling mempengaruhi, namun disebutkan bahwa negara secara ideologi menginginkan untuk memberi aturan atas Bitcoin. Penelitian ini juga mengadopsi model pemikiran tersebut, dengan mengasumsikan bahwa performa *fiat money* dan perkembangan *cryptocurrency* dapat memberikan pengaruh terhadap posisi negara atas penerimaan Bitcoin, sebagaimana dibangun dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Terdapat beberapa perbedaan antara empat penelitian terdahulu dengan penelitian ini, dimana ke empat penelitian terdahulu tersebut fokus pada perumusan regulasi Bitcoin, yang masing-masing menjelaskan pertimbangannya

⁵ Daniela Sonderegger. 2015. *A Regulatory and Economic Perplexity: Bitcoin Needs Just a Bit of Regulation*. *Journal of Law & Policy* Volume 47. United State: Washington University School of Law.

⁶ *Ibid.*

atas keuntungan dan kelemahan Bitcoin ataupun respon pemerintah negara dilihat dari potensi serta tantangan Bitcoin yang ada. Penelitian-penelitian terdahulu juga memberikan hasil rekomendasi kebijakan yang cenderung mirip satu sama lain sehingga rekomendasi kebijakan terkait Bitcoin tidak variatif. Lingkup objek penelitian yang digunakan juga lebih kepada urusan domestik negara dibandingkan pandangan internasional, sehingga hasil penelitian dinilai kurang relevan untuk diterapkan di berbagai negara, sebab Bitcoin merupakan fenomena global sehingga objek penelitian idealnya harus menggunakan objek dengan lingkup yang besar. Penelitian ini juga mencoba mengambil fokus yang berbeda, yaitu akan membahas posisi negara dalam menerima Bitcoin, sehingga tidak hanya fokus pada kelemahan dan keunggulan serta regulasi-regulasi yang direkomendasikan kepada negara terkait Bitcoin. Penelitian ini tidak hanya menjadikan Bitcoin sebagai objek yang akan diteliti, tetapi negara sebagai objek penelitian.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis data regresi logistik multinomial. Bob Matthews dan Liz Ross menjelaskan penelitian kuantitatif berkaitan dengan pengumpulan data dan analisis data yang terstruktur serta dinyatakan secara numerik.⁷ Data-data numerik tersebut kemudian diolah menggunakan program statistik dan ditafsirkan guna menjawab pertanyaan dalam penelitian. Hal ini perlu dilakukan untuk mengukur performa masing-masing variabel independen (Sistem Kelola Negara, Perkembangan *Cryptocurrency* dan Performa *Fiat Money*) dalam mempengaruhi variabel dependen dalam penelitian ini (Posisi Negara dalam Penerimaan Bitcoin). Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dari berbagai dokumen online, laporan, dan data-data dari peneliti sebelumnya, lembaga serta bank data dari organisasi internasional seperti: World Bank, IMF, CIA, Bitcoin dan lainnya. Penelitian ini akan berfokus untuk mengkaji posisi negara-negara dunia terkait kontroversi Bitcoin.

⁷ Bob Matthews dan Liz Ross. 2010. *Research Methods, A Practical Guide For The Social Sciences*. London: Pearson Education. Halaman 141.

Hasil Uji Simultan

Pengujian model dengan melibatkan pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersamaan, serta ketepatan model yang telah dibuat. Uji pertama yang dilakukan yaitu uji keragaman model menggunakan uji *Goodness of Fit Test*, dimana dalam uji ini H_0 dapat diterima jika nilai signifikan $> 0,05$ yang dimaknai bahwa tidak ada perbedaan signifikan antar variabel yang terlibat. Sebaliknya, H_0 akan ditolak jika nilai signifikan $< 0,05$ sebab terdapat perbedaan yang signifikan. Adapun hasil uji *Pearson* pada model berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Model - *Goodness of Fit Test*

	Chi-Square	df	Sig.
Pearson	1,199	54	1,000
Deviance	2,311	54	1,000

Sumber: Hasil Olah SPSS

Berdasarkan hasil uji di atas diketahui bahwa nilai *p-value (sig)* sebesar 1,000 lebih besar dari 0,05 sehingga H_0 diterima, yang mengartikan bahwa model yang dibuat telah tepat merepresentasikan data dan tidak terdapat perbedaan yang nyata antara hasil observasi dengan hasil prediksi.

Pengujian selanjutnya dilakukan terhadap seluruh variabel independen secara bersamaan terhadap variabel dependen. Pengaruh tersebut terlihat melalui uji G atau *likelihood ratio test* berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Model - *Likelihood Ratio Test*

	Model Fitting Criteria	Likelihood Ratio Tests		
	-2 Log Likelihood	Chi-Square	df	Sig.
Intercept Only	79,890			
	3,697	76,193	38	,000

Sumber: Hasil olah SPSS

Hasil uji menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 yang mengartikan bahwa nilainya lebih rendah daripada 0,05 sehingga hipotesis model simultan menunjukkan bahwa H_1 diterima yang artinya terdapat pengaruh antara variabel independen yang diujikan secara bersamaan terhadap posisi negara atas penerimaan Bitcoin. Hal ini bermakna bahwa kesembilan variabel independen secara bersama-sama di dalam model secara signifikan berpengaruh mengungkap

variabel dependen. Hasil uji tersebut memperlihatkan bahwa negara dalam memposisikan diri atas Bitcoin perlu adanya peninjauan bersama-sama pada kesembilan faktor yang terdiri dari: sebaran nodes Bitcoin, tingkat volume Bitcoin, tingkat perdagangan Bitcoin, jumlah uang beredar, tingkat inflasi, sistem nilai tukar, sistem pemerintahan, sistem ekonomi dan rezim demokrasi yang digunakan. Dampak dari kesembilan faktor tersebut menentukan kecenderungan sebuah negara memposisikan diri atas keberadaan Bitcoin.

Signifikansi yang tinggi dari kesembilan variabel secara bersamaan dalam mempengaruhi variabel dependennya, tidak menutup kemungkinan atas adanya variabel-variabel lain yang turut mempengaruhi variabel dependen. Maka dari itu dilakukan uji Pseudo R-Square yang terdiri dari *Cox and Snel*, *Nagelkerke*, dan *Mc Fadden* guna melihat tingkat kekuatan model untuk menjelaskan fenomena, dimana kesembilan variabel independen yang diujikan terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini menghasilkan nilai Nagelkerke menunjukkan nilai sebesar 0,974 atau 97,4%. Hal ini berarti keragaman variabel independen dalam penelitian ini mampu menjelaskan keragaman variabel dependen sebesar 97,4%. Artinya, seluruh variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara serentak pada kisaran 97,4%. Sejumlah 2,6% lainnya dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel-variabel di luar penelitian ini atau belum dilibatkan dalam penelitian ini. Selain itu nilai Nagelkerke sangat mendekati 1 sehingga model dinilai cukup kuat untuk menjelaskan fenomena penerimaan dan penolakan Bitcoin.

Hasil Uji Parsial

Hasil uji model secara parsial dari masing-masing variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen justru memperlihatkan hasil yang beragam. Ketika variabel-variabel independen diuji secara parsial menunjukkan bahwa tidak semua variabel memiliki pengaruh yang signifikan. Hasil uji di atas memperlihatkan dari sembilan variabel independen, secara statistik tujuh diantaranya signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen, sedangkan dua sisanya tidak signifikan berpengaruh mengelompokkan negara-negara.

Dari ketujuh variabel independen yang secara statistik signifikan, variabel sistem ekonomi dinilai memiliki pengaruh yang paling besar dalam menentukan

posisi negara atas penerimaan Bitcoin. Ketika sebuah negara mengubah sistem ekonominya maka probabilitas negara tersebut untuk pindah dari satu kategori ke kategori lain akan semakin besar. Adapun hasil uji sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Parsial

	Model Fitting Criteria	Likelihood Ratio Tests		
	-2 Log Likelihood of Reduced Model	Chi-Square	df	Sig.
	3,697 ^a	,000	0	
SP	26,737	23,040	6	,001
SE	27,069 ^b	23,372	4	,000
RD	21,689	17,992	6	,006
Nodes	4,159 ^b	,462	4	,977
Volume	25,753 ^b	22,056	4	,000
Perdagangan	17,666 ^b	13,969	4	,007
Uang Beredar	24,728	21,031	4	,000
Inflasi	24,728	21,031	4	,313
Nilai Tukar	8,455 ^b	4,758	0	,000

Sumber: Hasil olah SPSS

Kesimpulan

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa performa *fiat money*, perkembangan Bitcoin dan sistem kelola negara mempengaruhi penentuan posisi negara dalam penerimaan Bitcoin, baik legal, netral ataupun ilegal. Hasil ini diperkuat dengan hasil uji yang menyatakan bahwa model layak digunakan (Goodness of Fit Test dengan nilai sig = 1,000), serta memiliki pengaruh (Model Fitting Information dengan nilai sig = 0,000) terhadap variabel dependen, dan mampu menjelaskan kekuatan fenomena (nilai Nagelkarke 0,974) atau sebesar 97,4 persen.

Adapun secara parsial tujuh faktor berpengaruh membedakan yaitu: Sistem Ekonomi (0,000); Sistem Pemerintahan (0,001); Volume Bitcoin (0,000); Uang Beredar (0,000); Sistem Nilai Tukar (0,000); Rezim Demokrasi (0,006); dan Perdagangan Bitcoin (0,007). Sedangkan dua faktor lain dinilai tidak berpengaruh, yaitu: Nodes (0,977) dan Inflasi (0,313).

Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan sistem kelola negara dan erat aspek politik sedangkan faktor-faktor terkait perkembangan Bitcoin dan performa uang fiat dinilai kurang dalam

memberikan pengaruh dalam membedakan negara untuk melegalkan atau mengilegalkan Bitcoin. Dalam kondisi ini negara akan cenderung bergerak untuk melegalkan Bitcoin yang pada akhirnya dapat menggeser peran pemerintah, bank dan masyarakat.

Penelitian ini merekomendasikan bagi negara-negara dalam mempertimbangkan posisinya atas Bitcoin harus memperhatikan faktor-faktor terkait sistem kelola negara serta kondisi *fiat money* dan perkembangan Bitcoin, juga terkait pergeseran kondisi keuangan internasional. Sistem keuangan konvensional (*fiat money*) memiliki karakteristik yang tidak hadir dalam *cryptocurrency*, dimana perbedaan karakteristik itu harus menjadi instrumen penelitian mata uang jenis baru tersebut. Sehingga disarankan bagi para akademisi untuk memperbaharui konsep keuangan internasional khususnya yang berbasis *cryptocurrency*.

Penelitian ini juga memberikan saran dan rekomendasi untuk peneliti selanjutnya, bahwa penelitian ini sudah menggunakan sampel yang cukup memadai, namun dengan instrumen yang sangat kategoristik. Sehingga diharapkan untuk dapat melibatkan skala lainnya yang tidak kategoristik sehingga analisa yang dilakukan lebih rinci dan mendalam.

Daftar Pustaka

- Alcorn, Thomas. 2013. Legitimizing Bitcoin: Policy Recommendations. *Ethics and Law on the Electronic Frontier*. Cambridge: MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory.
- Douma, Samantha. 2016. Master Tesis. Bitcoin: The Pros and Cons of Regulation. *International Relation (Master)*. Leiden: Leiden Univerisity.
- Kien, Matthew. 2014. Coining Bitcoin's "Legal-Bits: Examining the Regulatory Framework for Bitcoin and Virtual Currencies. *Harvard Journal of Law & Technology* Vol. 27. United State: Harvard Law School.
- Sonderegger, Daniela. 2015. A Regulatory and Economic Perplexity. *Washington University Journal of Law & Policy*. St.Louis: Washington University.
- Matthews, Bob dan Lizz Ross. 2010. *Research Methods, A practical guide for the social sciences*. London: Pearson Education.
- Jenis-jenis *Cryptocurrency* <https://coinmarketcap.com/all/views/all/>

